



BA 023



LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2019
AUDITED

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 *Audited* ini, menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp715.068.096.483,- atau 3.022,69% dari estimasi pendapatan sebesar Rp23.656.650.000,-. Besarnya realisasi Pendapatan Negara disebabkan pengembalian belanja tahun yang lalu sebesar Rp642.297.950.814,-, diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain (PMK Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat), yang tidak dimasukkan dalam target penerimaan tahun berjalan. Pengembalian belanja tersebut antara lain pengembalian dana PIP, tunjangan guru, kelebihan

- pembayaran gaji, Tukin, uang makan, pengembalian dana sertifikasi, dan pengembalian dana atas bantuan pemerintah.
- b. Realisasi Belanja periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 Negara adalah sebesar Rp36.494.689.999.332,- atau 97,60% dari alokasi anggaran sebesar Rp37.393.540.578.000,-.
2. Neraca menyajikan informasi tentang komposisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kemendikbud per 31 Desember 2019, dengan nilai Aset sebesar Rp28.664.698.290.734,- dan Kewajiban sebesar Rp545.381.696.085,- sehingga Ekuitas adalah sebesar Rp28.119.316.594.649,-.
 3. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional Kemendikbud mengalami defisit sebesar (Rp36.533.797.581.673,-). Hal ini sebagai akibat penerapan akuntansi berbasis akrual dimana pagu anggaran tidak diakui sebagai pendapatan Kementerian, sedangkan realisasi belanja diakui sebagai beban.
 4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.119.316.594.649,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.012.012.323.020,- dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2018 sebesar Rp14.107.304.271.629,-.
 5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan akun-akun laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.



Jakarta, 20 April 2020
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
NIP. 196012041986011001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
A.1. Dasar Hukum	11
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	23
A.4. Basis Akuntansi	25
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi	26
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	37
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	37
B.2. Belanja Negara	42
B.3. Catatan Penting Lainnya	62
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	64
C.1. Aset Lancar	64
C.2. Aset Tetap	78
C.3. Piutang Jangka Panjang	90
C.4. Aset Lainnya	92
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	101
C.6. Ekuitas	113
C.7. Pengungkapan Penting Lainnya	113
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	115
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	116
D.2. Beban Pegawai	119
D.3. Beban Persediaan	121
D.4. Beban Barang dan Jasa	122
D.5. Beban Pemeliharaan	123
D.6. Beban Perjalanan Dinas	124
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	126
D.8. Beban Bantuan Sosial	127
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	128

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	129
D.11. Beban Lain-lain	130
D.12. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	130
D.13. Pos Luar Biasa	134
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	135
E.1. Ekuitas Awal	135
E.2. Surplus/(Defisit) LO	136
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	137
E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	137
E.5. Transaksi Antar Entitas	143
E.6. Ekuitas Akhir	149
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	149



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 April 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



Nadiem Anwar Makarim



RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran (pagu) dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp715.068.096.483,- atau mencapai 3.022,69% dari estimasi pendapatan sebesar Rp23.656.650.000,-.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.494.689.999.332,- atau mencapai 97,60% dari alokasi anggaran sebesar Rp37.393.540.578.000,-.

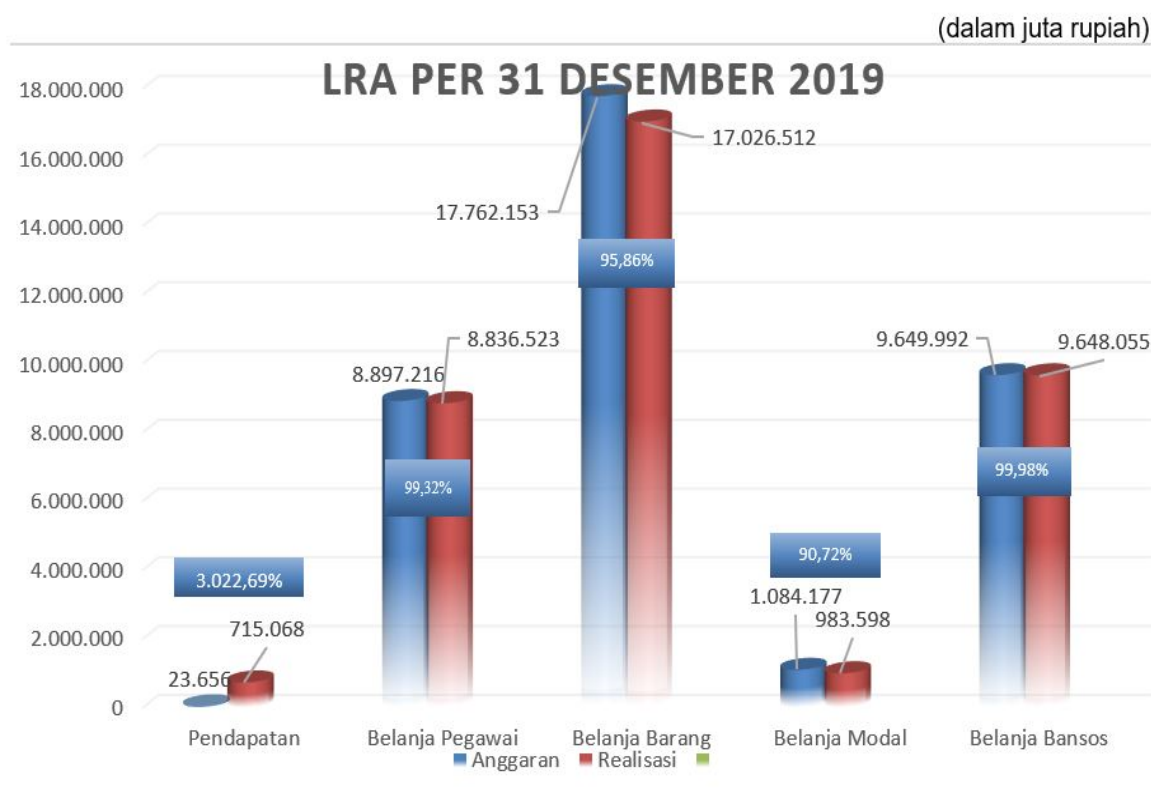
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara	23.656.650.000	715.068.096.483	3.022,69	15.028.552.756	1.034.440.482.293	6.883,17
JUMLAH PENDAPATAN	23.656.650.000	715.068.096.483	3.022,69	15.028.552.756	1.034.440.482.293	6.883,17
Belanja Pegawai	8.897.216.459.000	8.836.523.305.435	99,32	8.542.604.560.000	8.345.622.015.736	97,69
Belanja Barang	17.762.153.456.000	17.026.512.844.031	95,86	20.762.831.390.000	20.020.060.946.049	96,42
Belanja Modal	1.084.177.889.000	983.598.242.341	90,72	1.109.863.028.000	1.015.169.213.941	91,47
Belanja Bantuan Sosial	9.649.992.774.000	9.648.055.607.525	99,98	10.078.137.694.000	10.051.583.455.170	99,74
JUMLAH BELANJA	37.393.540.578.000	36.494.689.999.332	97,60	40.493.436.672.000	39.432.435.630.896	97,38

Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Grafik 1 : Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019

Selanjutnya dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penggabungan dari seluruh DIPA satker (319 satker) di lingkungan Kemendikbud jumlah pagu per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp37.393.540.578.000,-, dengan rincian per Eselon – I sebagai berikut:

NO	UNIT ESELON-1	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Jenderal	1.923.522.724.000	1.860.149.471.975	96,71
2	Inspektorat Jenderal	188.524.713.000	180.668.801.363	95,83
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	19.076.108.558.000	18.805.610.126.129	98,58
4	Direktorat Jenderal PAUD & Dikmas	1.866.042.540.000	1.785.408.080.509	95,68
5	Balitbang	1.188.578.297.000	1.096.411.637.895	92,25
6	Badan Pembinaan Bahasa	581.986.879.000	535.059.772.212	91,94
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	1.795.283.807.000	1.662.450.908.321	92,60
8	Direktorat Jenderal Guru & TK	10.773.493.060.000	10.568.931.200.928	98,10
JUMLAH		37.393.540.578.000	36.494.689.999.332	97,60

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.06/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp28.664.698.290.734,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.242.455.146.784,-, Aset Tetap (neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan) sebesar Rp25.185.910.617.510,-, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.236.332.526.440,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp545.381.696.085,- yang seluruhnya terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp28.119.316.594.649,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
Aset	28.664.698.290.734	14.771.555.428.551	13.893.142.862.183	94,05
Aset Lancar	1.242.455.146.784	2.217.158.206.609	(974.703.059.825)	(43,96)
Aset Tetap	25.185.910.617.510	10.395.458.651.651	14.790.451.965.859	142,28
Piutang Jangka Panjang	0	88.457.656	(88.457.656)	(100,00)
Aset Lainnya	2.236.332.526.440	2.158.850.112.635	77.482.413.805	3,59
Kewajiban	545.381.696.085	664.251.156.922	(118.869.460.837)	(17,90)
Kewajiban Jangka Pendek	545.381.696.085	664.251.156.922	(118.869.460.837)	(17,90)
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0,00
Ekuitas	28.119.316.594.649	14.107.304.271.629	14.012.012.323.020	99,32
Kewajiban dan Ekuitas	28.664.698.290.734	14.771.555.428.551	13.893.142.862.183	94,05

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp68.498.359.813,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp36.842.905.354.116,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp36.774.406.994.303,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp240.609.412.630,- dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp36.533.797.581.673,-).

Defisit LO diakibatkan penerapan akuntansi berbasis akrual dimana pagu anggaran tidak diakui sebagai pendapatan Kementerian, sedangkan realisasi belanja diakui sebagai beban.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp14.107.304.271.629,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp36.533.797.581.673,-) kemudian ditambah koreksi yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp14.476.865.651.848,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp36.068.944.252.845,-, sehingga Ekuitas Kemendikbud pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp28.119.316.594.649,- atau naik 99,32%.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



LRA

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019			31 DESEMBER 2018		
		ANGGARAN	REALISASI NETO	%	ANGGARAN	REALISASI NETO	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.						
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	23.656.650.000	715.068.096.483	3.022,69	15.028.552.756	1.034.440.482.293	6.883,17
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		23.656.650.000	715.068.096.483	3.022,69	15.028.552.756	1.034.440.482.293	6.883,17
B. Belanja Negara	B.2						
1. Belanja Pegawai	B.2.1	8.897.216.459.000	8.836.523.305.435	99,32	8.542.604.560.000	8.345.622.015.736	97,69
2. Belanja Barang	B.2.2	17.762.153.456.000	17.026.512.844.031	95,86	20.762.831.390.000	20.020.060.946.049	96,42
3. Belanja Modal	B.2.3	1.084.177.889.000	983.598.242.341	90,72	1.109.863.028.000	1.015.169.213.941	91,47
4. Belanja Sosial	B.2.4	9.649.992.774.000	9.648.055.607.525	99,98	10.078.137.694.000	10.051.583.455.170	99,74
Jumlah Belanja Negara		37.393.540.578.000	36.494.689.999.332	97,60	40.493.436.672.000	39.432.435.630.896	97,38



Jakarta, 20 April 2020
 Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
 NIP. 196012041986011001



NERACA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN/(PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	16.978.861.883	8.424.255.920	8.554.605.963	101,55
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	1.604.000	325.000	1.279.000	393,54
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	80.465.430.689	222.407.919.463	(141.942.488.774)	(63,82)
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.4	771.004.826.422	746.624.152.037	24.380.674.385	3,27
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1.5	-	3.239.072.280	(3.239.072.280)	(100,00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.6	1.929.044.625	1.276.144.200	652.900.425	51,16
Piutang Bukan Pajak	C.1.7	4.756.763.770	2.150.450.806	2.606.312.964	121,20
<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</i>	C.1.8	<i>(23.783.819)</i>	<i>(10.752.255)</i>	<i>(13.031.564)</i>	<i>121,20</i>
Piutang Bukan Pajak (Neto)		4.732.979.951	2.139.698.551	2.593.281.400	121,20
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.9	577.095.000	840.073.333	(262.978.333)	(31,30)
<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</i>	C.1.10	<i>(2.885.475)</i>	<i>(4.200.367)</i>	<i>1.314.892</i>	<i>(31,30)</i>
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)		574.209.525	835.872.966	(261.663.441)	(31,30)
Persediaan	C.1.11	366.768.189.689	1.232.210.766.192	(865.442.576.503)	(70,23)
JUMLAH ASET LANCAR		1.242.455.146.784	2.217.158.206.609	(974.679.626.481)	(43,96)
ASET TETAP	C.2				
Tanah	C.2.1	16.811.909.997.257	4.040.119.575.914	12.771.790.421.343	316,12
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.696.121.667.905	3.417.235.655.314	278.886.012.591	8,16
Gedung dan Bangunan	C.2.3	6.679.857.570.435	5.004.481.460.948	1.675.376.109.487	33,48
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	268.803.858.914	253.532.131.731	15.271.727.183	6,02
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	407.805.021.259	412.300.389.335	(4.495.368.076)	(1,09)
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	563.946.376.700	764.495.228.518	(200.548.851.818)	(26,23)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(3.242.533.874.960)	(3.496.705.790.109)	254.171.915.149	(7, 27)
JUMLAH ASET TETAP		25.185.910.617.510	10.395.458.651.651	14.790.451.965.859	142,28

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN/(PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	-	88.902.167	(88.902.167)	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	-	(444.511)	444.511	100,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)		-	88.457.656	(88.457.656)	(100,00)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.3	89.765.100	89.765.100	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.4	(89.765.100)	(89.765.100)	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Neto)		-	-	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	88.457.656	(88.457.656)	(100,00)
ASET LAINNYA	C.4				
Aset Tak Berwujud	C.4.1	259.992.096.164	273.541.419.740	(13.549.323.576)	(4,95)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	2.056.684.175.000	1.952.635.775.000	104.048.400.000	5,33
Aset Lain-lain	C.4.3	572.360.053.029	607.599.164.234	(35.239.111.205)	(5,80)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(652.703.797.753)	(674.926.246.339)	22.222.448.586	(3,29)
JUMLAH ASET LAINNYA		2.236.332.526.440	2.158.850.112.635	77.482.413.805	3,59
JUMLAH ASET		28.664.698.290.734	14.771.555.428.551	13.893.142.862.183	94,05
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	508.057.767.851	508.819.563.523	(761.795.672)	(0,15)
Hibah Yang Belum Disahkan	C.5.2	17.540.476.312	145.333.049.611	(127.792.573.299)	(87,93)
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	2.383.551.950	1.405.663.161	977.888.789	69,57
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	16.978.861.883	8.424.255.920	8.554.605.963	101,55
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.5	421.038.089	268.624.707	152.413.382	56,74
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		545.381.696.085	664.251.156.922	(118.869.460.837)	(17,90)
JUMLAH KEWAJIBAN		545.381.696.085	664.251.156.922	(118.869.460.837)	(17,90)
EKUITAS	C.6				
Ekuitas	C.6.1	28.119.316.594.649	14.107.304.271.629	14.012.012.323.020	99,32
JUMLAH EKUITAS		28.119.316.594.649	14.107.304.271.629	14.012.012.323.020	99,32
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		28.664.698.290.734	14.771.555.428.551	13.893.142.862.183	94,05



Jakarta, 20 April 2020
 Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
 NIP. 196012041986011001



LO

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	68.498.359.813	43.276.250.197	25.222.109.616	58,28
JUMLAH PENDAPATAN		68.498.359.813	43.276.250.197	25.222.109.616	58,28
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	8.941.451.705.996	8.184.014.047.635	757.437.658.361	9,26
Beban Persediaan	D.3	83.365.759.026	85.770.162.444	(2.404.403.418)	(2,80)
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.640.975.935.432	5.153.016.826.382	(512.040.890.950)	(9,94)
Beban Pemeliharaan	D.5	321.639.704.733	330.271.538.530	(8.631.833.797)	(2,61)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.955.091.310.537	4.119.141.569.418	(164.050.258.881)	(3,98)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	9.053.405.336.455	12.700.561.529.708	(3.647.156.193.253)	(28,72)
Beban Bantuan Sosial	D.8	9.216.714.720.340	11.839.377.941.500	(2.622.663.221.160)	(22,15)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	630.249.609.436	524.507.332.120	105.742.277.316	20,16
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	11.272.161	60.039.183	(48.767.022)	(81,23)
Beban Lain-lain	D.11	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN		36.842.905.354.116	42.936.720.986.920	(6.093.815.632.804)	(14,19)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(36.774.406.994.303)	(42.893.444.736.723)	6.119.037.742.420	14,27
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12				
Surplus /(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(82.097.733.975)	(77.725.496.213)	(4.372.237.762)	(5,63)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		7.657.939.531	6.364.254.081	1.293.685.450	20,33
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		89.755.673.506	84.089.750.294	5.665.923.212	6,74
Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		322.707.146.605	96.964.257.286	225.742.889.319	232,81
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		327.026.671.838	111.020.250.958	216.006.420.880	194,56
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.319.525.233	14.055.993.672	(9.736.468.439)	(69,27)
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		240.609.412.630	19.238.761.073	221.370.651.557	1.150,65
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(36.533.797.581.673)	(42.874.205.975.650)	6.340.408.393.977	14,79
POS LUAR BIASA	D.13	0	0	0	-
Beban Luar Biasa		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(36.533.797.581.673)	(42.874.205.975.650)	6.340.408.393.977	14,79



Jakarta, 20 April 2020
 Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
 NIP. 196012041986011001



LPE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	E.1	14.107.304.271.629	18.247.082.607.599	(4.139.778.335.970)	(22,69)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(36.533.797.581.673)	(42.874.205.975.650)	6.340.408.393.977	14,79
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.4	14.476.865.651.848	44.820.227.644	14.432.045.424.204	32.199,85
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		2.557.000	489.143.525	(486.586.525)	(99,48)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		2.850.701.838	-	2.850.701.838	∞
SELISIH REVALUASI ASET		14.191.015.238.943	-	14.191.015.238.943	∞
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		283.299.631.520	(229.888.161.305)	513.187.792.825	223,23
LAIN-LAIN		(302.477.453)	274.219.245.424	(274.521.722.877)	(100,11)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	36.068.944.252.845	38.689.607.412.036	(2.620.663.159.191)	(6,77)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		14.012.012.323.020	(4.139.778.335.970)	18.151.790.658.990	438,47
EKUITAS AKHIR	E.6	28.119.316.594.649	14.107.304.271.629	14.012.012.323.020	99,32

Jakarta, 20 April 2020
 Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im
 NIP. 196012041986011001



Catatan atas Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada

Entitas Pemerintah Pusat;

22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Entitas Pemerintah Pusat;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 437/M/2019 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
29. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 153419/A.A2/KU/2019 tanggal 27 Desember 2019 hal Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 *Unaudited* di lingkungan Kemendikbud;
30. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-2157/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun;
31. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-15/KN/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal

- Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Koreksi Hasil Revaluasi BMN;
32. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-1114/AG/2019 tanggal 2 Juli 2019 hal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BA 023) untuk insentif TA 2019 atas Kinerja Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2018;
33. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-1490/AG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 hal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BA 023) untuk Tambahan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2019.

A.2. Profil dan
Kebijakan Teknis
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a. Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara ringkas struktur eselon I di lingkungan Kemendikbud, digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel A.1 ...

Tabel A.1
Struktur Organisasi Kemendikbud

No	Struktur Organisasi Kemendikbud	Kode Eselon
1	Sekretariat Jenderal	01
2	Inspektorat Jenderal	02
3	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	03
4	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	05
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	11
6	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	13
7	Ditjen Kebudayaan	15
8	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	16

Visi
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan

b. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari

masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemusiaannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 - 2019 yaitu: **“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**.

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah dimaksudkan untuk menekankan arti sangat penting atas peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang Kondusif;
2. Guru sebagai Penyemangat;
3. Orangtua yang Terlibat Aktif;
4. Masyarakat yang Sangat Peduli;
5. Industri yang Berperan Penting;
6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar;
7. Pemerintah yang Berperan Optimal.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;

2. Terbentuknya wawasan kebangsaan dikalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih baik;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Misi
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan

c. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi
M1	Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
M2	Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan
M3	Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
M4	Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
M5	Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Misi renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan kepribadian;

2. Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan Bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan Bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan Bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Penerapannya terintegrasi pada pengelolaan pendidikan yang mencakup tujuh jalan revolusi mental, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

*Tujuan
Strategis
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan*

d. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

Kode	Tujuan Strategis
T1	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
T2	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan
T3	Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
T4	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T5	Peningkatan Jati Diri Bangsa Melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
T6	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

e. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis untuk mengkonfirmasi tujuan strategis tersebut dicapai pada masa depan Tahun 2019. Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, Dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan**, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS1) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai perilaku Siswa PAUD minimal Baik
		Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik
SS1.2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam Pendidikan keluarga sebanyak 4.425.000 orang.
SS1.3	Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional

2. **Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan**, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS2) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2.1	Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan

		Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai kategori sedang (skor54)
--	--	--

3. **Terwujudnya tujuan strategis 3 M (T3): Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus**, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS3) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS3.1	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
		Sejumlah minimal 70% Kabupaten dan kota memiliki Lembaga PAUD terpadu pembina holistic integrative
		Jumlah Lembaga Kursus dan pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi) sebanyak 7.871 lembaga
		Angka melek aksara penduduk usia dewasa 15-59 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
		Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, Kursus dan Pelatihan atau UPTD)
SS3.2	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia Pendidikan dasar dan menengah	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		APK SMP/SMPLB/Paket B Sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
		APK SMA/SMK/SMALB/Paket C

		Sekurang-kurangnya 85,71%
		APM SMA/SMK/SMALB seurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% Penduduk termiskin dan 20% Pendudu terkaya sebesar 0.9
		Rasio APK SMA/SMK/SMALB antara 20% Penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
SS3.3	Meningkatnya distribusi guru dan tenaga pendidikan	Persentase satuan Pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum

4. **Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter**, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS4) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.1	Meningkatnya mutu Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah Lembaga PAUD Terakreditasi sebanyak 42.926 Lembaga
		Persentase Program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi sebanyak 71,38%
SS4.2	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan Pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84.20%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%
		Pesentase SMA/SMALB berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya 85%

		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM Sebanyak 61%
		Presentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM Pendidikan dasar sebesar 1
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
		Rata-rata ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
		Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu
SS4.3	Meningkatnya jumlah lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 250.000 lembaga

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): **Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan**, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS5) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5.1	Meningkatnya mutu Bahasa Indonesia dan Pemakaiannya sebagai Penghela Ipteks dan Penguat Daya Saing Indonesia	Jumlah Pemer kaya Minat Baca
		Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI
		Jumlah Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra
		Jumlah Kabupaten/Kota yang penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publiknya Terkendali
SS5.2	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

	sebagai Bahasa penghubung di Kawasan ASEAN	Jumlah Penutur Asing yang Menjadi Pemelajar Bahasa Indonesia
--	--	--

6. **Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik**, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS6.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor SAKIP Kemendikbud
SS6.2	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS6.3	Meningkatnya Pelibatan Publik dalam tata kelola Pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentinganKemendikbud sebesar 77

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kemendikbud. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 *Audited* ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang unit akuntansi di bawah Kemendikbud yang meliputi eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kemendikbud adalah 319 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 319 satker (100%), dengan rincian per eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel A.2 ...

Tabel A.2
Rekapitulasi Jumlah Satker Kemendikbud Per Eselon-1

No	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP		M	TM
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	2301	Sekretariat Jenderal	32	-	3	-	34	-	-	-	69	-
2	2302	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	2303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	6	-	34	-	34	-	-	-	74	-
4	2305	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	5	-	29	-	-	-	-	-	34	-
5	2311	Badan Penelitian dan Pengembangan	5	-	10	-	-	-	-	-	15	-
6	2313	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	4	-	30	-	-	-	-	-	34	-
7	2315	Ditjen Kebudayaan	6	-	33	-	-	-	-	-	39	-
8	2316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	5	-	14	-	34	-	-	-	53	-
JUMLAH			64	-	153	-	102	-	-	-	319	-

Keterangan: KP = Kantor Pusat, KD = Kantor Daerah, DK = Dekonsentrasi, TP = Tugas Pembantuan, M = Mengirim, TM = Tidak Mengirim

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis
Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Penerapan akuntansi berbasis akrual, entitas menggunakan dua macam aplikasi, yaitu :

1. Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual), yaitu aplikasi akuntansi yang digunakan untuk memproses transaksi yang berkaitan dengan keuangan, dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.
2. Aplikasi SIMAK – BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), yaitu aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

Dasar
Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda diakui pada saat Lembaga/perorangan penerima bantuan pemerintah telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)/Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Beban Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) diakui pada saat siswa penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar melakukan aktivasi rekening virtual siswa tersebut.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Termasuk di dalam Belanja Dibayar Dimuka adalah Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemda/lembaga penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau Berita Acara Serah Terima.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Lainnya merupakan transaksi pengembalian belanja TAYL, dimana sampai dengan tanggal 31 Desember TAYL, kas tersebut masih berada di pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara Pengeluaran.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 dilakukan *take out* pada satker konsolidasian Kementerian.
- Surat BPK RI Nomor : 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018. BPK berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 berserta perbaikannya dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Unaudited*). Sehingga atas jurnal *take out* reval pada satker konsolidasian Kemendikbud telah dilakukan jurnal balik sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-15/KN/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal

Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Koreksi Hasil Revaluasi BMN.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp715.068.096.483,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp715.068.096.483,- atau mencapai 3.022,69% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp23.656.650.000,-. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang sebagian besar adalah pengembalian belanja tahun lalu.

Tabel B.1
Rencana dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Estimasi PNBP TA 2019	Realisasi s.d 31 Des 2019	%
1	Pendapatan PNBP Lainnya	Rp 23.656.650.000	Rp 715.068.096.483	3.022,69
Jumlah		Rp 23.656.650.000	Rp 715.068.096.483	3.022,69

Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel B.2
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan PNBP Lainnya	715.068.096.483	1.034.440.482.293	(319.372.385.810)	(30,87)
Jumlah		715.068.096.483	1.034.440.482.293	(319.372.385.810)	(30,87)

Selanjutnya dijelaskan rincian target dan realisasi PNBP per Eselon I sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel B.3...

Tabel B.3
Target dan Realisasi PNBPN Per Eselon I
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	Target PNBPN	Realisasi PNBPN	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	4.935.775.000	28.547.106.969	578,37
2	02302	Inspektorat Jenderal	48.000.000	667.783.008	1.391,21
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	3.587.847.000	617.226.151.315	17.203,25
4	02305	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan	1.291.737.000	12.038.619.097	931,97
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	1.255.284.005	∞
6	02313	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	465.485.000	3.340.819.094	717,71
7	02315	Ditjen Kebudayaan	4.027.683.000	18.028.144.432	447,61
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	9.300.123.000	33.964.188.563	365,20
JUMLAH			23.656.650.000	715.068.096.483	3.022,69

Realisasi
Pendapatan PNBPN
Lainnya
Rp715.068.096.483,-

B.1.1 Pendapatan PNBPN Lainnya

Realisasi pendapatan PNBPN lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp715.068.096.483,- atau mencapai 3.022,69% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp23.656.650.000,-. Rincian Perbandingan Realisasi per jenis PNBPN Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel B.4
Perbandingan Realisasi PNBPN Lainnya
Per Jenis Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	35.141.098.548	24.038.408.663	11.102.689.885	46,19
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	19.815.314.447	6.319.923.832	13.495.390.615	213,54
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	48.923	-	48.923	∞
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	12.140.209.047	11.589.730.142	550.478.905	4,75
4258	Pendapatan Denda	5.673.474.704	4.252.474.261	1.421.000.443	33,42
4259	Pendapatan Lain-Lain	642.297.950.814	988.239.945.395	(345.941.994.581)	(35,01)
Jumlah		715.068.096.483	1.034.440.482.293	(319.372.385.810)	(30,87)

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan pendapatan sebesar (Rp319.372.385.810),- atau (30,87%) yang sebagian besar adalah pendapatan lain-lain yaitu pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP lainnya per jenis pendapatan sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel B.5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya
Per Jenis Pendapatan Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	10.097.029.000	35.141.098.548	348,03
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	13.559.621.000	19.815.314.447	146,13
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	-	48.923	∞
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	12.140.209.047	∞
4258	Pendapatan Denda	-	5.673.474.704	∞
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	642.297.950.814	∞
JUMLAH		23.656.650.000	715.068.096.483	3.022,69

Realisasi PNBP lainnya per jenis pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp35.141.098.548,- antara lain berupa sewa pemanfaatan BMN dan penjualan atas penghapusan BMN, dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:

Tabel B.6
Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN,
dan Iuran Badan Usaha Per Eselon - 1

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	6.407.112.406
2	02302	Inspektorat Jenderal	337.010.999
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	13.927.311.630
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	3.306.411.394
5	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	208.239.781
6	02313	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	447.564.717
7	02315	Ditjen Kebudayaan	2.429.506.928
8	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	8.077.940.693
JUMLAH			35.141.098.548

- b. Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp19.815.314.447,- antara lain berupa pendapatan dari pendidikan/pelatihan, penerimaan karcis tanda masuk museum dan pendapatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan rincian per Eselon I sebagai berikut :

Tabel B.7
Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset,
dan Teknologi Per Eselon - 1

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	4.581.723.000
2	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	3.242.260
3	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	2.018.059.840
4	02315	Ditjen Kebudayaan	5.551.994.097
5	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	7.660.295.250
JUMLAH			19.815.314.447

- c. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp48.923,- terdapat pada Eselon I Setjen yaitu satker Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (190024).

Tabel B.8
Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya per Eselon-1

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	48.923
JUMLAH			48.923

- d. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp12.140.209.047,- berupa setoran atas jasa giro rekening pemerintah yang dimiliki oleh satker dan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara dengan rincian per Eselon I per satker per tahun, sebagai berikut :

Tabel B.9
Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan,
dan Pengelolaan Keuangan Per Eselon - 1

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	23.535.954
2	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	6.120.553.019
3	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	620.470.276
4	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan Bahasa	588.308.784
5	02313	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.080.000
6	02315	Ditjen Kebudayaan	19.715.500
7	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	4.762.545.514
JUMLAH			12.140.209.047

- e. Pendapatan Denda sebesar Rp5.673.474.704,- berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:

Tabel B.10
Realisasi Pendapatan Denda Per Eselon - 1

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	1.146.588.933
2	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	3.045.768.881
3	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	471.132.594
4	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.242.690
5	02313	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	2.215.481
6	02315	Ditjen Kebudayaan	339.883.237
7	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	662.642.888
JUMLAH			5.673.474.704

- f. Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp642.297.950.814,- berupa pengembalian kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, tunjangan umum serta uang makan pegawai, pengembalian retur PIP, pengembalian atas tunjangan profesi dan khusus serta insentif guru non PNS, pengembalian dana sertifikasi, pengembalian dana atas bantuan pemerintah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Program Keahlian Ganda, dan lain-lain dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:

Tabel B.11
Realisasi Pendapatan Lain-lain Per Eselon - 1

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	16.388.097.753
2	02302	Inspektorat Jenderal	330.772.009
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	594.129.275.525
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	7.640.604.833
5	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	453.492.750
6	02313	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	867.899.056
7	02315	Ditjen Kebudayaan	9.687.044.670
8	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	12.800.764.218
JUMLAH			642.297.950.814

Realisasi Belanja
Rp36.494.689.999.332,-

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.494.689.999.332,- atau sebesar 97,60% dari anggarannya sebesar Rp37.393.540.578.000,-.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2019 menurut program tersaji pada Tabel berikut:

Tabel B.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Menurut Program Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
01	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud	1.923.522.724.000	1.862.491.778.527	2.362.146.552	1.860.129.631.975	96,70
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	188.524.713.000	184.479.090.251	3.810.288.888	180.668.801.363	95,83
04	Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.188.578.297.000	1.123.893.858.650	27.482.220.755	1.096.411.637.895	92,25
06	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	19.076.108.558.000	18.854.940.887.552	49.310.921.423	18.805.629.966.129	98,58
09	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.866.042.540.000	1.809.507.885.548	24.099.805.039	1.785.408.080.509	95,68
10	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra serta Perbukuan	581.986.879.000	538.482.337.466	3.422.565.254	535.059.772.212	91,94
12	Program Pelestarian Budaya	1.795.283.807.000	1.670.769.019.341	8.318.111.020	1.662.450.908.321	92,60
13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	10.773.493.060.000	10.638.216.772.173	69.285.571.245	10.568.931.200.928	98,10
JUMLAH		37.393.540.578.000	36.682.781.629.508	188.091.630.176	36.494.689.999.332	97,60

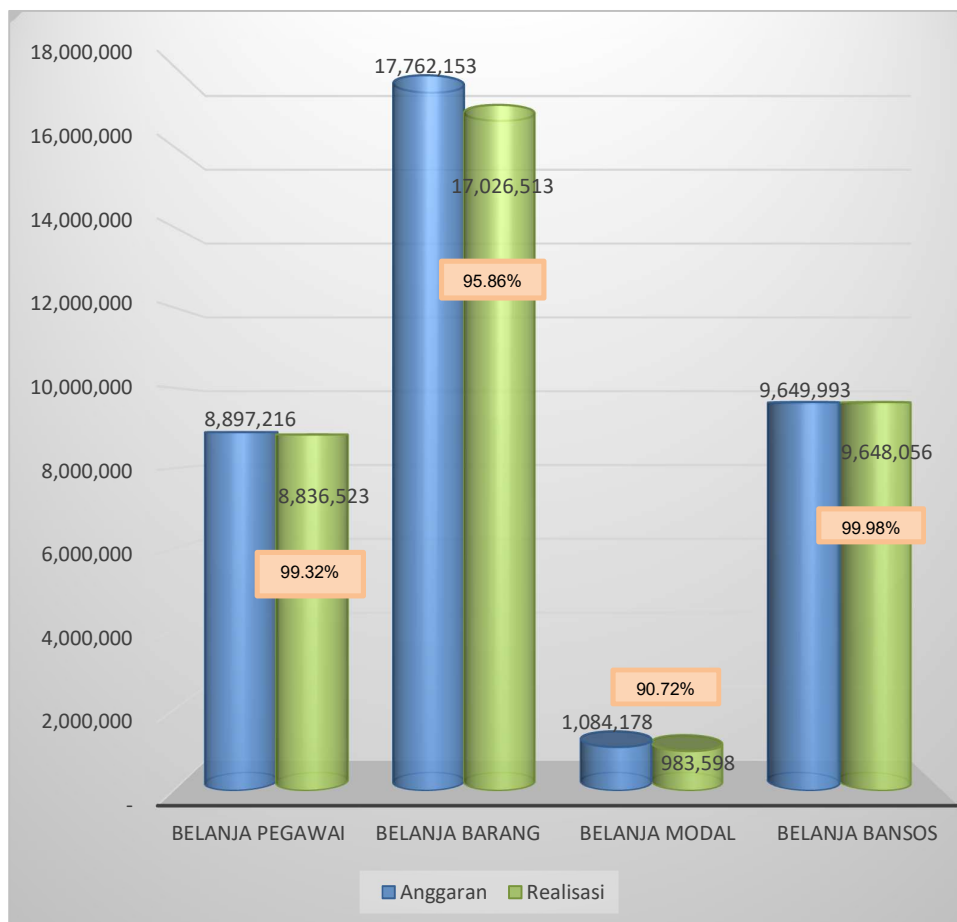
Rincian anggaran dan realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel B.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Anggaran	Realisasi Belanja	%	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	8.897.216.459.000	8.836.523.305.435	99,32	8.542.604.560.000	8.345.622.015.736	97,69
52	Belanja Barang	17.762.153.456.000	17.026.512.844.031	95,86	20.762.831.390.000	20.020.060.946.049	96,42
53	Belanja Modal	1.084.177.889.000	983.598.242.341	90,72	1.109.863.028.000	1.015.169.213.941	91,47
57	Belanja Bansos	9.649.992.774.000	9.648.055.607.525	99,98	10.078.137.694.000	10.051.583.455.170	99,74
	Jumlah	37.393.540.578.000	36.494.689.999.332	97,60	40.493.436.672.000	39.432.435.630.896	97,38

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik B.2 berikut ini.



Grafik B.2
Komposisi anggaran dan realisasi belanja (dalam jutaan rupiah)
Periode 31 Desember 2019

Realisasi belanja per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp36.494.689.999.332,- atau 97,60% dari pagu anggaran sebesar Rp37.393.540.578.000,-, sedangkan realisasi per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp39.432.435.630.896,- atau 97,38% dari pagu anggaran sebesar Rp40.493.436.672.000,-. Dibandingkan periode sebelumnya terjadi kenaikan prosentase realisasi belanja sebesar 0,22%, namun dari sisi jumlah realisasi belanja terjadi penurunan sebesar (Rp2.937.745.631.564,-) atau (7,45%). Penurunan realisasi ini

dikarenakan penurunan pagu anggaran tahun 2019. Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel berikut:

Tabel B.14
Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/(Turun)	
		31-Des-19	31-Des-18	Jumlah (Rp.)	%
51	Belanja Pegawai	8.836.523.305.435	8.345.622.015.736	490.901.289.699	5,88
52	Belanja Barang	17.026.512.844.031	20.020.060.946.049	(2.993.548.102.018)	(14,95)
53	Belanja Modal	983.598.242.341	1.015.169.213.941	(31.570.971.600)	(3,11)
57	Belanja Bantuan Sosial	9.648.055.607.525	10.051.583.455.170	(403.527.847.645)	(4,01)
TOTAL		36.494.689.999.332	39.432.435.630.896	(2.937.745.631.564)	(7,45)

Perbandingan pagu dan realisasi belanja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel B.15
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
		Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
51	Belanja Pegawai	8.897.216.459.000	8.836.523.305.435	99,32	8.542.604.560.000	8.345.622.015.736	97,69
52	Belanja Barang	17.762.153.456.000	17.026.512.844.031	95,86	20.762.831.390.000	20.020.060.946.049	96,42
53	Belanja Modal	1.084.177.889.000	983.598.242.341	90,72	1.109.863.028.000	1.015.169.213.941	91,47
57	Belanja Bantuan Sosial	9.649.992.774.000	9.648.055.607.525	99,98	10.078.137.694.000	10.051.583.455.170	99,74
TOTAL		37.393.540.578.000	36.494.689.999.332	97,60	40.493.436.672.000	39.432.435.630.896	97,38

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan jenis kewenangan adalah sebagai berikut:

Tabel B.16
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja
Per Jenis Kewenangan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
KP	Kantor Pusat	31.535.327.007.000	31.039.552.244.208	98,43
KD	Kantor Daerah	5.594.071.459.000	5.198.002.225.192	92,92
DK	Dekonsentrasi	264.142.112.000	257.135.529.932	97,35
TOTAL		37.393.540.578.000	36.494.689.999.332	97,60

Selanjutnya disajikan pagu dan realisasi belanja 31 Desember 2019 per Eselon I sebagai berikut :

Tabel B.17
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON-1	PAGU	REALISASI	%
1	Sekretariat Jenderal	1.923.522.724.000	1.860.149.471.975	96,71
2	Inspektorat Jenderal	188.524.713.000	180.668.801.363	95,83
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	19.076.108.558.000	18.805.610.126.129	98,58
4	Direktorat Jenderal PAUDNI dan Dikmas	1.866.042.540.000	1.785.408.080.509	95,68
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.188.578.297.000	1.096.411.637.895	92,25
6	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	581.986.879.000	535.059.772.212	91,94
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	1.795.283.807.000	1.662.450.908.321	92,60
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	10.773.493.060.000	10.568.931.200.928	98,10
JUMLAH		37.393.540.578.000	36.494.689.999.332	97,60

Sedangkan pagu dan realisasi belanja 31 Desember 2019 berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut:

Tabel B.18
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja
Berdasarkan Sumber Dana

(dalam rupiah)

NO	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
1	Rupiah Murni	37.370.641.792.000	36.475.498.873.562	97,60
2	PNBP	15.086.456.000	11.378.795.770	75,42
3	Hibah Langsung Luar Negeri	7.812.330.000	7.812.330.000	100,00
JUMLAH		37.393.540.578.000	36.494.689.999.332	97,60

Selanjutnya dijelaskan per jenis belanja sebagai berikut:

Belanja Pegawai
Rp8.836.523.305.435,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.836.523.305.435,- atau 99,32% dari pagu Rp8.897.216.459.000,- dan Rp8.345.622.015.736,- atau 97,69% dari pagu Rp8.542.604.560.000,-. Terjadi kenaikan realisasi belanja pegawai dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp490.901.289.699,- atau 5,88%.

Tabel B.19
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.065.888.473.764	7.712.099.629.219	(6.646.211.155.455)	(86,18)
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	6.701.145.246.776	10.126.205.916	6.691.019.040.860	66.076,27
5121	Belanja Honorarium	679.618.340	541.800.000	137.818.340	25,44
5122	Belanja Lembur	6.132.049.050	8.128.870.350	(1.996.821.300)	(24,56)
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.063.923.531.610	616.338.675.657	447.584.855.953	72,62
	Realisasi Belanja Bruto	8.837.768.919.540	8.347.235.181.142	490.533.738.398	5,88
	Pengembalian Belanja Pegawai	(1.245.614.105)	(1.613.165.406)	367.551.301	(22,78)
	Realisasi Belanja Neto	8.836.523.305.435	8.345.622.015.736	490.901.289.699	5,88

Selanjutnya rincian perbandingan pagu dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel B.20
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.105.646.747.000	1.065.888.473.764	96,40	7.823.750.515.000	7.712.099.629.219	98,57
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	6.702.602.031.000	6.701.145.246.776	99,98	10.158.602.000	10.126.205.916	99,68
5121	Belanja Honorarium	681.200.000	679.618.340	99,77	560.000.000	541.800.000	96,75
5122	Belanja Lembur	8.711.110.000	6.132.049.050	70,39	17.842.257.000	8.128.870.350	45,56
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.079.575.371.000	1.063.923.531.610	98,55	690.293.186.000	616.338.675.657	89,29
	Pengembalian Belanja Pegawai	-	(1.245.614.105)	∞	-	(1.613.165.406)	∞
	Jumlah	8.897.216.459.000	8.836.523.305.435	99,32	8.542.604.560.000	8.345.622.015.736	97,69

Rincian pagu dan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 per Eselon I dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel B.21
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

No	Kode	Eselon I	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	02301	Sekretariat Jenderal	214.146.614.000	212.298.006.943	99,14	1.848.607.057
2	02302	Inspektorat Jenderal	69.992.114.000	69.933.749.424	99,92	58.364.576
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	557.346.146.000	526.925.004.752	94,54	30.421.141.248
4	02305	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini & Dikmas	255.032.996.000	248.328.393.221	97,37	6.704.602.779
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	118.918.849.000	116.750.035.037	98,18	2.168.813.963
6	02313	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	189.390.109.000	181.345.901.194	95,75	8.044.207.806
7	02315	Ditjen Kebudayaan	395.539.899.000	388.858.738.362	98,31	6.681.160.638
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	7.096.849.732.000	7.092.083.476.502	99,93	4.766.255.498
		JUMLAH	8.897.216.459.000	8.836.523.305.435	99,32	60.693.153.565

Belanja Barang
Rp17.026.512.844.031,-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.026.512.844.031,- atau 95,86% dari pagu sebesar Rp17.762.153.456.000,- dan Rp20.020.060.946.049,- atau 96,42% dari pagu sebesar Rp20.762.831.390.000,-. Terjadi penurunan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar (Rp2.993.548.102.018,-) atau (14,95%), yang antara lain disebabkan adanya penurunan alokasi anggaran pada tahun 2019. Perbandingan Rincian Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel B.22
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik/ (Turun)	%
5211	Belanja Barang Operasional	501.812.224.039	469.061.179.487	32.751.044.552	6,98
5212	Belanja Barang Non Operasional	2.620.571.091.444	3.163.504.967.909	(542.933.876.465)	(17,16)
5218	Belanja Barang Persediaan	97.336.327.122	87.097.644.919	10.238.682.203	11,76
5221	Belanja Jasa	1.383.071.382.680	1.363.401.165.373	19.670.217.307	1,44
5231	Belanja Pemeliharaan	349.442.208.385	352.828.548.847	(3.386.340.462)	(0,96)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.882.072.632.076	4.106.925.867.544	(224.853.235.468)	(5,47)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	194.123.442.754	125.362.770.134	68.760.672.620	54,85
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	4.095.756.234.767	7.557.720.536.001	(3.461.964.301.234)	(45,81)
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	4.088.826.799.819	2.987.709.210.853	1.101.117.588.966	36,85
Realisasi Belanja Bruto		17.213.012.343.086	20.213.611.891.067	(3.000.599.547.981)	(14,84)
Pengembalian Belanja Barang		(186.499.499.055)	(193.550.945.018)	7.051.445.963	(3,64)
Realisasi Belanja Neto		17.026.512.844.031	20.020.060.946.049	(2.993.548.102.018)	(14,95)

Adapun perbandingan realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dalam tabel berikut ini:

Tabel B.23 ...

Tabel B.23
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5211	Belanja Barang Operasional	524.628.627.000	501.812.224.039	95,65	496.410.869.000	469.061.179.487	94,49
5212	Belanja Barang Non Operasional	2.758.351.222.000	2.620.571.091.444	95,00	3.302.197.865.000	3.163.504.967.909	95,80
5218	Belanja Barang Persediaan	104.045.418.000	97.336.327.122	93,55	97.301.913.000	87.097.644.919	89,51
5221	Belanja Jasa	1.458.310.379.000	1.383.071.382.680	94,84	1.472.054.653.000	1.363.401.165.373	92,62
5231	Belanja Pemeliharaan	368.711.126.000	349.442.208.385	94,77	373.307.780.000	352.828.548.847	94,51
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.023.120.178.000	3.882.072.632.076	96,49	4.271.176.704.000	4.106.925.867.544	96,15
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	202.325.882.000	194.123.442.754	95,95	129.781.196.000	125.362.770.134	96,60
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	4.146.906.936.000	4.095.756.234.767	98,77	7.618.883.657.000	7.557.720.536.001	99,20
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	4.175.753.688.000	4.088.826.799.819	97,92	3.001.716.753.000	2.987.709.210.853	99,53
Pengembalian Belanja Barang		-	(186.499.499.055)	∞	-	(193.550.945.018)	∞
Jumlah		17.762.153.456.000	17.026.512.844.031	95,86	20.762.831.390.000	20.020.060.946.049	96,42

Selanjutnya disajikan pagu dan realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 per Eselon I pada Tabel di bawah ini:

Tabel B.24
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

No	Kode	Eselon I	Pagu	Realisasi	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	1.595.472.956.000	1.549.410.595.362	97,11
2	02302	Inspektorat Jenderal	112.027.724.000	106.447.853.877	95,02
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	8.506.207.792.000	8.283.827.926.349	97,39
4	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	1.470.314.888.000	1.413.091.757.815	96,11
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.036.836.737.000	948.660.093.609	91,50
6	02313	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	356.449.403.000	320.401.759.487	89,89
7	02315	Ditjen Kebudayaan	1.179.935.728.000	1.095.566.995.440	92,85
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	3.504.908.228.000	3.309.105.862.092	94,41
JUMLAH			17.762.153.456.000	17.026.512.844.031	95,86

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda per Eselon I sebagai berikut:

Tabel B.25
Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda Akun 52123x dan 526xxx Per Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	Belanja Bantuan Pemerintah 52123x dan 526xxx (Neto)					
	Belanja Bantuan Pemerintah 52123x			Belanja Bantuan Pemerintah 52123x		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Sekretariat Jenderal	214.946.820.000	214.380.980.611	99,74	219.758.876.000	218.788.470.422	99,56
Direktorat Jenderal Dikdasmen	11.061.000.000	9.236.000.000	83,50	5.723.298.305.000	5.684.414.268.376	99,32
Direktorat Jenderal PAUD Dikmas	88.277.000.000	87.619.076.968	99,25	757.189.185.000	743.061.898.966	98,13
Badan Penelitian dan Pengembangan	522.996.030.000	496.162.260.406	94,87	-	-	0,00
Badan Pemb. dan Pengemb. Bahasa	896.500.000	895.721.000	99,91	29.689.016.000	19.400.577.286	65,35
Direktorat Jenderal Kebudayaan	288.000.000	264.000.000	91,67	270.362.475.000	257.095.030.554	95,09
Direktorat Jenderal Guru & Tendik	8.427.590.000	8.398.246.000	99,65	1.322.362.767.000	1.214.156.228.382	91,82
Total	846.892.940.000	816.956.284.985	96,47	8.322.660.624.000	8.136.916.473.986	97,77
TOTAL REALISASI BELANJA BANTUAN PEMERINTAH 52123X DAN 526XXX (NETO)					8.953.872.758.971	

Belanja Modal
Rp983.598.242.341,-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp983.598.242.341,- atau 90,72% dari pagu sebesar Rp1.084.177.889.000,- dan Rp1.015.169.213.941,- atau 91,47% dari pagu sebesar Rp1.109.863.028.000,-. Terjadi penurunan realisasi Belanja Modal dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar (Rp31.570.971.600,-) atau (3,11%) yang disebabkan antara lain alokasi anggaran yang turun dibandingkan tahun sebelumnya dan sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir masih terdapat belanja modal yang diblokir. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel B.26 ...

Tabel B.26
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
531	Belanja Modal Tanah	24.294.044.940	26.994.928.607	(2.700.883.667)	(10,01)
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.802.411.361	397.389.311.138	18.413.100.223	4,63
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	508.355.512.590	556.170.694.843	(47.815.182.253)	(8,60)
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.505.154.215	10.994.386.674	(489.232.459)	(4,45)
536	Belanja Modal Lainnya	24.936.386.251	23.828.824.441	1.107.561.810	4,65
	Realisasi Belanja Bruto	983.893.509.357	1.015.378.145.703	(31.484.636.346)	(3,10)
	Pengembalian Belanja Modal	(295.267.016)	(208.931.762)	(86.335.254)	41,32
	Realisasi Belanja Neto	983.598.242.341	1.015.169.213.941	(31.570.971.600)	(3,11)

Selanjutnya di bawah ini disajikan perbandingan pagu dan realisasi per jenis Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dalam Tabel berikut ini:

Tabel B.27
Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Modal
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
531	Belanja Modal Tanah	31.772.937.000	24.294.044.940	76,46	29.229.257.000	26.994.928.607	92,36
532	Belanja Modal Peralatan	451.999.929.000	415.802.411.361	91,99	421.609.717.000	397.389.311.138	94,26
533	Belanja Modal Gedung	561.658.981.000	508.355.512.590	90,51	618.686.407.000	556.170.694.843	89,90
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.933.901.000	10.505.154.215	96,08	12.000.626.000	10.994.386.674	91,62
536	Belanja Modal Lainnya	27.812.141.000	24.936.386.251	89,66	28.337.021.000	23.828.824.441	84,09
	Pengembalian Belanja Modal	-	(295.267.016)	∞	-	(208.931.762)	∞
	Jumlah	1.084.177.889.000	983.598.242.341	90,72	1.109.863.028.000	1.015.169.213.941	91,47

Adapun perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 per Eselon I disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel B.28
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

No	Kode	Eselon I	Pagu	Realisasi	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	113.903.154.000	98.440.869.670	86,43
2	02302	Inspektorat Jenderal	6.504.875.000	4.287.198.062	65,91
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	365.131.846.000	349.371.587.503	95,68
4	02305	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	139.094.656.000	122.387.929.473	87,99
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	32.822.711.000	31.001.509.249	94,45
6	02313	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	36.147.367.000	33.312.111.531	92,16
7	02315	Ditjen Kebudayaan	219.808.180.000	178.025.174.519	80,99
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	170.765.100.000	166.771.862.334	97,66
		JUMLAH	1.084.177.889.000	983.598.242.341	90,72

Belanja Modal
Tanah
Rp24.293.194.940,-

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp24.293.194.940,- atau 76,46% dari pagu sebesar Rp31.772.937.000,- dan Rp26.989.718.607,- atau 92,34% dari pagu sebesar Rp29.229.257.000,-. Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar (Rp2.696.523.667,-) atau (9,99%) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel B.29
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun) (Rp)	%
531111	Belanja Modal Tanah	9.636.446.700	7.544.798.050	2.091.648.650	27,72
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	13.902.329.500	18.319.675.250	(4.417.345.750)	(24,11)
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	6.500.000	11.530.000	(5.030.000)	(43,63)
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	129.434.940	134.680.720	(5.245.780)	(3,89)
531115	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	328.545.000	875.877.787	(547.332.787)	(62,49)
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	71.566.000	11.200.000	60.366.000	538,98
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	219.222.800	97.166.800	122.056.000	125,61
	Realisasi Belanja Bruto	24.294.044.940	26.994.928.607	(2.700.883.667)	(10,01)
	Pengembalian Belanja	(850.000)	(5.210.000)	4.360.000	(83,69)
	Realisasi Belanja Neto	24.293.194.940	26.989.718.607	(2.696.523.667)	(9,99)

Selanjutnya di bawah ini disajikan perbandingan pagu dan realisasi per jenis Belanja Modal Tanah 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dalam tabel berikut ini:

Tabel B.30
Perbandingan Pagu dan Realisasi
Per Jenis Belanja Modal Tanah
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	13.076.353.000	9.636.446.700	73,69	7.713.531.000	7.544.798.050	97,81
Belanja Modal Pembebasan Tanah	17.817.586.000	13.902.329.500	78,03	19.809.544.000	18.319.675.250	92,48
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	13.400.000	6.500.000	48,51	12.010.000	11.530.000	96,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	233.168.000	129.434.940	55,51	538.420.000	134.680.720	25,01
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	330.000.000	328.545.000	99,56	984.310.000	875.877.787	88,98
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	74.000.000	71.566.000	96,71	20.000.000	11.200.000	56,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	228.430.000	219.222.800	95,97	151.442.000	97.166.800	64,16
Jumlah Belanja Bruto	31.772.937.000	24.294.044.940	76,46	29.229.257.000	26.994.928.607	92,36
Pengembalian Belanja	-	(850.000)	∞	0	(5.210.000)	∞
Jumlah Belanja Neto	31.772.937.000	24.293.194.940	76,46	29.229.257.000	26.989.718.607	92,34

Pagu dan realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 per Eselon I disajikan sebagai berikut :

Tabel B.31
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Per 31 Desember 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	%
1	Ditjen Dikdasmen	90.000.000	43.400.000	48,22
2	Ditjen Paud dan Dikmas	35.000.000	6.300.000	18,00
3	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	30.000.000	30.000.000	100,00
4	Ditjen Kebudayaan	31.617.937.000	24.213.494.940	76,58
Jumlah		31.772.937.000	24.293.194.940	76,46

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp24.293.194.940,-, tidak sama dengan mutasi tambah aset tanah yang berasal dari pembelian yang disebabkan realisasi belanja modal tanah tidak seluruhnya berpengaruh langsung terhadap penambahan aset tetap tanah antara lain adanya belanja modal tanah yang belum menjadi aset berupa biaya kepanitian pengadaan tanah, biaya survey, jasa penilai yang tanahnya dalam proses pembelian.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp415.784.026.251,-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp415.784.026.251,- atau 91,99% dari pagu sebesar Rp451.999.929.000,- dan Rp397.231.213.735,- atau 94,22% dari pagu sebesar Rp421.609.717.000,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp18.413.100.223,- atau 4,67% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel B.32
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Naik/(Turun)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.392.251.541	389.982.225.487	21.410.026.054	5,49
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	515.798.950	635.572.500	(119.773.550)	(18,84)
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	375.016.000	373.250.000	1.766.000	0,47
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	0	499.380.000	(499.380.000)	(100,00)
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	726.013.250	347.139.691	378.873.559	109,14
532117	Belanja Pemasangan Peralatan dan Mesin	132.000.000	94.600.000	37.400.000	39,53
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	17.280.000	241.065.260	(223.785.260)	(92,83)
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2.644.051.620	5.216.078.200	(2.572.026.580)	(49,31)
Jumlah Belanja Bruto		415.802.411.361	397.389.311.138	18.413.100.223	4,63
Pengembalian Belanja		(18.385.110)	(158.097.403)	(139.712.293)	(88,37)
Jumlah Belanja Neto		415.784.026.251	397.231.213.735	18.413.100.223	4,67

Selanjutnya di bawah ini disajikan perbandingan pagu dan realisasi per jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dalam tabel berikut ini:

Tabel B.33
Perbandingan Pagu dan Realisasi
Per Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	446.196.576.000	411.392.251.541	92,20	413.967.049.000	389.982.225.487	94,21
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	515.956.000	515.798.950	99,97	651.482.000	635.572.500	97,56
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	618.574.000	375.016.000	60,63	466.367.000	373.250.000	80,03
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	923.815.000	726.013.250	78,59	405.662.000	347.139.691	85,57
Belanja Pemasangan Peralatan dan Mesin	132.000.000	132.000.000	100,00	129.600.000	94.600.000	72,99
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	77.255.000	17.280.000	22,37	250.478.000	241.065.260	96,24
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	3.535.753.000	2.644.051.620	74,78	5.239.200.000	5.216.078.200	99,56
Jumlah Belanja Bruto	451.999.929.000	415.802.411.361	91,99	421.109.838.000	396.889.931.138	94,25
Pengembalian Belanja	0	(18.385.110)	∞	0	(158.097.403)	∞
Jumlah Belanja Neto	451.999.929.000	415.784.026.251	91,99	421.109.838.000	396.731.833.735	94,21

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp415.784.026.251,-, tidak sama dengan mutasi tambah aset peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian yang disebabkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tidak seluruhnya berpengaruh langsung terhadap penambahan aset tetap peralatan dan mesin antara lain adanya:

- Pembelian aset tetap peralatan dan mesin ekstrakomptabel menggunakan akun 532;
- Pembelian/pengadaan menggunakan akun 52;
- Paket/kontrak pengadaan gedung dan bangunan yang didalamnya termasuk pengadaan peralatan dan mesin.

Pagu dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 per Eselon I disajikan sebagai berikut :

Tabel B.34
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	84.093.169.000	73.125.350.906	86,96
2	Inspektorat Jenderal	3.668.525.000	3.031.460.700	82,63
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	110.949.143.000	106.578.715.763	96,06
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	56.658.262.000	46.564.831.958	82,19
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	14.577.795.000	13.774.049.130	94,49
6	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	26.794.929.000	24.602.825.568	91,82
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	59.062.116.000	54.923.615.102	92,99
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	96.195.990.000	93.183.177.124	96,87
Jumlah		451.999.929.000	415.784.026.251	91,99

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp508.084.205.457,-

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp508.084.205.457,- atau 90,46% dari pagu sebesar Rp561.658.981.000,- dan Rp556.125.200.484,- atau 89,89% dari pagu sebesar Rp618.686.407.000,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar (Rp48.040.995.027,-) atau sebesar (8,64%) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel B.35
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Naik/(Turun)	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.150.953.400	415.509.358.710	(65.358.405.310)	(15,73)
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	71.765.600	147.993.900	(76.228.300)	(51,51)
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	2.404.800.500	900.013.300	1.504.787.200	167,20
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	15.703.903.964	10.534.054.278	5.169.849.686	49,08
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama	9.308.400	19.800.000	(10.491.600)	(52,99)
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	461.046.378	453.071.361	7.975.017	1,76
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	139.553.734.348	128.606.403.294	10.947.331.054	8,51
Jumlah Belanja Bruto		508.355.512.590	556.170.694.843	(47.815.182.253)	(8,60)
Pengembalian Belanja		(271.307.133)	(45.494.359)	(225.812.774)	496,35
Jumlah Belanja Neto		508.084.205.457	556.125.200.484	(48.040.995.027)	(8,64)

Selanjutnya di bawah ini disajikan perbandingan pagu dan realisasi per jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dalam Tabel berikut ini:

Tabel B.36
Perbandingan Pagu dan Realisasi
Per Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.702.881.000	350.150.953.400	89,16	469.672.087.000	415.509.358.710	88,47
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	91.420.000	71.765.600	78,50	148.492.000	147.993.900	99,66
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	3.930.108.000	2.404.800.500	61,19	1.972.739.000	900.013.300	45,62
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	17.843.145.000	15.703.903.964	88,01	12.802.587.000	10.534.054.278	82,28
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama	9.378.000	9.308.400	0,00	20.000.000	19.800.000	99,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	721.208.000	461.046.378	63,93	719.030.000	453.071.361	63,01
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	146.360.841.000	139.553.734.348	95,35	133.351.472.000	128.606.403.294	96,44
Jumlah Belanja Bruto	561.658.981.000	508.355.512.590	90,51	618.686.407.000	556.170.694.843	89,90
Pengembalian Belanja	0	(271.307.133)	∞	0	(45.494.359)	∞
Jumlah Belanja Neto	561.658.981.000	508.084.205.457	90,46	618.686.407.000	556.125.200.484	89,89

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp508.084.205.457,-, tidak sama dengan mutasi tambah aset gedung dan bangunan yang berasal dari pembelian yang disebabkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak seluruhnya berpengaruh langsung terhadap penambahan aset tetap gedung dan bangunan antara lain adanya:

- Pembelian/pengadaan menggunakan akun 52;
- Kesalahan dalam pembebanan belanja.

Pagu dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 per Eselon I disajikan sebagai berikut :

Tabel B.37
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	22.302.776.000	19.186.325.479	86,03
2	Inspektorat Jenderal	2.482.000.000	1.021.877.362	41,17
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	242.676.863.000	231.954.352.073	95,58
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	79.716.385.000	73.427.029.015	92,11
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	14.280.931.000	13.709.995.313	96,00
6	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	7.907.047.000	7.315.246.154	92,52
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	118.115.477.000	88.269.865.351	74,73
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	74.177.502.000	73.199.514.710	98,68
Jumlah		561.658.981.000	508.084.205.457	90,46

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp10.505.154.215,-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.505.154.215,- atau 96,08% dari pagu sebesar Rp10.933.901.000,- dan Rp10.994.386.674,- atau 91,62% dari pagu sebesar Rp12.000.626.000,-. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar (Rp489.232.459,-) atau (4,45%) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel B.38
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Naik / (Turun)	%
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.463.363.309	6.455.995.161	(1.992.631.852)	(30,86)
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	2.485.300	483.700	2.001.600	413,81
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan	9.030.000	6.960.000	2.070.000	29,74
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	384.811.700	246.097.500	138.714.200	56,37
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	10.300.000	7.680.000	2.620.000	34,11
534121	Belanja Modal Irigasi	1.693.677.000	-	1.693.677.000	∞
534125	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	46.365.000	-	46.365.000	∞
534131	Belanja Modal Jaringan	2.554.466.906	2.880.389.813	(325.922.907)	(11,32)
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	4.200.000	(4.200.000)	(100,00)
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	-	143.306.000	(143.306.000)	(100,00)
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	728.942.000	1.116.521.500	(387.579.500)	(34,71)
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	-	-	0	0,00
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	611.713.000	132.753.000	478.960.000	360,79
	Jumlah Belanja Bruto	10.505.154.215	10.994.386.674	(489.232.459)	(4,45)
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Neto	10.505.154.215	10.994.386.674	(489.232.459)	(4,45)

Selanjutnya di bawah ini disajikan perbandingan pagu dan realisasi per jenis Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dalam Tabel berikut ini:

Tabel B.39 ...

Tabel B.39
Perbandingan Pagu dan Realisasi
Per Jenis Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	31-Des-19			31-Des-18		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.660.527.000	4.463.363.309	95,77	7.024.294.000	6.455.995.161	91,91
Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	2.500.000	2.485.300	99,41	501.000	483.700	96,55
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan	11.070.000	9.030.000	81,57	6.960.000	6.960.000	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	470.133.000	384.811.700	81,85	256.400.000	246.097.500	95,98
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	10.500.000	10.300.000	98,10	14.340.000	7.680.000	53,56
Belanja Modal Irigasi	1.695.202.000	1.693.677.000	99,91	-	-	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	47.000.000	46.365.000	98,65	-	-	0,00
Belanja Modal Jaringan	2.675.776.000	2.554.466.906	95,47	3.140.400.000	2.880.389.813	91,72
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	0,00	4.200.000	4.200.000	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	-	-	0,00	147.980.000	143.306.000	96,84
Belanja Modal Perjalanan Jaringan	-	-	0,00	-	-	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	746.118.000	728.942.000	97,70	1.271.191.000	1.116.521.500	87,83
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	615.075.000	611.713.000	99,45	134.360.000	132.753.000	98,80
Jumlah Belanja Bruto	10.933.901.000	10.505.154.215	96,08	12.000.626.000	10.994.386.674	91,62
Pengembalian Belanja	0	0	0,00	0	0	0,00
Jumlah Belanja Neto	10.933.901.000	10.505.154.215	96,08	12.000.626.000	10.994.386.674	91,62

Realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.505.154.215,- tidak sama dengan mutasi tambah aset jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari pembelian yang disebabkan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak seluruhnya berpengaruh langsung terhadap penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan antara lain adanya:

- Pembelian/pengadaan menggunakan akun 52;
- Kesalahan dalam pembebanan belanja.

Pagu dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2019 per Eselon I disajikan sebagai berikut :

Tabel B.40
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	265.268.000	264.742.300	99,80
2	Direktorat Jenderal Dikdasmen	6.825.678.000	6.530.428.995	95,67
3	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	495.075.000	492.650.000	99,51
4	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	718.043.000	700.524.000	97,56
5	Direktorat Jenderal Kebudayaan	2.359.837.000	2.249.245.920	95,31
6	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	270.000.000	267.563.000	99,10
Jumlah		10.933.901.000	10.505.154.215	96,08

Belanja Modal
Lainnya
Rp24.931.661.478,-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp24.931.661.478,- atau 89,64% dari pagu sebesar Rp27.812.141.000,- dan Rp23.828.694.441,- atau 84,09% dari pagu sebesar Rp28.337.021.000,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp1.102.967.037,- atau 4,63% dibandingkan periode per 31 Desember 2018.

Tabel B.41
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
53611	Belanja Modal Lainnya	21.961.712.274	18.697.460.839	3.264.251.435	17,46
53612	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	2.974.673.977	5.131.363.602	(2.156.689.625)	(42,03)
	Realisasi Belanja Bruto	24.936.386.251	23.828.824.441	1.107.561.810	4,65
	Pengembalian Belanja	(4.724.773)	(130.000)	(4.594.773)	(3.534,44)
	Realisasi Belanja Neto	24.931.661.478	23.828.694.441	1.102.967.037	4,63

Selanjutnya di bawah ini disajikan perbandingan pagu dan realisasi per jenis Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dalam tabel berikut ini:

Tabel B.42
Perbandingan Pagu dan Realisasi
Per Jenis Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Lainnya	24.261.223.000	21.961.712.274	90,52	22.268.261.000	18.697.460.839	83,96
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	3.550.918.000	2.974.673.977	83,77	6.068.760.000	5.131.363.602	84,55
Jumlah Belanja Bruto	27.812.141.000	24.936.386.251	89,66	28.337.021.000	23.828.824.441	84,09
Pengembalian Belanja	0	(4.724.773)	0,00	0	(130.000)	0,00
Jumlah Belanja Neto	27.812.141.000	24.931.661.478	89,64	28.337.021.000	23.828.694.441	84,09

Realisasi belanja Modal Lainnya sebesar Rp24.931.661.478,- tidak sama dengan mutasi tambah aset lainnya yang berasal dari pembelian yang disebabkan realisasi belanja Modal Lainnya tidak seluruhnya berpengaruh langsung terhadap penambahan aset lainnya antara lain adanya:

- a. Pembelian/pengadaan menggunakan akun 52;
- b. Kesalahan dalam pembebanan belanja.

Pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 per Eselon I disajikan sebagai berikut :

Tabel B.43
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Per Eselon I
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	7.241.941.000	5.864.450.985	80,98
2	Inspektorat Jenderal	354.350.000	233.860.000	66,00
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	4.590.162.000	4.264.690.672	92,91
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	2.189.934.000	1.897.118.500	86,63
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.963.985.000	3.517.464.806	88,74
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	697.348.000	663.515.809	95,15
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	8.652.813.000	8.368.953.206	96,72
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	121.608.000	121.607.500	100,00
Jumlah		27.812.141.000	24.931.661.478	89,64

Belanja Bantuan Sosial
Rp9.648.055.607.525,-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Neto Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.648.055.607.525,- atau 99,98% dari pagu sebesar Rp9.649.992.774.000,- dan Rp10.051.583.455.170,- atau 99,74% dari pagu sebesar Rp10.078.137.694.000,-. Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar (Rp403.527.847.645,-) atau (4,01%) dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel B.44
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Naik/(Turun)	%
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	5.818.875.000	(5.818.875.000)	0,00
5721	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	6.923.383.800.000	6.933.504.675.000	(10.120.875.000)	(0,15)
5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.704.155.500.000	2.784.539.500.000	(80.384.000.000)	(2,89)
5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	970.000.000	418.630.000	551.370.000	131,71
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	19.597.557.525	327.678.201.170	(308.080.643.645)	(94,02)
Jumlah Belanja Bruto		9.648.106.857.525	10.051.959.881.170	(403.853.023.645)	(4,02)
Pengembalian Belanja		(51.250.000)	(376.426.000)	325.176.000	(86,39)
Jumlah Belanja Neto		9.648.055.607.525	10.051.583.455.170	(403.527.847.645)	(4,01)

Adapun rincian perbandingan pagu dan realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel B.45
Rincian Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-19			31-Des-18		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00	5.900.000.000	5.818.875.000	98,63
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	6.923.383.800.000	6.923.383.800.000	100,00	6.933.504.675.000	6.933.504.675.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.704.155.500.000	2.704.155.500.000	100,00	2.784.539.500.000	2.784.539.500.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	970.000.000	970.000.000	100,00	500.000.000	418.630.000	83,73
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	21.483.474.000	19.597.557.525	91,22	353.693.519.000	327.678.201.170	92,64
Jumlah Belanja Bruto	9.649.992.774.000	9.648.106.857.525	99,98	10.078.137.694.000	10.051.959.881.170	99,74
Pengembalian Belanja	0	(51.250.000)	∞	0	(376.426.000)	∞
Jumlah Belanja Neto	9.649.992.774.000	9.648.055.607.525	99,98	10.078.137.694.000	10.051.583.455.170	99,74

Belanja Bantuan Sosial terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I, yaitu Ditjen Dikdasmen, Ditjen PAUD & Dikmas dan Ditjen GTK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.46
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

No	Kode	Eselon I	Pagu	Realisasi	%
1	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	9.647.422.774.000	9.645.485.607.525	99,98
2	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	1.600.000.000	1.600.000.000	100,00
3	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	970.000.000	970.000.000	100,00
JUMLAH			9.649.992.774.000	9.648.055.607.525	99,98

Selanjutnya penjelasan rincian Belanja Bantuan Sosial per Eselon I sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen Dikdasmen adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dengan sasaran 18.398.399 siswa SD, SMP, SMA dan SMK. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Ditjen Dikdasmen sebesar Rp9.645.485.607.525,- atau sebesar 99,98% dari pagu sebesar Rp9.647.422.774.000,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi Belanja Bantuan Sosial per satker per *output* pada Ditjen Dikdasmen sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel B.47
Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per Satker Per Output
Pada Eselon I Ditjen Dikdasmen 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Nomor	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi
1	419514	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas	1.177.453.500.000	1.177.430.369.425
	5627.001	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.174.988.500.000	1.174.988.500.000
	5627.020	Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan	2.465.000.000	2.441.869.425
2	419515	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.535.191.000.000	1.534.534.672.100
	5628.001	Siswa yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.529.167.000.000	1.529.125.500.000
	5628.006	Ruang Belajar yang direhabilitasi	4.410.000.000	4.410.000.000
	5628.010	Ruang Praktik Siswa/Keterampilan yang dibangun	614.000.000	-
	5628.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.000.000.000	999.172.100
3	666011	Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar	4.212.276.300.000	4.212.266.550.000
	2003.001	Siswa yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4.212.276.300.000	4.212.266.550.000
4	666028	Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	11.394.474.000	10.146.516.000
	5626.007	Sekolah yang direnovasi	8.994.474.000	8.728.596.000
	5626.032	Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	2.400.000.000	1.417.920.000
5	666032	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	2.711.107.500.000	2.711.107.500.000
	2000.001	Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	2.711.107.500.000	2.711.107.500.000
Jumlah			9.647.422.774.000	9.645.485.607.525

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagian besar merupakan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu sebesar Rp9.627.488.050.000,- atau 99,99% dari Pagu PIP sebesar Rp9.627.539.300.000,- dengan rincian per satker sebagai berikut :

Tabel B.48
Rincian Pagu dan Realisasi Program Indonesia Pintar (PIP)
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

NO	Nama Satker	Akun	Pagu	Realisasi Neto	%
1	DIREKTORAT PEMBINAAN SD	572111	4.212.276.300.000	4.212.266.550.000	100,00
2	DIREKTORAT PEMBINAAN SMP	572111	2.711.107.500.000	2.711.107.500.000	100,00
3	DIREKTORAT PEMBINAAN SMA	573111	1.174.988.500.000	1.174.988.500.000	100,00
4	DIREKTORAT PEMBINAAN SMK	573111	1.529.167.000.000	1.529.125.500.000	99,99
Jumlah			9.627.539.300.000	9.627.488.050.000	99,99

2. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas

Realisasi belanja bantuan sosial pada Eselon I Ditjen PAUD dan Dikmas sebesar Rp1.600.000.000,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran sebesar Rp1.600.000.000,- yang terdapat pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini berupa bantuan pasca bencana yang diperuntukkan kepada Lembaga PAUD yang terkena dampak bencana alam pada Kabupaten Sumbawa, Halmahera Selatan, Maluku

Tengah, Sigi, Maros, Gowa, Manggarai Barat dan Kota Palu. Bantuan pasca bencana ini dipergunakan untuk membangun, memperbaiki fisik bantuan dan pembelian sarana pembelajaran.

3. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Realisasi belanja bantuan sosial pada Eselon I Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp970.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp970.000.000,- yang terdapat pada Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Belanja Bantuan Sosial ini digunakan untuk pemberian bantuan percepatan penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti: papan tulis, alat tulis, perlengkapan belajar dan pemulihan trauma pasca bencana bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku.

Catatan Penting Lainnya

B.3. Catatan Penting Lainnya

Beberapa informasi yang perlu kami jelaskan yang berkaitan dengan realisasi belanja antara lain :

1. Dalam Tahun 2019 Kemendikbud menerima DIPA Awal sebesar Rp35.993.087.934.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat perubahan/penambahan/revisi DIPA sehingga berdasarkan hasil penggabungan dari seluruh DIPA satker di lingkungan Kemendikbud jumlah pagu per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp37.393.540.578.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.49
Rincian Pagu DIPA Tahun 2019 Per Eselon I

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON-1	PAGU AWAL	PAGU REVISI	Naik / (Turun)
1	Sekretariat Jenderal	1.800.491.734.000	1.923.522.724.000	123.030.990.000
2	Inspektorat Jenderal	188.524.713.000	188.524.713.000	-
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	18.241.917.758.000	19.076.108.558.000	834.190.800.000
4	Direktorat Jenderal PAUDNI dan Dikmas	1.813.256.980.000	1.866.042.540.000	52.785.560.000
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.188.578.297.000	1.188.578.297.000	-
6	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	581.986.879.000	581.986.879.000	-
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	1.795.283.807.000	1.795.283.807.000	-
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	10.383.047.766.000	10.773.493.060.000	390.445.294.000
JUMLAH		35.993.087.934.000	37.393.540.578.000	1.400.452.644.000

Adapun penjelasan atas perubahan/penambahan/revisi DIPA tersebut per eselon-1 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal mendapat penambahan pagu karena merupakan *reward* sebagai K/L terbaik dalam penyerapan anggaran TA 2018 yang dimanfaatkan untuk (i) program beasiswa unggulan, (ii) penambahan server UNBK (iii) penambahan sasaran penerima bantuan pemerintah dan (iv) penambahan sasaran Sekolah Garis Depan (SGD);
 - b. Ditjen Dikdasmen mendapat penambahan pagu karena untuk rehab sekolah swasta dan revitalisasi SMK;
 - c. Ditjen PAUD dan Dikmas mendapat penambahan pagu untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru (RKB);
 - d. GTK mendapat penambahan pagu untuk peningkatan kompetensi guru (Pembentukan Instruktur Nasional).
2. Jumlah satker yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Kemendibud sebanyak 319 satker dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.50
Rincian Jumlah Satker Per Eselon I

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	Jenis Kewenangan				Jumlah
			KP	KD	DK	TP	
01	02301	Sekretariat Jenderal	32	3	34	-	69
02	02302	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	1
03	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	6	34	34	-	74
04	02305	Ditjen PAUD & Dikmas	5	29	-	-	34
05	02311	Balitbang Dikbud	5	10	-	-	15
06	02313	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbuk	4	30	-	-	34
07	02315	Ditjen Kebudayaan	6	33	-	-	39
08	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	5	14	34	-	53
JUMLAH			64	153	102	-	319

Keterangan : KP = Kantor Pusat; KD = Kantor Daerah; DK = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp1.242.455.146.784,-

C.1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.242.455.146.784,- dan Rp2.217.158.206.609,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi penurunan sebesar (Rp974.703.059.825,-) atau (43,96%).

Rincian Aset Lancar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.1.1
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

No.	Aset Lancar	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.978.861.883	8.424.255.920	8.554.605.963	101,55
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.604.000	325.000	1.279.000	393,54
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	80.465.430.689	222.407.919.463	(141.942.488.774)	(63,82)
4	Belanja Dibayar di Muka	771.004.826.422	746.624.152.037	24.380.674.385	3,27
5	Uang Muka Belanja	-	3.239.072.280	(3.239.072.280)	(100,00)
6	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.929.044.625	1.276.144.200	652.900.425	51,16
7	Piutang Bukan Pajak (Neto)	4.732.979.951	2.139.698.551	2.593.281.400	121,20
8	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto)	574.209.525	835.872.966	(261.663.441)	(31,30)
9	Persediaan	366.768.189.689	1.232.210.766.192	(865.442.576.503)	(70,23)
	Jumlah	1.242.455.146.784	2.217.158.206.609	(974.703.059.825)	(43,96)

Selanjutnya dibawah ini dijelaskan rincian per jenis Aset Lancar sebagai berikut:

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp16.978.861.883,-

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

adalah masing-masing sebesar Rp16.978.861.883,- dan Rp8.424.255.920,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp8.554.605.963,- atau 101,55%

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada tabel berikut.

Tabel C.1.2
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	15.838.277.847	7.785.952.817	8.052.325.030	103,42
2	02302	Inspektorat Jenderal	19.781.700	-	19.781.700	∞
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	102.831.050	17.404.100	85.426.950	490,84
4	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	22.060.000	-	22.060.000	∞
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	67.303.776	128.207.110	(60.903.334)	(47,50)
6	02313	Badan Pembinaan Bahasa & Perbukuan	36.047.510	-	36.047.510	∞
7	02315	Ditjen Kebudayaan	4.773.000	265.491.893	(260.718.893)	(98,20)
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	887.787.000	227.200.000	660.587.000	290,75
JUMLAH			16.978.861.883	8.424.255.920	8.554.605.963	101,55

Perkembangan penyeteroran Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 ke Kas Negara dan saldo kas setelah tanggal Neraca dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kode	Eselon I	Saldo 31 Des 2019	Penyeteroran	Saldo Setelah Tanggal Neraca
1	02301	Sekretariat Jenderal	15.838.277.847	1.523.675.000	14.314.602.847
2	02302	Inspektorat Jenderal	19.781.700	19.781.700	-
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	102.831.050	102.831.050	-
4	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	22.060.000	22.060.000	-
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	67.303.776	67.303.776	-
6	02313	Badan Pembinaan Bahasa & Perbukuan	36.047.510	36.047.510	-
7	02315	Ditjen Kebudayaan	4.773.000	4.773.000	-
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	887.787.000	887.787.000	-
JUMLAH			16.978.861.883	2.664.259.036	14.314.602.847

Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan ini, seluruh saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Eselon-1 sudah

disetorkan ke Kas Negara, kecuali untuk Eselon I Setjen, yang merupakan saldo UP/TUP pada satker Atdikbud dengan rincian sebagai berikut:

KODE	NAMA SATKER	UP	TUP	JUMLAH	PENYETORAN	SISA
414593	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI TOKYO	208.070.168	-	208.070.168		208.070.168
414607	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI WASHINGTON DC	455.464.319	-	455.464.319		455.464.319
414613	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI CANBERRA	138.434.221	-	138.434.221		138.434.221
414622	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI BANGKOK	266.400.154	-	266.400.154		266.400.154
414638	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI DEN HAAG	163.286.984	-	163.286.984		163.286.984
414644	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI KUALA LUMPUR	3.085.524.622	-	3.085.524.622		3.085.524.622
414650	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI BERLIN	1.044.169.306	-	1.044.169.306		1.044.169.306
414669	KANTOR DUBES / WRI UNESCO PARIS DI PARIS	651.512.624	-	651.512.624		651.512.624
414681	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI CAIRO	1.999.632.994	-	1.999.632.994		1.999.632.994
414690	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI PARIS	175.339.430	-	175.339.430		175.339.430
503121	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI LONDON	218.991.211	-	218.991.211		218.991.211
503135	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI PORT MORESBY	2.502	-	2.502		2.502
503142	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI MANILA	485.289.192	-	485.289.192		485.289.192
503143	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI DILI	741.771.956	-	741.771.956		741.771.956
512684	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI RIYADH	3.977.771.984	-	3.977.771.984		3.977.771.984
681816	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI BEIJING	87.803.442	-	87.803.442		87.803.442
681820	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI NEW DELHI	33.030.722	-	33.030.722		33.030.722
690349	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI SINGAPURA	582.101.873	5.143	582.107.016		582.107.016
414701	PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	-	1.523.675.000	1.523.675.000	1.523.675.000	-
JUMLAH		14.314.597.704	1.523.680.143	15.838.277.847	1.523.675.000	14.314.602.847

Untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada 18 satker Atase Pendidikan dan Kebudayaan tidak disetorkan karena diperhitungkan sebagai pengurang UP/TUP Tahun 2020.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp1.604.000,-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.604.000,- dan Rp325.000,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp1.279.000,- atau 393,54%. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.604.000,- ini berasal dari satker PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 25 Februari 2020 dengan NTPN 6B87D1JNEPHT2K9L.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp80.465.430.689,-

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp80.465.430.689,- dan Rp222.407.919.463,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi penurunan sebesar (Rp141.942.488.774,-) atau (63,82%).

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.1.3
Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I
(dalam rupiah)

NO	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	62.061.855	537.827.123	(475.765.268)	(88,46)
2	02302	Inspektorat Jenderal	-	11.265.000	(11.265.000)	(100,00)
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	12.937.540.127	10.493.675.638	2.443.864.489	23,29
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	3.598.262.765	40.370.397.515	(36.772.134.750)	(91,09)
5	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	252.505.418	13.162.918	239.342.500	1.818,31
6	02313	Badan Bahasa	472.226.705	-	472.226.705	∞
7	02315	Ditjen Kebudayaan	1.196.047.486	3.100.817.320	(1.904.769.834)	(61,43)
8	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	61.946.786.333	167.880.773.949	(105.933.987.616)	(63,10)
JUMLAH			80.465.430.689	222.407.919.463	(141.942.488.774)	(63,82)

Belanja Dibayar di
Muka
Rp771.004.826.422,-

C.1.4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Termasuk di dalam Belanja Dibayar Dimuka adalah Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemda/lembaga penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau Berita Acara Serah Terima.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp771.004.826.422,- dan Rp746.624.152.037,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp24.380.674.385,- atau 3,27%.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.1.4
Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per Eselon I
Per 30 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	91.335.527.439	64.848.429.874	26.487.097.565	40,84
2	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	574.067.573.753	578.799.214.523	(4.731.640.770)	(0,82)
3	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	73.088.951.051	73.815.327.782	(726.376.731)	(0,98)
4	Badan Penelitian dan Pengembangan	46.454.966	185.781.758	(139.326.792)	(74,99)
5	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	45.659.548	68.280.798	(22.621.250)	(33,13)
6	Ditjen Kebudayaan	30.411.949.936	12.436.713.277	17.975.236.659	144,53
7	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	2.008.709.729	16.470.404.025	(14.461.694.296)	(87,80)
JUMLAH		771.004.826.422	746.624.152.037	24.380.674.385	3,27

Uang Muka Belanja
Rp0,-

C.1.5 Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja adalah pembayaran di muka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil pekerjaan/jasa.

Saldo per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp0,- dan Rp3.239.072.280,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi penurunan sebesar (Rp3.239.072.280,-) atau (100%). Saldo Uang Muka Belanja pada tahun 2018 merupakan uang muka belanja barang alat IPS pada satker Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen yang telah diselesaikan pada TA 2019.

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp1.929.044.625,-

C.1.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Saldo per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp1.929.044.625,- dan Rp1.276.144.200,-, mengalami kenaikan sebesar Rp652.900.425,- atau 51,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon-1 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel C.1.5
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per Eselon-1

(dalam rupiah)

No.	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/ (turun)	%
1	Inspektorat Jenderal	-	6.000.000	(6.000.000)	(100,00)
2	Badan Pembinaan Bahasa	-	2.309.875	(2.309.875)	(100,00)
3	Ditjen Kebudayaan	1.929.044.625	1.267.834.325	661.210.300	52,15
JUMLAH		1.929.044.625	1.276.144.200	652.900.425	51,16

Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA. 2019 terdapat pada Ditjen Kebudayaan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2019	Keterangan
1	427775	Balai Konservasi Borobudur	75.000.000	Penerimaan dana Pendampingan sunrise / sunset Zona I Candi Borobudur Bulan Desember
2	427798	Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I.Yogyakarta	9.938.750	Bagi hasil dengan pemda penjualan tiket masuk 7 Candi (kekurangan setoran dari pemda) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tahun 2019 25% x Rp.1.156.070.000 = Rp.289.017.500 – Rp.279.078.750 (setoran 2019) = Rp.9.938.750.
3	427832	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	1.785.427.125	Bagi hasil dengan kabupaten banjar negara sebesar 1.592.260.000, kabupaten semarang sebesar 126.406.000 dan kabupaten karanganyar sebesar 66.761.125 terkait retribusi masuk ke area wisata candi
4	427843	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	58.678.750	Bagi hasil atas penjualan tiket masuk museum klaster krikilan dengan pemda kabupaten sragen
Jumlah			1.929.044.625	

Piutang Bukan Pajak
Rp4.756.763.770,-

C.1.7 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran.

Piutang Lainnya merupakan transaksi pengembalian belanja TAYL, dimana sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Yang Lalu, kas tersebut masih berada di pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara Pengeluaran.

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.756.763.770,- dan Rp2.150.450.806,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp2.606.312.964,- atau 121,20%. Perbandingan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, per Eselon I dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel C.1.6
Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	93.915.252	-	93.915.252	∞
2	02302	Inspektorat Jenderal	63.621.600	64.323.326	(701.726)	(1,09)
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	494.372.353	2.068.519.738	(1.574.147.385)	(76,10)
4	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	352.231.808	-	352.231.808	∞
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	129.876.033	-	129.876.033	∞
6	02313	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	2.489.625.325	-	2.489.625.325	∞
7	02315	Ditjen Kebudayaan	17.921.399	17.607.742	313.657	1,78
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	1.115.200.000	-	1.115.200.000	∞
Jumlah			4.756.763.770	2.150.450.806	2.606.312.964	121,20

Berikut Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I per Satker per 31 Desember 2019:

NO	ESELON-1/SATKER	NILAI PIUTANG
A.	SEKRETARIAT JENDERAL	93.915.252
1	BIRO UMUM	7.206.000
2	SEAMEO SEAMOLEC	4.076.520
3	BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN MASYARAKAT	71.350.564
4	PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN	1.857.168
5	BIRO SDM	1.700.000
6	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	7.725.000
B.	INSPEKTORAT JENDERAL	63.621.600
1	INSPEKTORAT JENDERAL	63.621.600
C.	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	494.372.353
1	SEKRETARIAT DITJEN DIKDASMEN	79.209.036
2	DIREKTORAT PEMBINAAN SMK	250.176.164
3	LPMP KEPULAUAN RIAU	43.275.000
4	LPMP SULAWESI TENGAH	60.699.929
5	LPMP NUSA TENGGARA TIMUR	61.012.224
D.	DITJEN PAUD DAN DIKMAS	352.231.808
1	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT RIAU	267.986.181
2	SETDITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	84.245.627
E.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	129.876.033
1	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	122.498.933
2	BALAI ARKEOLOGI BANDUNG	6.296.500
3	BALAI ARKEOLOGI BALI	1.080.600
F.	BADAN PENGEMB. DAN PEMBINAAN BAHASA	2.489.625.325
1	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	2.489.625.325
G.	DITJEN KEBUDAYAAN	17.921.399
1	DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI	16.288.399
2	DIREKTORAT Kesenian	1.433.000
3	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN	200.000
H.	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.115.200.000
1	SEKRETARIAT DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.115.200.000
JUMLAH KESELURUHAN		4.756.763.770

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
(Rp23.783.819,-)

C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp23.783.819,-) dan (Rp10.752.255,-). Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi kenaikan sebesar (Rp13.031.564,-) atau 121,20%. Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 , per Eselon I dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel C.1.7 ...

Tabel C.1.7
Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	(469.577)	-	(469.577)	∞
2	02302	Inspektorat Jenderal	(318.108)	(321.617)	3.509	(1,09)
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	(2.471.861)	(10.342.599)	7.870.738	(76,10)
4	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	(1.761.159)	-	(1.761.159)	∞
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	(649.380)	-	(649.380)	∞
6	02313	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	(12.448.127)	-	(12.448.127)	∞
7	02315	Ditjen Kebudayaan	(89.607)	(88.039)	(1.568)	1,78
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	(5.576.000)	-	(5.576.000)	∞
JUMLAH			(23.783.819)	(10.752.255)	(13.031.564)	121,20

Berikut Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per Eselon I per Satker per 31 Desember 2019:

NO	SATKER	NILAI PIUTANG	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	% PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN
A. SEKRETARIAT JENDERAL		93.915.252			0,50%	469.576
1	BIRO UMUM	7.206.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	36.030
2	SEAMEO SEAMOLEC	4.076.520	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	20.383
3	BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN MASYARAKAT	71.350.564	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	356.753
4	PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN	1.857.168	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	9.286
5	BIRO SDM	1.700.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	8.500
6	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	7.725.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	38.625
B. INSPEKTORAT JENDERAL		63.621.600			0,50%	318.108
1	INSPEKTORAT JENDERAL	63.621.600	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	318.108
C. DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		494.372.353			0,50%	2.471.862
1	SEKRETARIAT DITJEN DIKASMAN	79.209.036	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	396.045
2	DIREKTORAT PEMBINAAN SMK	250.176.164	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	1.250.881
3	LPMP KEPULAUAN RIAU	43.275.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	216.375
4	LPMP SULAWESI TENGAH	60.699.929	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	303.500
5	LPMP NUSA TENGGARA TIMUR	61.012.224	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	305.061
D. DITJEN PAUD DAN DIKMAS		352.231.808			0,50%	1.761.159
1	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT RIAU	267.986.181	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	1.339.931
2	SETDITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	84.245.627	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	421.228
E. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		129.876.033			0,50%	649.380
1	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	122.498.933	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	612.495
2	BALAI ARKEOLOGI BANDUNG	6.296.500	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	31.483
3	BALAI ARKEOLOGI BALI	1.080.600	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	5.403
F. BADAN PENGEMB. DAN PEMBINAAN BAHASA		2.489.625.325			0,50%	12.448.127
1	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	2.489.625.325	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	12.448.127
G. DITJEN KEBUDAYAAN		17.921.399			0,50%	89.607
1	DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI	16.288.399	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	81.442
2	DIREKTORAT Kesenian	1.433.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	7.165
3	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN	200.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	1.000
H. DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1.115.200.000			0,50%	5.576.000
1	SEKRETARIAT DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.115.200.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	5.576.000
JUMLAH KESELURUHAN		4.756.763.770				23.783.819

Bagian Lancar
TP/TGR
Rp577.095.000,-

C.1.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp577.095.000,- dan Rp840.073.333,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi penurunan sebesar (Rp262.978.333,-) atau (31,30%).

Penjelasan atas Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Dikdasmen sebesar Rp535.765.000,- merupakan TGR berdasarkan SKTJM pada satker Direktorat PKLK atas PNBP sewa Wisma Duta Wiyata tahun 2017 yang belum disetorkan ke Kas Negara. Selama tahun 2019 terdapat penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	NTPN	Jumlah
1	14-May-19	CCDF32FLPGHL4QEM	10.000.000
2	01-Jul-19	13F733G65348NJCM	5.000.000
3	03-Sep-19	133BFON9UM9NABKL	10.000.000
4	16-Oct-19	14DCF3CIE647VQVO	90.000.000
5	21-Oct-19	E09695500R9SSPBB	90.000.000
6	28-Oct-19	FDBF43CIE64JFHN1	90.000.000
7	18-Nov-19	44EOEON9UMG3UJ6B	5.000.000
TOTAL			300.000.000

2. Ditjen PAUD Dikmas sebesar Rp39.880.000,-, berupa kehilangan 20 televisi 32 *Inchi* pada satker BP PAUD Dikmas Kalsel sebesar Rp15.620.000,- dan berupa TGR kendaraan roda 4 pada satker Setditjen PAUD dan Dikmas sebesar Rp24.260.000,-;
3. Ditjen Kebudayaan sebesar Rp1.450.000,- terdapat pada Direktorat Sejarah.

Berikut Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I per Satker:

Tabel C.1.8
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per Eselon I Per Satker
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Satker	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/(Turun)	%
I	Ditjen Dikdasmen	535.765.000	835.765.000	(300.000.000)	(35,90)
1	Direktorat PKLK	535.765.000	835.765.000	(300.000.000)	(35,90)
II	Ditjen PAUD Dikmas	39.880.000	4.308.333	35.571.667	825,65
1	Setditjen PAUD Dikmas	24.260.000	983.333	23.276.667	2.367,12
2	BP PAUD Dikmas Kalsel	15.620.000	-	15.620.000	∞
3	BP PAUD Dikmas NTB	-	3.325.000	(3.325.000)	(100,00)
III	Ditjen Kebudayaan	1.450.000		1.450.000	∞
1	Direktorat Sejarah	1.450.000	-	1.450.000	∞
JUMLAH		577.095.000	840.073.333	(262.978.333)	(31,30)

Selanjutnya disajikan Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I per Satker per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Satker	Nilai Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
I	Ditjen Dikdasmen	535.765.000				2.678.825
1	Direktorat PKLK	535.765.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	2.678.825
II	Ditjen PAUD Dikmas	39.880.000				199.400
1	Setditjen PAUD dan Dikmas	24.260.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	121.300
2	BP PAUD Kalsel	15.620.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	78.100
III	Ditjen Kebudayaan	1.450.000				7.250
1	Direktorat Sejarah	1.450.000	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,50%	7.250
Jumlah		577.095.000				2.885.475

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Bag.
Lancar TP/TGR
(Rp2.885.475,-)

C.1.10 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 sebesar (Rp2.885.475,-) dan per 31 Desember 2018

adalah sebesar (Rp4.200.367,-). Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi penurunan sebesar Rp1.314.892,- atau (31,30%).

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 , Per Eselon I dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel C.1.9
Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih –
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Satker	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/(Turun)	%
I	Ditjen Dikdasmen	(2.678.825)	(4.178.825)	1.500.000	(35,90)
1	Direktorat PKLK	(2.678.825)	(4.178.825)	1.500.000	(35,90)
II	Ditjen PAUD Dikmas	(199.400)	(21.542)	(177.858)	825,65
1	Setditjen PAUD Dikmas	(121.300)	(4.917)	(116.383)	2.367,12
2	BP PAUD Dikmas Kalsel	(78.100)	-	(78.100)	∞
3	BP PAUD Dikmas NTB	-	(16.625)	16.625	(100,00)
III	Ditjen Kebudayaan	(7.250)	-	(7.250)	∞
3	Direktorat Sejarah	(7.250)	-	(7.250)	∞
JUMLAH		(2.885.475)	(4.200.367)	1.314.892	(31,30)

Adapun rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per satker 31 Desember 2019 pada tabel berikut :

Tabel C.1.10
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR
Per Satker 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Satker	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
I	Ditjen Dikdasmen	535.765.000		2.678.825
1	Direktorat PKLK	535.765.000	0,50%	2.678.825
II	Ditjen PAUD Dikmas	39.880.000		199.400
1	Setditjen PAUD dan Dikmas	24.260.000	0,50%	121.300
2	BP PAUD Kalsel	15.620.000	0,50%	78.100
III	Ditjen Kebudayaan	1.450.000		7.250
1	Direktorat Sejarah	1.450.000	0,50%	7.250
Jumlah		577.095.000		2.885.475

Persediaan
Rp366.768.189.689,-

C.1.11 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp366.768.189.689,- dan Rp1.232.210.766.192,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi penurunan sebesar (Rp865.442.576.503,-) atau (70,23%).

Jenis persediaan di lingkungan Kemendikbud terdiri dari barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, pita cukai, materai dan leges, serta aset yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat. Rincian per jenis persediaan per 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.1.11
Rincian Per Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2019

Uraian	Nilai Persediaan 31 Desember 2019			
	Saldo Awal Audited	Mutasi (+)	Mutasi (-)	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	23.500.227.460	72.647.888.748	(76.756.750.233)	19.391.365.975
Bahan untuk Pemeliharaan	977.951.745	6.008.971.808	(6.108.875.668)	878.047.885
Suku Cadang	306.788.843	670.114.904	(721.622.805)	255.280.942
Pita Cukai, Materai dan Leges	1.614.000	78.714.000	(76.574.000)	3.754.000
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	19.918.776.899	24.612.683.222	(20.567.671.257)	23.963.788.864
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.114.854.179.540	2.227.522.893.547	(3.158.805.536.054)	183.571.537.033
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	26.962.389.426	93.722.958.069	(20.224.602.206)	100.460.745.289
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	12.029.855.095	5.295.804.718	(7.966.522.848)	9.359.136.965
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	32.447.352.461	43.991.754.087	(49.167.602.423)	27.271.504.125
Bahan Baku	106.270.016	5.397.816.027	(5.298.349.345)	205.736.698
Persediaan Lainnya	1.105.360.707	4.240.769.774	(3.938.838.568)	1.407.291.913
JUMLAH	1.232.210.766.192	2.484.190.368.904	(3.349.632.945.407)	366.768.189.689

Sedangkan rincian Persediaan Per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.1.12
Persediaan Per Eselon-1
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

NO	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	3.967.722.036	4.202.466.005	(234.743.969)	(5,59)
2	02302	Inspektorat Jenderal	125.172.528	205.783.230	(80.610.702)	(39,17)
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	210.055.359.434	1.142.825.510.803	(932.770.151.369)	(81,62)
4	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	5.265.228.515	13.554.945.627	(8.289.717.112)	(61,16)
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.409.999.916	1.878.752.887	531.247.029	28,28
6	02313	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.386.586.437	6.815.844.318	(429.257.881)	(6,30)
7	02315	Ditjen Kebudayaan	136.303.273.804	60.559.238.378	75.744.035.426	125,07
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	2.254.847.019	2.168.224.944	86.622.075	4,00
JUMLAH			366.768.189.689	1.232.210.766.192	(865.442.576.503)	(70,23)

Pada Eselon I Ditjen Dikdasmen terjadi penurunan sebesar (Rp932.770.151.369), hal ini disebabkan karena peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat berupa alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tenda,dll telah diberikan ke sekolah-sekolah, sedangkan pada Ditjen Kebudayaan terdapat kenaikan sebesar Rp75.744.035.426,- berkaitan dengan revitalisasi museum di seluruh Indonesia yang belum di BAST kan ke museum terkait.

Rincian Persediaan per Akun per Eselon I per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

URAIAN	SEKRETARIAT JENDERAL	INSPEKTORAT JENDERAL	DITJEN DIKDASMEN	DITJEN PAUD DAN DIKMAS	BALITBANG	BAHASA	DITJEN KEBUDAYAAN	DITJEN GURU DAN TENDIK	JUMLAH
Barang Konsumsi	3.263.211.746	116.006.290	3.151.531.989	2.439.494.603	2.399.534.076	736.814.630	6.229.720.533	1.055.052.108	19.391.365.975
Bahan untuk Pemeliharaan	22.616.536	-	468.370.999	18.831.470	4.793.840	26.538.900	212.629.414	124.266.726	878.047.885
Suku Cadang	206.250	-	214.292.762	-	-	-	40.781.930	-	255.280.942
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-	30.000	3.724.000	-	-	-	3.754.000
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	23.963.788.864	-	23.963.788.864
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	180.060.821.637	704.315.000	-	-	2.422.590.396	383.810.000	183.571.537.033
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	4.203.400	-	-	22.918.500	-	-	100.433.623.389	-	100.460.745.289
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	8.230.733.419	197.208.000	-	144.343.750	786.851.796	-	9.359.136.965
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	285.284.700	-	17.506.153.984	1.744.827.850	-	5.418.893.091	1.676.944.500	639.400.000	27.271.504.125
Bahan Baku	2.786.458	-	49.590.350	-	1.716.000	442.500	108.726.760	42.474.630	205.736.698
Persediaan Lainnya	389.412.946	9.166.238	373.864.294	137.603.092	232.000	59.553.566	427.616.222	9.843.555	1.407.291.913
JUMLAH	3.967.722.036	125.172.528	210.055.359.434	5.265.228.515	2.409.999.916	6.386.586.437	136.303.273.804	2.254.847.019	366.768.189.689

Selanjutnya disajikan rincian Mutasi Persediaan pada tabel berikut ini:

Tabel C.1.13
Mutasi Persediaan 31 Desember 2019

Saldo Per 31 Desember 2018	1.232.210.766.192
Mutasi tambah:	2.485.385.490.648
Koreksi Penyesuaian Persediaan	7.029.186.719
Pembelian	2.472.991.265.936
Transfer Masuk	3.257.410.755
Perolehan Lainnya	639.000.000
Perolehan Lainnya	869.827.185
Koreksi Tambah	100.965.130
Hasil Opname Fisik kurang	497.834.923
Mutasi kurang:	(3.350.828.067.151)
Pemakaian	(89.326.772.107)
Transfer Keluar	(3.257.410.755)
Hibah Keluar	(422.743.542)
Barang Usang	(8.000.000)
Barang Rusak	(38.937.850)
Penghapusan Lainnya	(640.760.000)
Penyerahan kepada Masyarakat	(3.252.149.305.669)
Penyerahan kepada Masyarakat	(3.980.542.427)
Koreksi Kurang	(146.529.100)
Hasil Opname Fisik Lebih	(857.065.701)
Saldo per 31 Desember 2019	366.768.189.689

Aset Tetap
Rp25.185.910.617.510,-

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.185.910.617.510,- dan Rp10.395.458.651.651,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp14.790.451.965.859,- atau 142,28%.

Rincian Aset Tetap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel C.2.1
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	16.811.909.997.257	4.040.119.575.914	12.771.790.421.343	316,12
2	Peralatan dan Mesin	3.696.121.667.905	3.417.235.655.314	278.886.012.591	8,16
3	Gedung dan Bangunan	6.679.857.570.435	5.004.481.460.948	1.675.376.109.487	33,48
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.803.858.914	253.532.131.731	15.271.727.183	6,02
5	Aset Tetap Lainnya	407.805.021.259	412.300.389.335	(4.495.368.076)	(1,09)
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	563.946.376.700	764.495.228.518	(200.548.851.818)	(26,23)
	Jumlah	28.428.444.492.470	13.892.164.441.760	14.536.280.050.710	104,64
	Akumulasi Penyusutan	(3.242.533.874.960)	(3.496.705.790.109)	254.171.915.149	(7,27)
	Nilai Buku Aset Tetap	25.185.910.617.510	10.395.458.651.651	14.790.451.965.859	142,28

Terdapat Perbedaan antara realisasi Belanja Modal dengan Mutasi Aset Tetap yang diperoleh dari pembelian yang antara lain disebabkan oleh:

- Adanya perolehan Aset yang bukan berasal dari Belanja Modal (53) yang disebabkan kekeliruan penganggaran;
- Adanya realisasi Belanja Modal yang tidak menghasilkan Aset yang disebabkan kekeliruan penggunaan akun pada saat penganggaran;
- Adanya pengadaan/pembelian di bawah nilai kapitalisasi (*ekstrakomptabel*).

Selanjutnya di bawah ini dijelaskan per jenis aset tetap sebagai berikut:

Tanah
Rp16.811.909.997.257,-

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.811.909.997.257,- dan Rp4.040.119.575.914,-. Dibandingkan 31 Desember 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp12.771.790.421.343,- atau 316,12%. Kenaikan terbesar nilai tanah tersebut disebabkan oleh hasil revaluasi tanah tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp13.110.813.936.497,-.

Rincian mutasi Tanah yang terjadi sampai dengan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel C.2.2
Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2019

Saldo per 31 Desember 2018	4.040.119.575.914
Mutasi tambah:	13.924.970.577.615
Koreksi Saldo Awal	30.432.365.808
Pembelian	5.815.767.500
Hibah (Masuk)	1.582.770.000
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	395.626.775.000
Koreksi Nilai barang Berlebih	732.379.000
Pengembangan Melalui KDP	2.766.004.690
Pengembangan Nilai Aset	3.683.018.300
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	14.110.387.820
Reklasifikasi Masuk	359.407.173.000
Take In Reval	13.110.813.936.497
Mutasi kurang:	(1.153.180.156.272)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(305.555.075.269)
Koreksi Kesalahan input IP	(396.145.358.272)
Koreksi Pencatatan	(90.071.699.731)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(2.000.850.000)
Reklasifikasi Keluar	(359.407.173.000)
Saldo per 31 Desember 2019	16.811.909.997.257

Adapun saldo Tanah per Eselon I di lingkungan Kemendikbud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel C.2.3
Tanah Per Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31-Des-19	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	2.050.203.455.554	2.041.669.233.746	8.534.221.808	0,42
2	02302	Inspektorat Jenderal	14.671.594.000	14.671.594.000	-	-
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	4.550.015.060.167	4.280.265.274.397	269.749.785.770	6,30
4	02305	Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1.092.516.036.800	1.075.222.260.800	17.293.776.000	1,61
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	349.841.329.000	349.218.531.000	622.798.000	0,18
6	02313	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	586.982.890.000	585.826.462.000	1.156.428.000	0,20
7	02315	Ditjen Kebudayaan	5.545.870.486.736	6.213.452.022.468	(667.581.535.732)	(10,74)
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	2.621.809.145.000	2.590.608.134.000	31.201.011.000	1,20
JUMLAH (Termasuk Nilai Revaluasi)			16.811.909.997.257	17.150.933.512.411	(339.023.515.154)	(1,98)
		Take Out Revaluasi Aset Tetap	-	(13.110.813.936.497)	13.110.813.936.497	100,00
JUMLAH (Non Nilai Revaluasi)			16.811.909.997.257	4.040.119.575.914	12.771.790.421.343	316,12

Pada Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* ini dilakukan *take in* revaluasi aset tahun 2017 dan 2018 dan telah disajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN (Revaluasi Aset) tahun 2017 dan 2018 beserta perbaikannya pada tahun 2019.

Berikut penjelasan terkait mutasi tambah berasal dari hibah masuk pada Ditjen PAUD dan Dikmas dengan rincian:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nominal	Keterangan
1	403497	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat	1.500.000.000	Hibah dari Dinas Pendidikan Sulawesi Barat
2	403502	BP PAUD dan Dikmas Jambi	82.770.000	Hibah dari Pemerintah Kab. Batang Hari
Jumlah			1.582.770.000	

Peralatan dan Mesin
Rp3.696.121.667.905,-

C.2.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.696.121.667.905,- dan sebesar Rp3.417.235.655.314,-. Terdapat kenaikan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp278.886.012.591,- atau 8,16%. Adapun mutasi

peralatan dan mesin yang terjadi sampai dengan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel C.2.4
Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019

Saldo per 31 Desember 2018	3.417.235.655.314
Mutasi tambah:	487.939.776.883
Koreksi Saldo Awal	1.783.457.977
Pembelian	384.853.886.510
Transfer Masuk	27.574.426.136
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	18.629.353.327
Reklasifikasi Masuk	33.666.422.487
Perolehan Lainnya	2.018.386.220
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	4.113.701.813
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	516.729.784
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	1.190.000
Pengembangan Nilai Aset	10.259.562.471
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	405.190.984
Pengembangan Melalui KDP	4.117.469.174
Mutasi kurang:	(209.053.764.292)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(133.420.006.738)
Transaksi Normalisasi BMN	(661.214.700)
Penghapusan	(10.638.608.538)
Transfer Keluar	(27.574.426.136)
Hibah (Keluar)	(6.135.047.000)
Reklasifikasi Keluar	(27.951.638.555)
Koreksi Pencatatan	(1.825.656.534)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(847.166.091)
Saldo per 31 Desember 2019	3.696.121.667.905
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(2.690.760.510.117)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.005.361.157.788

Rincian Aset Peralatan dan Mesin per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2.5
Peralatan dan Mesin Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	891.116.860.396	855.701.422.373	35.415.438.023	4,14
2	02302	Inspektorat Jenderal	48.319.152.265	47.568.807.496	750.344.769	1,58
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	951.164.183.490	875.496.055.604	75.668.127.886	8,64
4	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	284.366.497.306	255.564.386.775	28.802.110.531	11,27
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	114.192.570.272	97.916.258.482	16.276.311.790	16,62
6	02313	Badan Pengemb. dan Pemb. Bahasa	117.228.147.053	96.966.114.184	20.262.032.869	20,90
7	02315	Ditjen Kebudayaan	489.896.741.732	458.115.505.801	31.781.235.931	6,94
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	799.837.515.391	729.907.104.599	69.930.410.792	9,58
JUMLAH			3.696.121.667.905	3.417.235.655.314	278.886.012.591	8,16

Hibah Keluar Peralatan dan Mesin terjadi pada Eselon 1 Ditjen PAUD dan Dikmas di satker PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah sebesar Rp1.549.928.000,-, hibah berupa peralatan perkantoran yang dihibahkan ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di wilayah Jawa Tengah dan Ditjen Kebudayaan di satker Setditjen Kebudayaan sebesar Rp4.585.119.000,-

Gedung dan
Bangunan
Rp6.679.857.570.435,-

C.2.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp6.679.857.570.435,- dan Rp5.004.481.460.948,-. Terdapat kenaikan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.675.376.109.487,- atau 33,48%. Kenaikan terbesar pada nilai Gedung dan bangunan berasal dari hasil revaluasi tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp1.904.229.431.122,-. Adapun mutasi Gedung dan Bangunan yang terjadi sampai dengan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2.6
Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019

Saldo per 31 Desember 2018	5.004.481.460.948
Mutasi tambah:	2.686.856.183.147
Koreksi Saldo Awal	42.443.194.604
Pembelian	1.430.389.112
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	1.838.841.000
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	1.335.928.000
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	1.065.471.000
Koreksi Nilai barang Berlebih	1.359.323.000
Koreksi Penilaian Kembali BMN	1.231.964.155
Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	31.818.000
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	310.033.327
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	10.680.379.224
Pengembangan Melalui KDP	254.892.219.002
Pengembangan Nilai Aset	92.160.795.401
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	339.321.455.256
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.063.916.877
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	3.068.778.653
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	103.681.000
Reklasifikasi Masuk	28.142.995.414
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	691.730.500
Transfer Masuk	453.838.500
Take In Reval	1.904.229.431.122
Mutasi kurang:	(1.011.480.073.660)
Hibah (Keluar)	(43.998.453.166)
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	(212.586.000)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(1.911.640.362)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(2.407.533.540)
Koreksi Kesalahan input IP	(888.318.704.181)
Koreksi Pencatatan	(8.835.723.774)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(2.747.031.226)
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(24.427.576.740)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(138.911.655)
Penghapusan	(227.211.000)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(5.407.101.000)
Reklasifikasi Keluar	(30.415.242.016)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(20.047.500)
Transaksi Normalisasi BMN	(12.445.000)
Transfer Keluar	(2.399.866.500)
Saldo per 31 Des 2019	6.679.857.570.435
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2019	(443.756.973.306)
Nilai Buku per 31 Des 2019	6.236.100.597.129

Mutasi kurang gedung dan bangunan yang berasal dari Hibah Keluar terjadi di Ditjen Kebudayaan pada satker Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebesar Rp36.536.849.166,-, yang dihibahkan ke Dinas Kab. Pulau Morotai (museum PD II dan Trikora) sedangkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua sebesar Rp4.605.000.000 dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab Aceh Tengah Rp2.856.604.000,- dihibahkan ke pemerintah daerah terkait.

Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2.7
Gedung dan Bangunan Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	1.561.922.074.272	1.538.968.832.852	22.953.241.420	1,49
2	02302	Inspektorat Jenderal	90.180.266.845	89.756.407.900	423.858.945	0,47
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	1.981.994.404.739	1.711.432.806.690	270.561.598.049	15,81
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	428.866.436.953	363.770.959.815	65.095.477.138	17,89
5	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	163.002.992.671	153.959.159.077	9.043.833.594	5,87
6	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	212.867.742.097	204.858.239.744	8.009.502.353	3,91
7	02315	Ditjen Kebudayaan	1.054.399.976.080	1.768.008.561.940	(713.608.585.860)	(40,36)
8	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	1.186.623.676.778	1.077.955.924.052	108.667.752.726	10,08
		Jurnal Transaksi Lanjutan	-	119.580.241.663	(119.580.241.663)	(100,00)
		JUMLAH (Termasuk Nilai Revaluasi)	6.679.857.570.435	7.028.291.133.733	(348.433.563.298)	(4,96)
		Revaluasi Aset Tetap	-	(2.023.809.672.785)	2.023.809.672.785	(100,00)
		JUMLAH (Non Nilai Revaluasi)	6.679.857.570.435	5.004.481.460.948	1.675.376.109.487	33,48

Pada Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* ini dilakukan *take in revaluasi aset* tahun 2017 dan 2018 dan telah disajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN (Revaluasi Aset) tahun 2017 dan 2018 beserta perbaikannya pada tahun 2019.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp268.803.858.914,-

C.2.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp268.803.858.914,- dan Rp253.532.131.731,-. Terdapat kenaikan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.271.727.183,- atau 6,02%. Kenaikan terbesar pada nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari hasil revaluasi tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp146.341.657.070,-. Adapun mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terjadi sampai dengan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2.8
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019

Saldo per 31 Desember 2018	253.532.131.731
Mutasi tambah:	181.613.416.284
koreksi Saldo Awal	356.990.496
Pembelian	4.354.316.911
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6.929.433.235
Reklasifikasi Masuk	2.640.640.983
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	1.682.482.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	277.575.001
Pengembangan Nilai Aset	5.476.537.195
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	416.667.092
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	23.000.000
Pengembangan Melalui KDP	3.645.634.865
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	12.386.584
Koreksi Kesalahan input IP	9.456.094.852
Take In Reval	146.341.657.070
Mutasi kurang:	(166.341.689.101)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(142.135.331)
Koreksi Kesalahan input IP	(151.179.229.693)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(66.542.584)
Penghapusan	(16.668.000)
Transfer Keluar	(12.617.120)
Reklasifikasi Keluar	(2.232.866.109)
Koreksi Pencatatan	(700.104.000)
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	(31.971.367)
Koreksi Nilai barang Berlebih	(313.872.000)
Koreksi Penilaian Kembali BMN	(6.051.618)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(39.200.882)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(375.401.000)
Take Out Reval	(11.225.029.397)
Saldo per 31 Des 2019	268.803.858.914
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2019	(102.479.350.089)
Nilai Buku per 31 Des 2019	166.324.508.825

Rincian jalan, rigasi dan jaringan per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2.9
Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik / (Turun)	%
02301	Sekretariat Jenderal	49.418.397.926	35.143.348.810	14.275.049.116	40,62
02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	105.822.348.826	96.816.504.528	9.005.844.298	9,30
02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	11.387.197.021	10.055.635.754	1.331.561.267	13,24
02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	4.202.375.035	3.977.685.835	224.689.200	5,65
02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	4.431.626.090	3.345.667.090	1.085.959.000	32,46
02315	Ditjen Kebudayaan	18.303.931.178	16.309.158.612	1.994.772.566	12,23
02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	75.237.982.838	223.000.758.775	(147.762.775.937)	(66,26)
	Jurnal Transaksi Lanjutan	-	(2.266.441.950)	2.266.441.950	(100,00)
	JUMLAH Termasuk Nilai Revaluasi)	268.803.858.914	386.382.317.454	(117.578.458.540)	(30,43)
	Revaluasi Aset Tetap	-	(132.850.185.723)	132.850.185.723	(100,00)
	JUMLAH (non Nilai Revaluasi)	268.803.858.914	253.532.131.731	15.271.727.183	6,02

Pada Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* ini dilakukan *take in* revaluasi aset tahun 2017 dan 2018 dan telah disajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN (Revaluasi Aset) tahun 2017 dan 2018 beserta perbaikannya pada tahun 2019.

Aset Tetap Lainnya
Rp407.805.021.259,-

C.2.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan antara lain aset tetap renovasi dan aset tetap lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp407.805.021.259,- dan Rp412.300.389.335,-. Terdapat penurunan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp4.495.368.076,-) atau (1,09%). Selanjutnya disajikan rincian mutasi aset tetap lainnya yang terjadi sampai dengan per 31 Desember 2019:

Tabel C.2.10
Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019

Saldo per 31 Desember 2018	412.300.389.335
Mutasi tambah:	22.590.726.875
Pembelian	11.234.616.819
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.981.543.568
Reklasifikasi Masuk	1.045.760.242
Pengembangan Nilai Aset	1.860.000
Pengembangan Melalui KDP	4.326.946.246
Mutasi kurang:	(27.086.094.951)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(916.080.558)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(177.194.650)
Penghapusan	(1.949.589.200)
Transfer Keluar	(13.689.699.024)
Hibah (Keluar)	(9.666.865.519)
Reklasifikasi Keluar	(438.060.000)
Koreksi Pencatatan	(248.606.000)
Saldo per 31 Des 2019	407.805.021.259
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2019	(5.023.630.737)
Nilai Buku per 31 Des 2019	402.781.390.522

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya, diantaranya terdapat Transfer Keluar dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Satker	Tranfer Keluar	Nilai	Satker Penerima
A. SEKRETARIAT JENDERAL				(779.325.113)	
1	682075	Pusat Data dan Statistik Pendidikan	Aset Tetap dalam Renovasi	(368.599.000)	137590 Biro Umum
2	690271	Biro Perencanaan dan KLN	Aset Tetap dalam Renovasi	(77.642.813)	137590 Biro Umum
3	690285	Biro Keuangan	Aset Tetap dalam Renovasi	(333.083.300)	137590 Biro Umum
B. DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH				(4.377.465.946)	
4	414726	Sekretariat Ditjen Dikdasmen	Aset Tetap dalam Renovasi	(4.185.101.246)	137590 Biro Umum
5	666032	Direktorat Pembinaan SMP	Aset Tetap dalam Renovasi	(192.364.700)	137590 Biro Umum
C. DITJEN PAUD DAN DIKMAS				(2.303.091.630)	
6	415341	Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas	Aset Tetap dalam Renovasi	(1.139.012.450)	137590 Biro Umum
7	666870	Dit. Pemb. Kursus dan Pelatihan	Aset Tetap dalam Renovasi	(1.164.079.180)	137590 Biro Umum
D. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				(1.391.520.146)	
8	137608	Sekretariat Balitbang	Aset Tetap dalam Renovasi	(1.368.520.146)	409294 Sekretariat Jenderal Kemenkeu
9	690382	Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	Aset Tetap dalam Renovasi	(23.000.000)	690386 Balai Arkeologi Yogyakarta
E. DITJEN KEBUDAYAAN				(2.754.346.134)	
10	189643	Sekretariat Ditjen Kebudayaan	Aset Tetap dalam Renovasi	(199.811.238)	137590 Biro Umum
11	189644	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Aset Tetap dalam Renovasi	(936.735.242)	
			(535.559.742)	427826	Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
			(401.175.500)	477783	Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
12	025226	Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai KIRTI	Aset Tetap dalam Renovasi	(1.617.799.654)	403134 Istana Kepresidenan Bogor
F. DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				(2.083.950.055)	
13	361150	Sekretariat Ditjen GTK	Aset Tetap dalam Renovasi	(2.083.950.055)	137590 Biro Umum
JUMLAH				(13.689.699.024)	

Sedangkan untuk mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dari Hibah (keluar), rincian sebagai berikut:

Kode	Satker	Nilai	Satker Penerima Hibah	Nomor Naskah Hibah
DITJEN PAUD DAN DIKMAS				
666866	DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN	(196.441.000)	Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sukabumi	BAST Hibah Buku Nomor: 2442/C4/LK/2019
Jumlah Ditjen PAUD dan Dikmas		(196.441.000)		
DITJEN KEBUDAYAAN				
130158	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS	(1.347.109.000)	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS	Kepmen no 327/M/2019 tanggal 09 September 2019
189644	DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	(2.854.610.000)	Dinas Kebudayaan Provinsi Papua	BAST no 2892/E2.6/LK/2019 tanggal 22 Juli 2019
		(577.626.000)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh	3840/E2.6/LK/2019 tanggal 16 September 2019
220852	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TABANAN	(1.786.544.000)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TABANAN	Kepmen No 200/M/2019 tanggal 13 Juni 2019
477792	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO	(306.130.319)	Permda Kabupaten Gorontalo Utara	BAST no 871/H23/RT/2019 tanggal 02 Desember 2019
547712	KANTOR MUSEUM BENTENG VREDEBURG, JOGJAKARTA	(2.598.405.200)	Kesultanan Yogyakarta	BAST 0725/E10/LK/2019 tanggal 23 Mei 2019
Jumlah Ditjen Kebudayaan		(9.470.424.519)		
Total Hibah Keluar ATL		(9.666.865.519)		

Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2.11
Aset Tetap Lainnya Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31-Des-19	31 Des 2018	Naik/(Turun)	%
1	023.01	Sekretariat Jenderal	49.504.786.271	49.136.181.171	368.605.100	0,75
2	023.02	Inspektorat Jenderal	172.048.932	124.336.432	47.712.500	38,37
3	023.03	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	24.232.523.207	23.944.654.977	287.868.230	1,20
4	023.05	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	20.811.760.871	19.902.444.471	909.316.400	4,57
5	023.11	Badan Penelitian Dan Pengembangan	4.070.347.607	4.290.236.780	(219.889.173)	(5,13)
6	023.13	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	10.269.563.852	9.679.518.243	590.045.609	6,10
7	023.15	Ditjen Kebudayaan	288.178.895.125	295.063.250.207	(6.884.355.082)	(2,33)
8	023.16	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	10.565.095.394	10.159.767.054	405.328.340	3,99
JUMLAH			407.805.021.259	412.300.389.335	(4.495.368.076)	(1,09)

Adapun penurunan nilai Aset Tetap Lainnya pada 2 (dua) Eselon I di lingkungan Kemendikbud terjadi karena:

1. Pada Badan Penelitian dan Pengembangan disebabkan oleh Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp337.359.773,-;
2. Ditjen. Kebudayaan sebagian besar disebabkan oleh Hibah (keluar) sebesar Rp3.176.031.200,-, penghapusan sebesar Rp1.949.370.000, dan Transfer Keluar sebesar Rp535.559.742,-.

Konstruksi dalam
Pengerjaan
Rp563.946.376.700,-

C.2.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp563.946.376.700,- dan sebesar Rp764.495.228.518,-. Terdapat penurunan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar (Rp200.548.851.818,-) atau (26,23%) karena KDP tersebut telah selesai pengerjaannya. Selanjutnya disajikan Mutasi KDP sampai dengan per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel C.2.12
Mutasi KDP Per 31 Desember 2019

Saldo per 31 Desember 2018	764.495.228.518
Mutasi tambah:	474.000.358.173
Perolehan/Penambahan KDP	57.869.776.675
Pengembangan KDP	416.130.581.498
Mutasi kurang:	(674.549.209.991)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(384.972.173.206)
Pengembangan Melalui KDP	(269.748.273.977)
Koreksi Nilai KDP	(7.818.653.058)
Penghapusan/ Penghentian KDP	(759.724.750)
Hibah Keluar KDP	(11.250.385.000)
Saldo per 31 Des 2019	563.946.376.700

Mutasi kurang KDP dari hibah keluar berasal dari Ditjen Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp11.250.385.000,- berupa tugu yang dihibahkan ke pemerintah daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.

Rincian konstruksi dalam pengerjaan per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2.13
Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/(Turun)	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	548.732.811	548.732.811	-	-
2	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	81.109.842.830	54.237.934.997	26.871.907.833	49,54
3	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	4.037.351.661	3.878.150.055	159.201.606	4,11
4	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	19.723.000	-	19.723.000	∞
5	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	1.370.063.369	1.370.063.369	-	-
6	02315	Ditjen Kebudayaan	470.538.820.029	703.226.611.703	(232.687.791.674)	(33,09)
7	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	6.321.843.000	1.233.735.583	5.088.107.417	412,41
JUMLAH			563.946.376.700	764.495.228.518	(200.548.851.818)	(26,23)

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp3.242.533.874.960 -)

C.2.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing (Rp3.242.533.874.960,-) dan (Rp3.496.705.790.109,-). Adapun rincian akumulasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel C.2.14
Rincian Akumulasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/(Turun)	%
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.690.762.980.117)	(2.446.822.749.458)	(243.940.230.659)	9,07
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(443.756.973.306)	(932.178.235.827)	488.421.262.521	(110,07)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(102.990.290.800)	(112.982.103.721)	9.991.812.921	(9,70)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5.023.630.737)	(4.722.701.103)	(300.929.634)	5,99
Jumlah		(3.242.533.874.960)	(3.496.705.790.109)	254.171.915.149	(7,27)

Selanjutnya disajikan Mutasi Penyusutan Tahun 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel C.2.15
Mutasi Penyusutan Per 31 Desember 2019

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	(3.496.705.790.109)
Mutasi tambah:	902.108.122.835
Hibah (Keluar)	9.082.702.600
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	8.768.992
Koreksi Pencatatan	3.114.795.030
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	98.006.282
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	108.571.822
Koreksi Penilaian Kembali BMN	178.112.537
Koreksi Penyusutan Karena 225	29.777.850.496
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	1.141.835
Penghapusan	10.648.232.785
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	128.680.380.593
Reklasifikasi Keluar	10.494.925.529
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	242.159.207
Transaksi Normalisasi BMN	43.138.194.154
Transfer Keluar	6.839.596.996
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	840.392.768
Take In Reval	658.854.291.209
Mutasi kurang:	(647.936.207.686)
Koreksi Saldo Awal	(8.085.435.419)
Pembelian	(4.182.715.978)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(183.935.862)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(138.484.049)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(4.174.102.705)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(3.768.144.600)
Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	(611.806.796.833)
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(303.284.442)
Perolehan Lainnya	(1.304.662.032)
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	(602.982.550)
Reklasifikasi Masuk	(6.500.908.939)
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	(138.911.655)
Transfer Masuk	(6.745.842.622)
Saldo per 31 Des 2019	(3.242.533.874.960)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2.16
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/(Turun)	%
1	023.01	Sekretariat Jenderal	(841.537.473.936)	(720.712.980.831)	(120.824.493.105)	16,76
2	023.02	Inspektorat Jenderal	(46.361.151.794)	(42.941.641.171)	(3.419.510.623)	7,96
3	023.03	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	(854.769.816.368)	(726.254.368.167)	(128.515.448.201)	17,70
4	023.05	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	(206.170.805.606)	(172.685.124.099)	(33.485.681.507)	19,39
5	023.11	Badan Penelitian Dan Pengembangan	(90.357.396.108)	(68.950.980.279)	(21.406.415.829)	31,05
6	023.13	Badan Pembinaan Bahasa & Perbukuan	(99.686.128.640)	(79.616.048.521)	(20.070.080.119)	25,21
7	023.15	Ditjen Kebudayaan	(402.854.271.025)	(393.119.689.579)	(9.734.581.446)	2,48
8	023.16	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	(700.796.831.483)	(633.582.271.253)	(67.214.560.230)	10,61
JUMLAH			(3.242.533.874.960)	(2.837.863.103.900)	(404.670.771.060)	14,26
		Revaluasi Aset Tetap	-	(658.842.686.209)	658.842.686.209	(100,00)
JUMLAH			(3.242.533.874.960)	(3.496.705.790.109)	254.171.915.149	(7,27)

Piutang Jangka Panjang Rp0,-

C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kemendikbud terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. Nilai Piutang Jangka Panjang (Neto) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp88.457.656,-. Dibandingkan saldo 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar (Rp88.457.656,-) atau (100,00%). Rincian Jenis Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.1
Perbandingan Piutang Jangka Panjang
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/(Turun)	%
1	Piutang Tagihan TP/TGR	-	88.902.167	(88.902.167)	(100,00)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR	-	(444.511)	444.511	(100,00)
	Piutang Tagihan TP/TGR (Neto)	-	88.457.656	(88.457.656)	(100,00)
3	Piutang Jangka Panjang lainnya	89.765.100	89.765.100	-	-
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(89.765.100)	(89.765.100)	-	-
	Piutang Jangka Panjang lainnya (Neto)	-	-	-	∞
	Jumlah	-	88.457.656	(88.457.656)	(100,00)

Selanjutnya dijelaskan Rincian Piutang Jangka Panjang sebagai berikut:

Piutang Tagihan TP/TGR Rp0,-

C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan tagihan yang belum dibayarkan dan merupakan hasil reklasifikasi dari Tagihan Ganti Rugi.

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp88.902.167,-. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tahun 2018 terdapat pada Ditjen PAUD dan Ditjen Kebudayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.3.2 ...

Tabel C.3.2
Perbandingan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

NO.	KODE	ESELON I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%	Ket
1	023.05	Ditjen PAUD dan Dikmas	-	75.136.667	(75.136.667)	-100,00%	-
2	023.15	Ditjen Kebudayaan		13.765.500	(13.765.500)	-100,00%	Kehilangan motor, angsuran s.d. April 2020
JUMLAH			-	88.902.167	(88.902.167)	-100,00%	

Penyisihan Piutang
tak Tertagih –
TP/TGR
Rp0,-

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan (Rp444.511,-) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR. Adapun rincian penyisihan Piutang Bukan Pajak Per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.3
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR

NO.	KODE	ESELON I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	023.05	Ditjen PAUD dan Dikmas	-	(375.683)	375.683	-100,00%
2	023.15	Ditjen Kebudayaan	-	(68.828)	68.828	-100,00%
JUMLAH			-	(444.511)	444.511	-100%

Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp89.765.100,-

C.3.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp89.765.100,- dan Rp89.765.100,-. Piutang Jangka Panjang tersebut terdapat pada Balitbang:

NO	SATKER	NILAI PIUTANG	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	% PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN
1	Sekretariat Balitbang	89.765.100	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	Macet	100,00%	89.765.100
JUMLAH		89.765.100				89.765.101

Piutang Jangka Panjang Lainnya tersebut merupakan Piutang PT. Asuransi Raya terhadap kontrak pekerjaan pengadaan sarana prasarana

perkantoran Sekretariat Balitbang oleh CV. Karya Agung yang *wanprestasi* sudah diajukan untuk dialihkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I dengan surat dari Sekretaris Balitbang Nomor 12868/H1.4/KU/2017 tanggal 11 Desember 2017. KPKNL Jakarta I menerima pengurusan Piutang Negara a.n. CV. Karya Agung Pertiwi sesuai dengan surat No. SP3N-02/PUPNC.10.01/2019 tanggal 21 Januari 2019. Sehingga pengurusan Piutang Sekretariat Balitbang Kemendikbud sebesar Rp89.765.100,00 beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I. Hingga laporan keuangan ini disusun belum ada progress informasi terkait penagihan piutang tersebut.

*Penyisihan Piutang
tak Tertagih Piutang
Jangka Panjang
Lainnya
(Rp89.765.100,-)*

C.3.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Penyisihan Piutang tak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp89.765.100,-) dan (Rp89.765.100,-), yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya pada tahun 2018 merupakan piutang macet yang terdapat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan yang pengurusannya sudah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I.

Aset Lainnya

Rp2.236.332.526.440,-

C.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp2.236.332.526.440,- dan Rp2.158.850.112.635,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.3.4 ...

Tabel C.3.4
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Aset Tak Berwujud	259.992.096.164	273.541.419.740	(13.549.323.576)	(4,95)
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	2.056.684.175.000	1.952.635.775.000	104.048.400.000	5,33
4	Aset Lain-Lain	572.360.053.029	607.599.164.234	(35.239.111.205)	(5,80)
	Jumlah	2.889.036.324.193	2.833.776.358.974	55.259.965.219	1,95
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya / Amortisasi	(652.703.797.753)	(674.926.246.339)	22.222.448.586	(3,29)
	Aset Lainnya	2.236.332.526.440	2.158.850.112.635	77.482.413.805	3,59

Selanjutnya dijelaskan per jenis Aset Lainnya sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud
Rp259.992.096.164,-

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa software, hak cipta, dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp259.992.096.164,- dan Rp273.541.419.740,-. Terdapat penurunan nilai Aset Tak Berwujud sebesar (Rp13.549.323.576,-) atau (4,95%). Rincian jenis Aset Tak Berwujud yang berada di lingkungan Kemendikbud adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.1
Rincian Jenis Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Hak Cipta	98.797.238.900	98.816.988.900	(19.750.000)	(0,02)
2	Software	92.749.106.224	89.188.551.513	3.560.554.711	3,99
3	Lisensi	34.872.504.563	33.311.198.563	1.561.306.000	4,69
4	Hasil Kajian/Penelitian	4.226.966.000	4.176.966.000	50.000.000	1,20
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	29.346.280.477	48.047.714.764	(18.701.434.287)	(38,92)
	Jumlah	259.992.096.164	273.541.419.740	(13.549.323.576)	(4,95)

Adapun mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan per 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel C.4.2
Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	273.541.419.740
Mutasi tambah:	15.244.501.933
Pembelian	8.259.843.648
Transfer Masuk	1.899.006.900
Reklasifikasi Masuk	3.982.787.785
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	108.762.500
Pengembangan Nilai Aset	994.101.100
Mutasi kurang:	(28.793.825.509)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(15.723.446.624)
Penghapusan	(5.261.873.500)
Transfer Keluar	(1.899.006.900)
Hibah (Keluar)	(8.000.000)
Reklasifikasi Keluar	(3.918.671.585)
Koreksi Pencatatan	(1.982.826.900)
Saldo per 31 Desember 2019	259.992.096.164
Amortisasi Aset s.d. 31 Desember 2019	(147.595.800.795)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	112.396.295.369

Mutasi kurang yang berasal dari Hibah (Keluar) terdapat pada satker PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah berupa *software* Laboratorium Bahasa ke 8 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di wilayah Jawa Tengah.

Rincian Aset Tak Berwujud masing-masing Eselon I per 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah.

Tabel C.4.3
Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik / (Turun)	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	88.756.146.891	103.913.124.069	(15.156.977.178)	(14,59)
2	02302	Inspektorat Jenderal	3.711.701.585	3.525.554.085	186.147.500	5,28
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	19.921.856.627	20.109.625.415	(187.768.788)	(0,93)
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	6.325.729.770	5.098.906.270	1.226.823.500	24,06
5	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	104.115.275.669	104.274.975.669	(159.700.000)	(0,15)
6	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	7.079.239.014	6.709.540.014	369.699.000	5,51
7	02315	Ditjen Kebudayaan	20.432.266.132	18.960.077.632	1.472.188.500	7,76
8	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	9.649.880.476	10.949.616.586	(1.299.736.110)	(11,87)
JUMLAH			259.992.096.164	273.541.419.740	(13.549.323.576)	(4,95)

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp2.056.684.175.000,-

C.4.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kemendikbud adalah dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan berada di bank penyalur (BNI dan BRI) dalam bentuk rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) yang belum diaktivasi oleh siswa penerima manfaat. Dana tersebut akan disalurkan kembali pada tahun 2020 sesuai dengan peruntukannya.

Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.056.684.175.000,- dan sebesar Rp1.952.635.775.000,-.

Seluruh saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya berada pada Eselon I Ditjen Dikdasmen yang merupakan saldo dana PIP Tahun 2018 dan 2019 yang bersumber dari Berita Acara Rekon antara Kemendikbud dan Bank Penyalur, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.4.4
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Per 31 Desember 2019

No.	Kode Satker	Nama Satker	Sisa PIP 2018	Sisa PIP 2019	Saldo per 31 Desember 2019
1	666011	Direktorat Pembinaan SD	236.193.975.000	682.866.450.000	919.060.425.000
2	666032	Direktorat Pembinaan SMP	137.259.000.000	438.123.750.000	575.382.750.000
3	419514	Direktorat Pembinaan SMA	30.685.500.000	166.392.000.000	197.077.500.000
4	419514	Direktorat Pembinaan SMK	87.918.000.000	277.245.500.000	365.163.500.000
JUMLAH			492.056.475.000	1.564.627.700.000	2.056.684.175.000

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam tahun 2019, Dana PIP Tahun 2017 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SATKER	NOMINAL	TANGGAL SETOR	NTPN
1	DIREKTORAT PEMBINAAN SD	159.018.525.000	19 JULI 2019	NTPN A2DA861QTLIGK7VA
2	DIREKTORAT PEMBINAAN SMP	160.119.375.000	19 JULI 2019	NTPN FD9B76U8DG4T8ABA.
3	DIREKTORAT PEMBINAAN SMA	84.857.500.000	1 JULI 2019	0087413VSKE5S6EP
4	DIREKTORAT PEMBINAAN SMK	128.472.000.000	1 JULI 2019	3423518NJNIJB0EP
		42.000.000	17 JULI 2019	028810N9UM453E4T
JUMLAH		532.509.400.000		

Aset Lain-lain
Rp572.360.053.029,-

C.4.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp572.360.053.029,- dan sebesar Rp607.599.164.234,-.

Rincian Aset lain-lain per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.4.5
Aset Lain-lain Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Kode	Eselon I	31-Dec-19	31-Dec-18	Naik/(Turun)	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	53.107.351.621	62.749.351.408	(9.641.999.787)	(15,37)
2	02302	Inspektorat Jenderal	237.604.820	64.889.820	172.715.000	266,17
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	438.147.388.373	459.812.553.355	(21.665.164.982)	(4,71)
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	9.522.980.617	10.820.384.620	(1.297.404.003)	(11,99)
5	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	21.650.166.088	21.789.556.170	(139.390.082)	(0,64)
6	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	5.662.606.216	3.053.171.167	2.609.435.049	85,47
7	02315	Ditjen Kebudayaan	8.143.664.817	5.421.808.850	2.721.855.967	50,20
8	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	35.888.290.477	43.224.829.431	(7.336.538.954)	(16,97)
JUMLAH			572.360.053.029	606.936.544.821	(34.576.491.792)	(5,70)
		Koreksi Revaluasi Aset Tetap	-	662.619.413	(662.619.413)	(100,00)
JUMLAH			572.360.053.029	607.599.164.234	(35.239.111.205)	(5,80)

Adapun mutasi aset lain-lain sampai dengan per 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel C.4.6
Mutasi Aset Lain-lain Per 31 Desember 2019

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	607.599.164.234
Mutasi tambah:	155.608.770.251
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	155.608.770.251
Mutasi kurang:	(190.847.881.456)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(4.603.720.314)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(393.316.000)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(126.436.279.983)
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(6.877.678.500)
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(12.932.700)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(51.784.940.546)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(76.394.000)
Take In Reval	(662.619.413)
Saldo per 31 Desember 2019	572.360.053.029
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(505.107.996.958)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	67.252.056.071

Mutasi kurang yang berasal dari Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar Rp6.877.678.500,- terdapat pada satker Setditjen Kebudayaan, berikut rincian penerima hibah:

No	Penerima	Nilai	No Polisi	Barang
1	Dinas Kesenian Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Siak	749.785.000	B 7139 PPA	Mobil Bioskop Keliling
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Utara	749.785.000	B 7107 PPA	Mobil Bioskop Keliling
3	Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan	749.785.000	B 7133 PPA	Mobil Bioskop Keliling
4	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda Olahraga Kab. Purworejo	749.785.000	B 7134 PPA	Mobil Bioskop Keliling
5	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Landak	749.785.000	B 7103 PPA	Mobil Bioskop Keliling
6	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok	749.785.000	B 7144 PPA	Mobil Bioskop Keliling
7	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Asahan	792.989.500	B 9474 PQV	Mobil Bioskop Keliling
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung	792.989.500	B 9310 PQV	Mobil Bioskop Keliling
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak	792.989.500	B 9319 PQV	Mobil Bioskop Keliling
Jumlah		6.877.678.500		

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp652.703.797.753,-)

C.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp652.703.797.753,-) dan sebesar (Rp674.926.246.339,-).

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.7
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	(505.107.996.958)	(539.078.925.000)	(33.970.928.042)	(6,30%)
2	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(14.977.095.220)	(13.569.260.377)	1.407.834.843	10,38%
3	Akumulasi Amortisasi Software	(76.354.763.429)	(69.470.858.175)	6.883.905.254	9,91%
4	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(22.900.453.173)	(19.633.699.170)	3.266.754.003	16,64%
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(4.774.100.555)	(4.481.529.155)	292.571.400	6,53%
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	(28.589.388.418)	(28.691.974.462)	(102.586.044)	(0,36%)
JUMLAH		(652.703.797.753)	(674.926.246.339)	(22.222.448.586)	(3,29%)

Sedangkan rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.8
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per Eselon I Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/Turun	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	(112.169.913.673)	(123.500.983.747)	11.331.070.074	(9,17)
2	02302	Inspektorat Jenderal	(3.698.852.287)	(468.777.281)	(3.230.075.006)	689,04
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	(435.375.139.328)	(448.703.946.591)	13.328.807.263	(2,97)
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	(10.706.229.636)	(11.562.645.160)	856.415.524	(7,41)
5	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	(23.524.471.973)	(21.661.676.233)	(1.862.795.740)	8,60
6	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	(7.355.480.629)	(4.152.645.070)	(3.202.835.559)	77,13
7	02315	Ditjen Kebudayaan	(16.605.493.971)	(12.656.060.687)	(3.949.433.284)	31,21
8	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	(43.268.216.256)	(50.717.517.814)	7.449.301.558	(14,69)
JUMLAH			(652.703.797.753)	(673.424.252.583)	20.720.454.830	(3,08)
		Transaksi Lanjutan Revaluasi	-	(1.501.993.756)	1.501.993.756	(100,00)
JUMLAH			(652.703.797.753)	(674.926.246.339)	22.222.448.586	(3,29)

Selanjutnya disajikan Mutasi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Tahun 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	(674.926.246.339)
Mutasi tambah:	173.206.984.307
Koreksi Pencatatan	40.425.001
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	4.174.102.705
Penghapusan	584.769.400
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	114.321.191.983
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	4.724.184.963
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	418.661.843
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	76.394.000
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	47.376.865.656
Take In Reval	1.490.388.756
Mutasi kurang:	(150.984.535.721)
Pembelian	(6.237.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(128.682.850.593)
Penyusutan/Amortisasi reguler (BMN yang dihentikan)	(330.652.661)
Penyusutan/Amortisasi Reguler [BMN yang dihentikan]	(6.403.600.842)
Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	(12.096.948.215)
Reklasifikasi Masuk	(3.458.108.410)
Transaksi Normalisasi BMN	(6.138.000)
Saldo per 31 Des 2019	(652.703.797.753)

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp545.381.696.085

KEWAJIBAN

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji sebesar Rp545.381.696.085,- dan Rp664.251.156.922,-. Terjadi penurunan Kewajiban Jangka Pendek sebesar (Rp118.869.460.837,-) atau (17,90%). Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel berikut.

Tabel C.5.1 ...

Tabel C.5.1
Rincian Jenis Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	31 Des 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
Utang kepada Pihak Ketiga	508.057.767.851	508.819.563.523	(761.795.672)	(0,15)
Hibah Yang Belum Disahkan	17.540.476.312	145.333.049.611	(127.792.573.299)	(87,93)
Pendapatan Diterima Dimuka	2.383.551.950	1.405.663.161	977.888.789	69,57
Uang Muka dari KPPN	16.978.861.883	8.424.255.920	8.554.605.963	101,55
Utang Jangka Pendek Lainnya	421.038.089	268.624.707	152.413.382	56,74
Jumlah	545.381.696.085	664.251.156.922	(118.869.460.837)	(17,90)

Selanjutnya dijelaskan masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp508.057.767.851,-

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga merupakan lawan akun dari kas lainnya dan setara kas dan perhitungan akrual antara lain berupa pengeluaran yang belum didistribusikan ke pihak ketiga, belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar, dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp508.057.767.851,- dan Rp508.819.563.523,-. Dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar (Rp761.795.672,-) atau (0,15%).

Sedangkan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga menurut Jenisnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel C.5.2 ...

Tabel C.5.2
Rincian Jenis Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No.	Kewajiban Jangka Pendek	31 Des 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	441.838.136.210	336.197.396.628	105.640.739.582	31,42
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.602.703.466	2.911.562.205	(308.858.739)	(10,61)
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	3.253.250	-	3.253.250	∞
4	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	63.613.674.925	169.710.604.690	(106.096.929.765)	(62,52)
	Jumlah	508.057.767.851	508.819.563.523	(761.795.672)	(0,15)

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Per Eselon-1 per tanggal pelaporan tersaji pada tabel berikut.

Tabel C.5.3
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/Turun	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	105.747.894	12.710.953.407	(12.605.205.513)	(99,17)
2	02302	Inspektorat Jenderal	2.565.024.470	8.088.632.007	(5.523.607.537)	(68,29)
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	8.538.333.566	31.495.718.882	(22.957.385.316)	(72,89)
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	1.554.801.739	16.773.287.889	(15.218.486.150)	(90,73)
5	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	310.095.043	8.487.396.681	(8.177.301.638)	(96,35)
6	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	453.830.621	10.159.505.880	(9.705.675.259)	(95,53)
7	02315	Ditjen Kebudayaan	203.897.985	21.573.394.228	(21.369.496.243)	(99,05)
8	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	494.326.036.533	399.530.674.549	94.795.361.984	23,73
		JUMLAH	508.057.767.851	508.819.563.523	(761.795.672)	(0,15)

Penjelasan Utang kepada pihak ketiga per Eselon I adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp105.747.894,- dengan rincian:

No	Jenis/Satker	Saldo 31 Des 2019	Keterangan (Uraian)	Penyelesaian
A	Belanja Pegawai YMH Dibayar	32.459.650		
1	PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN	24.983.000	Uang makan Desember 2019 yang dibayar dengan DIPA 2020.	Dibayar Januari 2020
2	PUSTEKKOM	7.476.650	Kekurangan Gaji 2019	Dibayar Januari 2021
B	Belanja Barang YMH Dibayar	15.033.398		
3	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN	15.033.398	Langganan daya dan jasa pada Desember 2019 yg belum dibayar	Dibayar Januari 2020
C	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	58.254.846		
4	BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN	58.254.846	Langganan daya dan jasa (listrik & telepon) pada Desember 2019 yg belum dibayar.	Dibayar Januari 2020
Jumlah		105.747.894		

2. Itjen sebesar Rp2.565.024.470,- merupakan Tukin dan Uang Makan Desember 2019. Penyelesaian setelah tanggal neraca, tukin dan uang makan telah dibayarkan pada bulan Januari 2020.
3. Ditjen Dikdasmen sebesar Rp 8.538.333.566,- dengan rincian:

No	Jenis/Satker	Saldo 31 Desember 2019	Keterangan (uraian)	Penyelesaian Setelah Tanggal Neraca
A	Belanja Pegawai YMH Dibayar	5.781.726.735		
1	SEKRETARIAT DITJEN DIKASMEN	27.367.000	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
2	LPMP KALIMANTAN SELATAN	275.300.029	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
3	LPMP KALIMANTAN TIMUR	295.379.012	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
4	LPMP GORONTALO	276.996.190	Potongan Tukin Desember 2019 Akrua	Potong Tukin bulan Januari 2020
5	LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.936.200	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
6	LPMP PROVINSI PAPUA BARAT	209.831.137	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
7	DIREKTORAT PEMBINAAN SMK	598.932.946	Potongan Tukin Desember 2019 Akrua	Potong Tukin bulan Januari 2020
8	LPMP DKI JAKARTA	6.059.487	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
9	LPMP JAWA BARAT	579.467.828	Potongan Tukin Desember 2019 Akrua	Potong Tukin bulan Januari 2020
10	LPMP JAWA TENGAH	9.366.386	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
11	LPMP D.I. YOGYAKARTA	505.669.953	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
12	LPMP JAWA TIMUR	511.072.781	Potongan Tukin Desember 2019 Akrua	Potong Tukin bulan Januari 2020
13	LPMP ACEH	9.500.100	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
14	LPMP RIAU	343.438.132	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
15	LPMP LAMPUNG	388.704.976	Potongan Tukin Desember 2019 Akrua	Potong Tukin bulan Januari 2020
16	LPMP KALIMANTAN BARAT	38.043.857	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
17	LPMP MALUKU	366.493.531	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
18	LPMP BALI	355.085.762	Potongan Tukin Desember 2019 Akrua	Potong Tukin bulan Januari 2020
19	LPMP BENGKULU	8.024.656	Potongan Tukin Desember 2019 Akrua	Potong Tukin bulan Januari 2020
20	LPMP BANTEN	17.825.000	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
21	LPMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	276.473.764	Beban Tukin Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
22	DIREKTORAT PEMBINAAN PK DAN LK	626.873.974	Tunjangan Kinerja Desember 2019 yang dibayarkan pada Januari 2020 untuk 143 Pegawai	Dibayar di Januari 2020
23	DIREKTORAT PEMBINAAN SMP	53.884.034	utang Gaji Atas Nama Yudhistira, Retno Juni, Harnowo Susanto, Diana Herawati dan Sukma Indira	Dibayar di Januari 2020

No	Jenis/Satker	Saldo 31 Desember 2019	Keterangan (uraian)	Penyelesaian Setelah Tanggal Neraca
B	Belanja Barang YMH Dibayar	1.030.001.831		
1	LPMP KALIMANTAN SELATAN	7.592.240	Beban yang Masih Harus Dibayar	Dibayar di Januari 2020
2	LPMP KALIMANTAN TIMUR	78.510.080	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
3	LPMP SULAWESI TENGAH	64.263.932	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
4	LPMP GORONTALO	24.632.940	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
5	LPMP PROVINSI PAPUA BARAT	35.236.988	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
6	LPMP SULAWESI BARAT	71.000	Beban Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
7	LPMP JAWA BARAT	36.924.907	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
8	LPMP JAWA TENGAH	144.816.272	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
9	LPMP D.I. YOGYAKARTA	49.675.027	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
10	LPMP JAWA TIMUR	109.831.950	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
11	LPMP ACEH	23.366.400	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
12	LPMP SUMATERA BARAT	117.904.672	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
13	LPMP LAMPUNG	90.914.137	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
14	LPMP KALIMANTAN TENGAH	63.932.689	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
15	LPMP PAPUA	67.155.926	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
16	LPMP BENGKULU	67.836.230	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
17	LPMP BANTEN	47.336.441	Beban Listrik dan Air bulan Desember 2019 Akrua	Dibayar di Januari 2020
C	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.726.605.000		
1	Direktorat Pembinaan SD	174.480.000	Saldo Rekening BSM Tahun 2013 di Bank BPD NTT	
2	Direktorat Pembinaan SMK	1.552.125.000	Saldo BSM APBNP di BPD	
	Jumlah	8.538.333.566		

4. Ditjen PAUD dan Dikmas sebesar Rp1.554.801.739,- dengan rincian:

No	Jenis/Satker	Saldo 31 Desember 2019	Keterangan (uraian)	Penyelesaian Setelah Tanggal Neraca
A	Belanja Pegawai YMH Dibayar	1.341.889.854		
1	Setditjen PAUD dan Dikmas	1.120.715.053	Kekurangan Tukin Nov & Des 2019 PP PAUD dan Dikmas Jateng	Dibayar bulan Januari 2020
2	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga	1.620.150	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
3	Direktorat Pembinaan PAUD	613.312	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
4	Direktorat Pemb. Pend. Keaksaraan & Kesetaraan	436.340	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
5	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	18.412.000	Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
6	PP PAUD dan Dikmas Jabar	2.899.950	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
7	PP PAUD dan Dikmas Jateng	3.060.300	Kekurangan Gaji Bulan September dan November 2019	Dibayar bulan Januari 2020
8	BP PAUD dan Dikmas Jatim	11.807.099	Kekurangan Gaji dan Tunjangan Fungsional	Dibayar bulan Januari 2020
9	BP PAUD dan Dikmas Sumut	5.278.000	Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
10	BP PAUD dan Dikmas Bengkulu	21.982.000	Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
11	BP PAUD dan Dikmas Sumbar	19.419.000	Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
12	BP PAUD dan Dikmas Sumsel	4.854.463	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
13	BP PAUD dan Dikmas Lampung	18.296.972	Kekurangan Gaji dan Uang Makan Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
14	BP PAUD dan Dikmas DI. Yogya	21.564.150	Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
15	BP PAUD dan Dikmas Kalbar	341.982	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
16	BP PAUD dan Dikmas Sulbar	511.600	Kekurangan Gaji Bulan Agustus 2019	Dibayar bulan Januari 2020
17	BP PAUD dan Dikmas Sulteng	61.127.447	Kekurangan Uang Makan Nov-Des 2019 & kekurangan gaji pegawai	Dibayar bulan Januari 2020
18	BP PAUD dan Dikmas Sultra	27.762.766	Kekurangan Uang Makan Des. 2019 & kekurangan gaji pegawai	Dibayar bulan Januari 2020
19	BP PAUD dan Dikmas Kalteng	1.187.270	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020

No	Jenis/Satker	Saldo 31 Desember 2019	Keterangan (uraian)	Penyelesaian Setelah Tanggal Neraca
B	Belanja Barang YMH Dibayar	212.911.885		
1	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga	243.806	Tagihan Telepon Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
2	PP PAUD dan Dikmas Jabar	28.849.892	Tagihan Listrik, Air dan Telepon Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
3	PP PAUD dan Dikmas Jateng	43.893.664	Tagihan Listrik, dan Telepon Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
4	BP PAUD dan Dikmas Kalsel	49.952.376	Tagihan Listrik, Air, Internet dan Telepon Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
5	BP PAUD dan Dikmas Papua	3.714.600	Tagihan Air Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
6	BP PAUD dan Dikmas Bengkulu	5.469.051	Tagihan Listrik, dan Telepon Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
7	BP PAUD dan Dikmas Aceh	11.785.324	Tagihan Listrik, dan Telepon Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
8	BP PAUD dan Dikmas Sumbar	10.192.362	Tagihan Listrik, dan Internet Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
9	BP PAUD dan Dikmas DI. Yogya	15.042.536	Tagihan Listrik, dan Telepon Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
10	BP PAUD dan Dikmas Bali	16.309.595	Tagihan Listrik, Internet dan Telepon Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
11	BP PAUD dan Dikmas Kaltim	478.497	Tagihan Air Bulan Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
12	BP PAUD dan Dikmas Sulbar	8.430.782	Tagihan Listrik, Air dan Telepon Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
13	BP PAUD dan Dikmas Kalteng	18.549.400	Tagihan Listrik, Internet, Air dan Telepon Desember 2019	Dibayar bulan Januari 2020
Jumlah		1.554.801.739		

5. Balitbang sebesar Rp310.095.043,- dengan rincian :

No	Jenis/Satker	Saldo 31 Desember 2019	Keterangan (uraian)	Penyelesaian Setelah Tanggal Neraca
A	Belanja Pegawai YMH Dibayar	57.039.920		
1	Sekretariat Balitbang	2.958.047	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
2	Puslitjakdikbud	9.404.150	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
3	Puskur	8.241.347	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
4	Puspendik	18.044.617	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
5	Puslit Arkenas	1.127.211	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
6	Balar Sumut	2.053.710	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
7	Balar Sumatera Selatan	5.855.568	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
8	Balar DI Yogyakarta	108.126	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
9	Balar Bali	2.393.144	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
10	Balar Jayapura	6.854.000	Pembayaran kekurangan gaji 2019	Dibayar di bulan Februari 2020
B	Belanja Barang YMH Dibayar	253.055.123		
1	Sekretariat Balitbang	7.627.366	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
2	Puskur	70.461.225	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
3	Puspendik	95.474.015	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
4	Puslit Arkenas	25.820.464	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
5	Balar Sumatera Utara	8.248.109	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
6	Balar Sumatera Selatan	5.769.032	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
7	Balar Jabar	5.159.180	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
8	Balar DI Yogyakarta	9.689.765	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
9	Balar Bali	9.552.096	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
10	Balar Kalsel	5.834.373	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
11	Balar Sulawesi Selatan	6.328.420	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
12	Balar Sulawesi Utara	82.710	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Januari 2020
13	Balar Jayapura	3.008.368	Tagihan bulan Desember 2019	Dibayar di bulan Februari 2020
Jumlah		310.095.043		

6. Badan Bahasa sebesar Rp453.830.621,- dengan rincian :

No	Jenis/Satker	Saldo 31 Desember 2019	Keterangan (uraian)	Penyelesaian Setelah Tanggal Neraca
A	Belanja Pegawai YMH Dibayar	133.913.848		
1	Sekretariat Badan Pengemb. & Pembinaan Bahasa	224.004	Kekurangan gaji kenaikan pangkat pegawai	Telah dibayar di Januari 2020
2	Balai Bahasa Jawa Barat	21.479.250	Uang makan dan lembur bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
3	Balai Bahasa Jawa Tengah	1.350.944	Kekurangan gaji bulan April–November 2019	Telah dibayar di Januari 2020
4	Kantor Bahasa Lampung	15.916.650	Uang makan bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
5	Kantor Bahasa Jambi	22.730.000	Uang makan bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
6	Kantor Bahasa Kalimantan Timur	5.951.000	Uang makan bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
7	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	22.390.000	Uang makan bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
8	Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung	6.355.000	Uang makan bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
9	Kantor Bahasa Kepulauan Riau	10.396.000	Uang makan dan lembur bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
10	Kantor Bahasa Maluku Utara	9.731.000	Uang makan bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
11	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur	17.390.000	Uang makan bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
B	Belanja Barang YMH Dibayar	319.916.773		
1	Sekretariat Badan Pengemb. & Pembinaan Bahasa	92.031.263	Pemakaian listrik dan telepon bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
2	Balai Bahasa Sumatera Barat	7.522.100	Pemakaian listrik dan telepon bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
3	Balai Bahasa Kalimantan Selatan	1.063.900	Pemakaian air bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
4	Balai Bahasa Jawa Timur	6.591.505	Pemakaian listrik dan telepon bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
5	Balai Bahasa Jawa Tengah	7.873.421	Pemakaian listrik dan telepon bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
6	Balai Bahasa Sulawesi Utara	164.817.500	Belanja jasa dan honorarium yang belum terbayar di bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
7	Kantor Bahasa Lampung	6.839.573	Pemakaian listrik, telepon, dan air bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
8	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	1.024.550	Pemakaian air bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
9	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara	8.603.490	Pemakaian listrik dan telepon bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
10	Kantor Bahasa Bengkulu	854.539	Pemakaian telepon bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
11	Kantor Bahasa Kepulauan Riau	15.840.000	Langganan internet bulan Desember 2019	Telah dibayar di Januari 2020
12	Kantor Bahasa Kalimantan Timur	4.276.500	Beban Langganan Listrik, Telepon dan Air Des 2019	Telah dibayar di Januari 2020
13	Kantor Bahasa Maluku Utara	2.578.432	Beban Langganan Listrik Des 2019	Telah dibayar di Januari 2020
	Jumlah	453.830.621		

7. Ditjen Kebudayaan sebesar Rp203.897.985,- dengan rincian:

No	Kode Satker	Jenis/Satker	Saldo 31 Desember 2019	Keterangan (uraian)	Penyelesaian Setelah Tanggal Neraca
A		Belanja Pegawai YMH Dibayar	135.984.895		
1	189643	Sekretariat Direktorat Ditjen Kebudayaan	20.618.840	kekurangan tukin Desember 2019 sebesar 18.452.240 dan gaji berkala sebesar 2.166.600	Dibayar Maret 2020
2	189646	Direktorat Kepercayaan TYME dan Tradisi	3.773.000	Kekurangan pembayaran uang makan PNS	Dibayar Januari 2020
3	025226	Museum Kepresidenan Balai Kirti	867.380	kekurangan gaji pegawai atas nama Erti Panestiati	Dibayar April 2020
4	427775	Balai Konservasi Borobudur	49.523.000	Kekurangan pembayaran uang makan PNS	Dibayar Januari 2020
5	427818	Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan	12.256.922	kekurangan gaji kenaikan pangkat pengabdian PNS sebanyak 25 orang	Dibayar Jan. & Feb. 2020
6	427842	Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I.Yogyakarta	855.648	Kekurangan pembayaran gaji PNS	Dibayar Februari 2020
7	189644	Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman	7.565.105	Kekurangan pembayaran gaji PNS	Dibayar Januari 2020
8	189645	Direktorat Kesenian	40.525.000	Kekurangan pembayaran uang makan PNS	Dibayar pada Januari 2020
B		Belanja Barang YMH Dibayar	33.443.090		
1	189643	Sekretariat Direktorat Ditjen Kebudayaan	8.672.348	tagihan telkom Desember 2019 yang belum dibayar	Dibayar pada Januari 2020
2	427842	Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I.Yogyakarta	13.817.703	Langganan telepon sebesar 888.981, listrik sebesar 11.716.222 dan air sebesar 1.212.500	Dibayar pada Januari 2020
3	526019	Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat	7.721.950	Langganan listrik sebesar 6.011.700, air sebesar 1.636.100 dan telepon sebesar 74.150	Dibayar pada Januari 2020
4	606408	Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua	3.231.089	Langganan listrik sebesar 1.903.389 dan telepon sebesar 1.327.700	Dibayar pada Januari 2020
C		Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	34.470.000		
1	189643	Sekretariat Direktorat Ditjen Kebudayaan	34.470.000	honorarium kegiatan yang belum dibayarkan	Dibayar pada Januari 2020
	Jumlah		203.897.985		

8. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp494.326.036.533,-
dengan rincian:

No	Jenis/Satker	31-Dec-19	Penyelesaian	Saldo setelah	Keterangan (uraian)
A	Belanja Pegawai YMH Dibayar	431.790.096.838	(431.790.096.838)	-	
1	SEKRETARIAT DITJEN GTK	136.360.218	(136.360.218)		Kekurangan pembayaran tunj 2019, kenaikan gaji dan pangkat.
2	DIREKTORAT PEMB. GURU & TENDIK PAUD-DIKMAS	4.712.001.563	(4.712.001.563)		- Kekurangan Gaji dan Uang Makan PNS yang sudah diselesaikan pada Januari 2020 (26.174.963) & CO Tunjangan Progresi Guru Non PNS TK/PLB 2019 (4.685.826.600)
3	DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR	175.012.943.400	(175.012.943.400)		- CO Tunjangan Profesi Guru non-PNS Dikdas tahun 2019
4	DIREKTORAT PEMB. GURU DIKMAN & DIKSUS	79.667.898.500	(79.667.898.500)		- CO Tunjangan Profesi Guru non-PNS Dikman tahun 2019
5	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN	171.938.925.120	(171.938.925.120)		- CO Tunjangan Profesi Kepala Sekolah non-PNS tahun 2019
6	PPPPTK MATEMATIKA YOGYAKARTA	1.498.900	(1.498.900)		- Kekurangan pembayaran gaji pokok 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
7	PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA JAKARTA	174.199.000	(174.199.000)		- Kekurangan pembayaran uang makan 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
8	PPPPTK BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA MALANG	44.227.000	(44.227.000)		- Kekurangan pembayaran uang makan 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
9	PPPPTK BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI BANDUNG	91.908.000	(91.908.000)		- Kekurangan pembayaran uang makan 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
10	LEMBAGA PENGEMB. & PEMBERD. KEPALA SEKOLAH (LPPKS)	10.135.137	(10.135.137)		- Kekurangan pembayaran gaji pokok 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
B	Belanja Barang YMH Dibayar	738.341.366	(738.341.366)	-	
1	DIREKTORAT PEMB. GURU & TENDIK PAUD-DIKMAS	908.176	(908.176)		- Tagihan telepon 2019 dan sudah diselesaikan pada Januari-Februari 2020
2	PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG	52.333.740	(52.333.740)		- Tagihan telepon dan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
3	PPPPTK PERTANIAN CIANJUR	61.202.730	(61.202.730)		- Tagihan telepon dan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
4	PPPPTK PEND. KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG	34.035.267	(34.035.267)		- Tagihan air, telepon dan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
5	PPPPTK PENJAS DAN BIMBINGAN KONSELING JAKARTA	51.776.356	(51.776.356)		- Tagihan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Januari-Februari 2020
6	PPPPTK MATEMATIKA YOGYAKARTA	43.287.940	(43.287.940)		- Tagihan telepon dan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Januari-Februari 2020
7	PPPPTK ILMU PENGETAHUAN ALAM BANDUNG	48.983.333	(48.983.333)		- Tagihan telepon dan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Januari-Februari 2020
8	PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA JAKARTA	125.733.648	(125.733.648)		- Tagihan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Januari-Februari 2020
9	PPPPTK BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA MALANG	48.601.304	(48.601.304)		- Tagihan telepon dan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Januari-Februari 2020
10	PPPPTK BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI BANDUNG	74.168.333	(74.168.333)		- Tagihan telepon dan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Januari-Februari 2020
11	PPPPTK BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK MEDAN	66.543.499	(66.543.499)		- Tagihan air, telepon dan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
12	LEMBAGA PENGEMB. & PEMBERD. KEPALA SEKOLAH (LPPKS)	39.302.040	(39.302.040)		- Tagihan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Januari-Februari 2020
13	LPPPTK BID. KELAUTAN, PERIKANAN, TIK GOWA	91.465.000	(91.465.000)		- Tagihan internet dan listrik 2019 dan sudah diselesaikan pada Jan-Feb 2020
C	Belanja Modal YMH Dibayar	3.253.250	(3.253.250)	-	
1	PPPPTK Bahasa Jakarta	3.253.250	(3.253.250)		- Kekurangan Pembayaran Konsultan Perencanaan
C	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	61.794.345.079	(61.794.345.079)	-	
1	DIREKTORAT PEMB. GURU DAN TENDIK PAUD-DIKMAS	21.753.911.378	(21.753.911.378)		- Tunj. Profesi, Khusus, Insentif & Bantuan Kualifikasi yg masih ada di saldo Bank penyalur
2	DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR	12.974.173.814	(12.974.173.814)		- Tunjangan guru yang belum disalurkan pada saldo rekening penyalur
3	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN	27.021.528.887	(27.021.528.887)		- Tunjangan yang belum diterima oleh guru kepala sekolah pada saldo rekening penyalur
4	PPPPTK PEND. KEWARGANEGARAAN & IPS MALANG	1.320.500	(1.320.500)		- Honor narasumber di rekening Bendahara Penerimaan dan sudah disalurkan pada Jan-Feb 2020
5	DINAS PEND. PEMUDA & OLAH RAGA PROV. KEP. RIAU	5.610.500	(5.610.500)		- Honor keg. yg berada di Bendahara Pengeluaran & sudah disalurkan pada Jani-Feb. 2020
6	PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA	37.800.000	(37.800.000)		- Pembayaran honor yang ditangguhkan krn belum BAST
	Jumlah	494.326.036.533	(494.326.036.533)	-	

Hibah langsung
yang belum
disahkan
Rp17.540.476.312,-

C.5.2 Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Hibah langsung yang belum disahkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.540.476.312,- dan Rp145.333.049.611,-. Yang terdapat pada Sekretariat Balitbang berupa Hibah langsung bentuk jasa berupa jasa Bantuan Teknis dari pemerintah Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* untuk kegiatan INOVASI bagi Anak Sekolah Indonesia dengan nomor register hibah 25UKZMYA tanggal 8 September 2019. Hibah ini digunakan dalam rangka bantuan teknis untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar khususnya kemampuan membaca dan berhitung.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp2.383.551.950,-

C.5.3 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan ini dapat berupa kelebihan Pembayaran PNBPN untuk masa melebihi tanggal pelaporan, dan lain-lain.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.383.551.950,- dan Rp1.405.663.161,-.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Eselon I tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.5.4
Rincian Pendapatan Diterima di Muka Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/(Turun)	%
023.01	Sekretariat Jenderal	2.242.605.971	1.318.516.413	924.089.558	70,09
023.03	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	17.044.686	11.666.673	5.378.013	46,10
023.05	Ditjen PAUD Dikmas	9.059.900	-	9.059.900	∞
023.13	Badan Pengembangan dan Pembinaan	39.773.333	14.309.750	25.463.583	177,95
023.15	Ditjen Kebudayaan	31.189.560	28.239.075	2.950.485	10,45
023.16	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	43.878.500	32.931.250	10.947.250	33,24
JUMLAH		2.383.551.950	1.405.663.161	977.888.789	69,57

Jenis Pendapatan Diterima Di Muka pada satuan kerja antara lain adalah :

- Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya diterima di muka;
- Pendapatan sewa ATM diterima di muka;
- Pendapatan sewa peralatan dan mesin diterima di muka;
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan diterima di muka;
- Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya diterima di muka.

Penjelasan rinci Pendapatan Diterima Di Muka per Eselon-1 adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal, sebesar Rp2.242.605.971,- merupakan pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa gedung dan bangunan (kantin, ATM, Bank) yang dikelola oleh satker Biro Umum;
- Ditjen Dikdasmen sebesar Rp17.044.686,- merupakan pendapatan sewa untuk gedung kantin pada LPMP Kalimantan Barat sebesar Rp13.711.350,- dan sewa ruangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Cipete yang jangka kontraknya lebih dari setahun sebesar Rp3.333.336,-
- Ditjen PAUD Dikmas Rp9.059.900,- merupakan sewa bangunan untuk TK dan TPA pada satker PP PAUD Jawa Tengah;
- Badan Bahasa Rp39.773.333,- merupakan pendapatan sewa ruangan untuk tempat mesin ATM BNI pada satker Sekretariat Badan Bahasa;
- Ditjen Kebudayaan Rp31.189.560,- dengan rincian:

No	Kode Satker	Nama Satker	Tanggal Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Saldo Per 31 Desember 2019	Keterangan
1	427832	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	17 Mei 2019	7.191.544	1 Tahun	1.198.590	Pendapatan sewa tanah di kawasan candi gedongsongo periode maret 2019 - februari 2020 sebesar Rp1.198.590,-.
			17 Mei 2019	17.554.625	1 Tahun	2.925.770	Pendapatan sewa tanah di kawasan candi sewa tanah dieng wonosobo periode maret 2019 - februari 2020 sebesar Rp2.925.770,-.
			17 Mei 2019	162.391.200	1 Tahun	27.065.200	Pendapatan sewa tanah di kawasan dieng banjarnegara maret 2019 - februari 2020 sebesar Rp27.065.200,-.
Jumlah				187.137.369		31.189.560	

6. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp43.878.500,- merupakan sewa lahan untuk penempatan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada PPPPTK Pertanian Cianjur sebesar Rp18.814.250,- dan PPPPTK BMTI sebesar Rp25.064.250,-.

Uang Muka dari
KPPN
Rp16.978.861.883,-

C.5.4 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp16.978.861.883,- dan sebesar Rp8.424.255.920,-. Tidak ada perbedaan saldo antara uang muka dari KPPN dengan Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.5.5
Rincian Uang Muka dari KPPN Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Kode	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	02301	Sekretariat Jenderal	15.838.277.847	7.785.952.817	8.052.325.030	103,42
2	02302	Inspektorat Jenderal	19.781.700	-	19.781.700	∞
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	102.831.050	17.404.100	85.426.950	490,84
4	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	22.060.000	-	22.060.000	∞
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	67.303.776	128.207.110	-60.903.334	(47,50)
6	02313	Badan Pembinaan Bahasa & Perbukuan	36.047.510	-	36.047.510	∞
7	02315	Ditjen Kebudayaan	4.773.000	265.491.893	-260.718.893	(98,20)
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	887.787.000	227.200.000	660.587.000	290,75
JUMLAH			16.978.861.883	8.424.255.920	8.554.605.963	101,55

Berikut perkembangan penyeteroran Uang Muka dari KPPN ke Kas Negara dan saldo kas setelah tanggal Neraca dapat dilihat pada table dibawah ini:

No.	Kode	Eselon I	Saldo 31 Des 2019	Penyetoran	Saldo Setelah Tanggal Neraca
1	02301	Sekretariat Jenderal	15.838.277.847	1.523.675.000	14.314.602.847
2	02302	Inspektorat Jenderal	19.781.700	19.781.700	-
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	102.831.050	102.831.050	-
4	02305	Ditjen PAUD dan Dikmas	22.060.000	22.060.000	-
5	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	67.303.776	67.303.776	-
6	02313	Badan Pembinaan Bahasa & Perbukuan	36.047.510	36.047.510	-
7	02315	Ditjen Kebudayaan	4.773.000	4.773.000	-
8	02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	887.787.000	887.787.000	-
Jumlah			16.978.861.883	2.664.259.036	14.314.602.847

Sedangkan untuk Eselon I Setjen yang merupakan saldo UP/TUP pada satker Atdikbud (18 satker) sesuai ketentuan tidak perlu disetorkan ke kas negara karena akan diperhitungkan sebagai pengurang UP/TUP Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	NAMA SATKER	UP	PENYETORAN	SISA
414593	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI TOKYO	208.070.168		208.070.168
414607	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI WASHINGTON DC	455.464.319		455.464.319
414613	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI CANBERRA	138.434.221		138.434.221
414622	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI BANGKOK	266.400.154		266.400.154
414638	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI DEN HAAG	163.286.984		163.286.984
414644	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI KUALA LUMPUR	3.085.524.622		3.085.524.622
414650	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI BERLIN	1.044.169.306		1.044.169.306
414669	KANTOR DUBES / WRI UNESCO PARIS DI PARIS	651.512.624		651.512.624
414681	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI CAIRO	1.999.632.994		1.999.632.994
414690	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI PARIS	175.339.430		175.339.430
503121	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI LONDON	218.991.211		218.991.211
503135	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI PORT MORESBY	2.502		2.502
503142	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI MANILA	485.289.192		485.289.192
503143	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI DILI	741.771.956		741.771.956
512684	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI RIYADH	3.977.771.984		3.977.771.984
681816	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI BEIJING	87.803.442		87.803.442
681820	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI NEW DELHI	33.030.722		33.030.722
690349	KANTOR ATASE PENDIDIKAN KBRI SINGAPURA	582.101.873		582.101.873
Jumlah		14.314.597.704	-	14.314.602.847

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp421.038.089,-

C.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, maupun Uang

Muka dari KPPN. Utang jangka pendek lainnya yang terdapat pada satker antara lain utang pajak, belanja barang dan jasa yang belum dibayar.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp421.038.089,- dan sebesar Rp268.624.707,-. Seluruh saldo Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran dengan rincian per eselon-1 sebagaimana tabel berikut:

Tabel C.5.6
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	40.447.855	239.872.905	(199.425.050)	(83,14)
2	Ditjen Dikdasmen	1.414.408	-	1.414.408	∞
3	Badan Penelitian Dan Pengembangan	252.505.418	13.162.918	239.342.500	1.818,31
4	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	126.670.408	15.588.884	111.081.524	712,57
JUMLAH		421.038.089	268.624.707	152.413.382	56,74

1. Pada Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp40.447.855,- merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang disetor setelah 31 Desember 2019 terdapat pada satker Pusat Pengembangan Perfilman Rp12.585.650,- dan LSF sebesar Rp27.862.205;
2. Pada Eselon I Ditjen Dikdasmen sebesar Rp1.414.408,- merupakan pajak yang telah disetor pada satker Direktorat Pembinaan SD;
3. Pada Eselon I Balitbang, merupakan pajak yang belum disetorkan pada satker Pusat Penilaian Pendidikan sebesar Rp242.688.218,- dan Balai Arkeologi Ambon sebesar Rp9.817.200,- dan seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara;
4. Pada Eselon I Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp126.670.408,- merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan pada satker PPPPTK Bahasa sebesar Rp105.469.408,- dan seluruhnya telah di setor ke Kas Negara. Sedangkan pada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta sebesar Rp21.201.000,- merupakan pembayaran pajak honor ke Dinas TA 2019 yang disetor TA 2020.

Ekuitas

Rp28.119.316.594.649,-

C.6.EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.119.316.594.649,- dan Rp14.107.304.271.629,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C.7. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Pada Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* ini dilakukan *take in revaluasi* aset tahun 2017 dan 2018 dan telah disajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN (Revaluasi Aset) tahun 2017 dan 2018 beserta perbaikannya pada tahun 2019. Berikut hasil Rekonsiliasi Internal antara Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan atas data Barang Milik Negara Per 31 Desember 2019 (*Audited*):

Uraian Akun		Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
A	ASET LANCAR	366.768.189.689	366.768.189.689	-
1	Persediaan	366.768.189.689	366.768.189.689	-
B	ASET TETAP	25.186.644.566.148	25.185.910.617.510	733.948.638
1	Tanah	16.811.909.997.257	16.811.909.997.257	-
2	Peralatan dan Mesin	3.696.121.667.905	3.696.121.667.905	-
3	Gedung dan Bangunan	6.679.857.570.435	6.679.857.570.435	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.803.858.914	268.803.858.914	-
5	Aset Tetap Lainnya	407.805.021.259	407.805.021.259	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	563.946.376.700	563.946.376.700	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.241.799.926.322)	(3.242.533.874.960)	733.948.638
C	ASET LAINNYA	179.648.351.440	179.648.351.440	-
1	Aset Tak Berwujud	259.992.096.164	259.992.096.164	-
2	Aset Lain-Lain	572.360.053.029	572.360.053.029	-
3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(652.703.797.753)	(652.703.797.753)	-
D	Total Intrakomptabel (A+B+C)	25.733.061.107.277	25.732.327.158.639	733.948.638
E	Ekstra Komptabel	9.009.288.384	-	9.009.288.384
1	Peralatan dan Mesin	25.554.230.235	-	25.554.230.235
2	Gedung dan Bangunan	305.096.111	-	305.096.111
3	Aset Lain-lain	11.874.300	-	11.874.300
4	Aset Lain-Lain/Aset Yang Tidak Digunakan	1.589.387.235	-	1.589.387.235
5	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel	(18.451.299.497)	-	(18.451.299.497)
F	Total Gabungan (D+E)	25.742.070.395.661	25.732.327.158.639	9.743.237.022

Penjelasan selisih Laporan BMN dan Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. Selisih laporan akun Akumulasi Penyusutan sebesar Rp733.948.638,- merupakan selisih saldo awal BMN yang terjadi pada satker LPMP Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan

Sumatera Selatan hal ini terjadi pada aplikasi e Rekon LK yang tidak bisa terupdate, yang mana pada neraca satker di SIMAK telah sesuai. Atas permasalahan selisih ini Kemendikbud telah bersurat kepada Direktur Barang Milik Negara, DJKN Kemenkeu nomor : 26274/A2/KU/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Permohonan Open Period Saldo Awal BMN, tetapi sampai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*) ini belum ada kebijakan dari Kemenkeu untuk dapat melakukan *update* saldo awal BMN.

- b. Selisih sebesar Rp9.827.659.435,- merupakan akun Ekstra Komptabel yang hanya tercatat di Laporan BMN.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada Tahun Anggaran 2019 Kemendikbud memiliki Pendapatan Operasional sebesar Rp68.498.359.813,- yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, jumlah Beban Operasional Sebesar Rp36.842.905.354.116,- sehingga defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp36.774.406.994.303,-). Dari Kegiatan Non Operasional terdapat surplus sebesar Rp240.609.412.630,-. Dengan demikian Laporan Operasional defisit sebesar (Rp36.533.797.581.673,-).

Selanjutnya disajikan ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Tabel D.1
Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	68.498.359.813	43.276.250.197	25.222.109.616	58,28
JUMLAH PENDAPATAN	68.498.359.813	43.276.250.197	25.222.109.616	58,28
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	8.941.451.705.996	8.184.014.047.635	757.437.658.361	9,26
Beban Persediaan	83.365.759.026	85.770.162.444	(2.404.403.418)	(2,80)
Beban Barang dan Jasa	4.640.975.935.432	5.153.016.826.382	(512.040.890.950)	(9,94)
Beban Pemeliharaan	321.639.704.733	330.271.538.530	(8.631.833.797)	(2,61)
Beban Perjalanan Dinas	3.955.091.310.537	4.119.141.569.418	(164.050.258.881)	(3,98)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	9.053.405.336.455	12.700.561.529.708	(3.647.156.193.253)	(28,72)
Beban Bantuan Sosial	9.216.714.720.340	11.839.377.941.500	(2.622.663.221.160)	(22,15)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	630.249.609.436	524.507.332.120	105.742.277.316	20,16
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	11.272.161	60.039.183	(48.767.022)	(81,23)
JUMLAH BEBAN	36.842.905.354.116	42.936.720.986.920	(6.093.815.632.804)	(14,19)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(36.774.406.994.303)	(42.893.444.736.723)	6.119.037.742.420	14,27
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(82.097.733.975)	(77.725.496.213)	(4.372.237.762)	(5,63)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	322.707.146.605	96.964.257.286	225.742.889.319	232,81
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	240.609.412.630	19.238.761.073	221.370.651.557	1.150,65
SURPLUS/DEFISIT - LO	(36.533.797.581.673)	(42.874.205.975.650)	6.340.408.393.977	14,79

LO Kemendikbud mengalami defisit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar (Rp36.533.797.581.673,-) dan (Rp42.874.205.975.650,-). Terjadi penurunan defisit sebesar Rp6.340.408.393.977,-. Penyebab penurunan defisit LO ini dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp25.222.109.616,- dan penurunan Beban Operasional yang disebabkan adanya penurunan realisasi belanja pada tahun 2019.

Pendapatan PNB
Rp68.498.359.813,-

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp68.498.359.813,- dan Rp43.276.250.197,-. Terdapat kenaikan Pendapatan sebesar Rp25.222.109.616,- atau 58,28% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per jenis pendapatan sebagaimana disajikan di bawah ini :

Tabel D.2
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran	26.449.121.727	19.081.624.035	7.367.497.692	38,61
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25.158.801.727	17.054.824.783	8.103.976.944	47,52
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	56.420.000	25.527.000	30.893.000	121,02
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.350.000	-	2.350.000	∞
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	25.000.000	(25.000.000)	(100,00)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	1.225.550.000	1.976.272.252	(750.722.252)	(37,99)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6.000.000	-	6.000.000	∞
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya Riset Teknologi	20.473.889.872	6.555.785.432	13.918.104.440	212,30
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	12.245.260.510	-	12.245.260.510	∞
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.807.020.000	1.089.495.000	717.525.000	65,86
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	208.404.965	144.097.567	64.307.398	44,63
425451	Pendapatan Museum	2.185.892.000	2.168.623.000	17.269.000	0,80
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	4.027.312.397	3.153.569.865	873.742.532	27,71
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	48.923	-	48.923	∞
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	48.923	-	48.923	∞
4257	Pendapatan Bunga pengelolaan Rekening bank dan Pengelolaan Keuangan	10.862.533.915	11.396.394.018	(533.860.103)	(4,68)
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	-	400.141.501	(400.141.501)	(100,00)
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	1.151.712	-	1.151.712	∞
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.861.382.203	10.969.477.616	(108.095.413)	(0,99)
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	6.774.902	(6.774.902)	(100,00)
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	19.999.999	(19.999.999)	(100,00)
4258	Pendapatan Denda	5.673.474.704	2.750.474.879	2.922.999.825	106,27
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.673.474.704	2.736.602.879	2.936.871.825	107,32
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	13.872.000	(13.872.000)	(100,00)
4259	Pendapatan Lain-lain	5.039.290.672	3.491.971.833	1.547.318.839	44,31
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	59.270.004	14.175.854	45.094.150	318,11
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	4.980.020.668	3.477.795.979	1.502.224.689	43,19
Jumlah		68.498.359.813	43.276.250.197	25.222.109.616	58,28

Realisasi PNBPN Lainnya per jenis pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha Sebesar Rp26.449.121.727,- berupa sewa pemanfaatan BMN, dengan rincian per eselon 1 sebagai berikut:

Tabel D.3
Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha Periode 31 Desember 2019

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	3.811.746.187
2	02302	Inspektorat Jenderal	72.000.000
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	12.366.474.687
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	1.859.941.132
5	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	418.572
6	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	27.314.417
7	02315	Ditjen Kebudayaan	1.559.865.974
8	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	6.751.360.758
JUMLAH			26.449.121.727

- b. Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya Riset Teknologi Sebesar Rp20.473.889.872,- antara lain berupa karcis museum, pendapatan dari pendidikan dan latihan, dan pendapatan dari uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), dengan rincian per Eselon 1 sebagai berikut:

Tabel D.4
Rincian Pendapatan Pendidikan, Budaya Riset Teknologi Periode 31 Desember 2019

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	4.581.723.000
2	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	3.242.260
3	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	2.015.424.965
4	02315	Ditjen Kebudayaan	6.213.204.397
5	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	7.660.295.250
JUMLAH			20.473.889.872

- c. Pendapatan jasa lainnya sebesar Rp48.923,- terdapat pada Eselon I Setjen Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp10.862.533.915,- berupa Pendapatan dari Penutupan Rekening, dan Pendapatan Jasa Giro dengan rincian per Eselon 1 sebagai berikut:

Tabel D.5

Tabel D.5

Rincian Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Bank
dan Pengelolaan Keuangan Periode 31 Desember 2019

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	3.554
2	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	5.094.789.226
3	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	529.646.257
4	02311	Badan Penelitian Dan Pengembangan	588.308.784
5	02315	Ditjen Kebudayaan	1.402.650
6	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	4.648.383.444
JUMLAH			10.862.533.915

- e. Pendapatan Denda sebesar Rp5.673.474.704,- berupa Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, rincian per Eselon 1 sebagai berikut:

Tabel D.6

Rincian Pendapatan Denda Periode 31 Desember 2019

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)
1	02301	Sekretariat Jenderal	1.146.588.933
2	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	3.045.768.881
3	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	471.132.594
4	02311	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.242.690
5	02313	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	2.215.481
6	02315	Ditjen Kebudayaan	339.883.237
7	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	662.642.888
JUMLAH			5.673.474.704

- f. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp5.039.290.672,- dengan rincian per Eselon 1 sebagai berikut:

Tabel D.7

Rincian Pendapatan Lain-lain Periode 31 Desember 2019

No.	Kode	Eselon I	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	02301	Sekretariat Jenderal	4.954.029.783	Pendapatan jasa lainnya dari satker Atase Dikbud berupa setoran atas selisih data SPAN dan SIMKEU Kemlu. Karena tidak diketahui ada selisih tersebut dan bukan termasuk UP/TUP.
2	02302	Inspektorat Jenderal	44.800.000	Pengembalian kelebihan pembayaran gaji CPNS angkatan 2018 sebanyak 64 orang.
3	02303	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	30.191.292	Penerimaan kembali/persekot uang muka gaji pegawai
4	02305	Ditjen PAUD Dan Pendidikan Masyarakat	80.322	Penerimaan kembali/persekot uang muka gaji pegawai
5	02313	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	982	Penerimaan kembali/persekot uang muka gaji pegawai
6	02315	Ditjen Kebudayaan	10.005.140	Penerimaan kembali/persekot uang muka gaji pegawai satker BPCB Sulawesi Selatan
7	02316	Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	183.153	Setoran Dinas Pendidikan Kalimantan Timur.
JUMLAH			5.039.290.672	

Di bawah ini disajikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.8
Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	14.494.140.380	6.885.367.473	7.608.772.907	110,51
2	Inspektorat Jenderal	116.800.000	72.000.000	44.800.000	62,22
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	20.540.466.346	14.632.082.459	5.908.383.887	40,38
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	2.860.800.305	2.364.711.959	496.088.346	20,98
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	593.970.046	489.292.609	104.677.437	21,39
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	2.044.955.845	1.308.246.952	736.708.893	56,31
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	8.124.361.398	6.829.003.788	1.295.357.610	18,97
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	19.722.865.493	10.695.544.957	9.027.320.536	84,40
Jumlah		68.498.359.813	43.276.250.197	25.222.109.616	58,28

Beban Pegawai
Rp8.941.451.705.996,-

D.2.Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.941.451.705.996,- dan sebesar Rp8.184.014.047.635,-. Terdapat kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp757.437.658.361,- atau 9,26% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Beban pegawai terbesar adalah beban Tunjangan Pofesi Guru pada Ditjen GTK sebesar Rp6.750.880.257.301,-.

Rincian Beban Pegawai untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9 ...

Tabel D.9
Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
5111	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.242.608.185.510	7.448.691.799.535	(6.206.083.614.025)	(83,32)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	767.179.021.716	737.960.227.953	29.218.793.763	3,96
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10.673.536	10.032.068	641.468	6,39
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	57.004.079.775	55.021.806.640	1.982.273.135	3,60
511122	Beban Tunj. Anak PNS	16.554.201.819	16.048.168.320	506.033.499	3,15
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	14.605.685.893	14.505.103.500	100.582.393	0,69
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	46.063.747.511	47.218.846.562	(1.155.099.051)	(2,45)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	4.303.991.057	4.213.577.279	90.413.778	2,15
511126	Beban Tunj. Beras PNS	38.293.908.920	39.004.672.470	(710.763.550)	(1,82)
511129	Beban Uang Makan PNS	91.351.499.946	91.776.974.523	(425.474.577)	(0,46)
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	1.045.787.523	97.116.650.070	(96.070.862.547)	(98,92)
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	625.000	469.250.896.200	(469.250.271.200)	(100,00)
511136	Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan pada Sekolah/ PT	-	396.261.108.000	(396.261.108.000)	(100,00)
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	1.406.100.000	1.310.850.000	95.250.000	7,27
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	29.176.013.479	34.921.262.550	(5.745.249.071)	(16,45)
511152	Beban Tunjangan Profesi Guru	175.612.849.335	5.374.803.873.400	(5.199.191.024.065)	(96,73)
511156	Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen	-	69.267.750.000	(69.267.750.000)	(100,00)
5115	Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	6.750.880.257.301	10.126.205.916	6.740.754.051.385	66,567,42
511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	40.948.700	37.798.800	3.149.900	8,33
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	71.500.000	66.000.000	5.500.000	8,33
511519	Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	10.040.876.659	10.022.407.116	18.469.543	0,18
511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	5.990.551.203.557	-	5.990.551.203.557	∞
511529	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya	750.175.728.385	-	750.175.728.385	∞
5121	Beban Honorarium	-	541.800.000	(541.800.000)	(100,00)
512111	Beban Uang Honor Tetap	0	541.800.000	(541.800.000)	(100,00)
5122	Beban Lembur	6.132.222.050	8.110.984.650	(1.978.762.600)	(24,40)
512211	Beban Uang Lembur	6.132.222.050	8.110.984.650	(1.978.762.600)	(24,40)
5124	Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	941.831.041.135	716.543.257.534	225.287.783.601	31,44
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	941.568.772.982	715.165.827.668	226.402.945.314	31,66
512412	Beban Pegawai Transito	262.268.153	1.377.429.866	(1.115.161.713)	(80,96)
	Jumlah	8.941.451.705.996	8.184.014.047.635	757.437.658.361	9,26

Selanjutnya disajikan Beban Pegawai Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.10
Beban Pegawai Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	199.648.145.308	183.930.915.186	15.717.230.122	8,55
2	Inspektorat Jenderal	64.410.141.887	58.671.677.358	5.738.464.529	9,78
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	503.997.840.852	461.925.175.184	42.072.665.668	9,11
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	233.341.770.731	209.189.750.146	24.152.020.585	11,55
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	108.281.142.789	101.813.118.017	6.468.024.772	6,35
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	171.505.313.349	153.066.682.149	18.438.631.200	12,05
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	367.823.363.047	345.418.472.920	22.404.890.127	6,49
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	7.292.443.988.033	6.669.998.256.675	622.445.731.358	9,33
	Jumlah	8.941.451.705.996	8.184.014.047.635	757.437.658.361	9,26

Beban Persediaan
Rp83.365.759.026,-

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp83.365.759.026,- dan Rp85.770.162.444,-. Terdapat penurunan Beban Persediaan sebesar (Rp2.404.403.418,-) atau (2,80%) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.11
Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	74.245.696.966	67.811.627.799	6.434.069.167	9,49
593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	71.843.000	54.493.500	17.349.500	31,84
593131	Beban Persediaan bahan baku	5.336.695.132	13.516.438.036	(8.179.742.904)	(60,52)
593141	Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	1.241.000	(1.241.000)	(100,00)
593149	Beban Persediaan Lainnya	3.711.523.928	4.386.362.109	(674.838.181)	(15,38)
Jumlah Beban Persediaan		83.365.759.026	85.770.162.444	(2.404.403.418)	(2,80)

Selanjutnya disajikan Beban Persediaan Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.12
Beban Persediaan Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	16.677.823.623	12.895.632.050	3.782.191.573	29,33
2	Inspektorat Jenderal	801.967.802	812.357.455	(10.389.653)	(1,28)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	14.772.141.051	23.794.331.207	(9.022.190.156)	(37,92)
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	9.663.319.102	8.144.170.313	1.519.148.789	18,65
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.016.884.611	4.187.707.529	829.177.082	19,80
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.522.335.167	4.881.248.806	641.086.361	13,13
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	15.937.712.096	12.638.587.422	3.299.124.674	26,10
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	14.973.575.574	18.416.127.662	(3.442.552.088)	(18,69)
Jumlah		83.365.759.026	85.770.162.444	(2.404.403.418)	(2,80)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.640.975.935.432,- dan Rp5.153.016.826.382,-. Terdapat penurunan Beban Barang dan Jasa sebesar (Rp512.040.890.950,-) atau (9,94%) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.13
Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
521111	Beban Keperluan Kantor	325.890.309.792	296.943.150.440	28.947.159.352	9,75
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.059.057.629	877.029.021	182.028.608	20,76
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.028.206.043	7.347.464.787	680.741.256	9,26
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	111.850.165.386	107.631.638.713	4.218.526.673	3,92
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	54.585.922.319	55.007.092.561	(421.170.242)	(0,77)
521211	Beban Bahan	762.520.944.038	816.296.551.406	(53.775.607.368)	(6,59)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	128.403.532.928	140.059.268.114	(11.655.735.186)	(8,32)
521218	Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	-	225.000.000	(225.000.000)	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	913.039.731.785	1.076.396.423.417	(163.356.691.632)	(15,18)
522111	Beban Langganan Listrik	76.196.659.253	72.008.123.218	4.188.536.035	5,82
522112	Beban Langganan Telepon	5.097.720.993	5.486.888.799	(389.167.806)	(7,09)
522113	Beban Langganan Air	4.577.540.838	5.038.037.379	(460.496.541)	(9,14)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	26.553.612.777	21.672.729.467	4.880.883.310	22,52
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	281.428.218	280.012.305	1.415.913	0,51
522131	Beban Jasa Konsultan	189.791.899.317	177.765.055.548	12.026.843.769	6,77
522141	Beban Sewa	159.148.096.964	137.491.044.036	21.657.052.928	15,75
522151	Beban Jasa Profesi	679.734.020.638	738.705.407.310	(58.971.386.672)	(7,98)
522191	Beban Jasa Lainnya	402.843.993.626	361.911.105.107	40.932.888.519	11,31
521231	Beban Barang Persediaan Penghargaan dalam bentuk uang	4.113.500.000	17.006.075.000	(12.892.575.000)	(75,81)
521232	Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	163.106.125.623	-	163.106.125.623	∞
521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	619.142.138.374	1.110.386.734.999	(491.244.596.625)	(44,24)
521234	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	-	9.180.000	(9.180.000)	(100,00)
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	5.011.328.891	4.470.275.255	541.053.636	12,10
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	2.539.500	(2.539.500)	
Jumlah		4.640.975.935.432	5.153.016.826.382	(512.040.890.950)	(9,94)

Selanjutnya disajikan Beban Barang dan Jasa Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.14
Beban Barang dan Jasa Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	893.256.311.109	814.691.482.450	78.564.828.659	9,64
2	Inspektorat Jenderal	29.130.851.941	30.210.468.172	(1.079.616.231)	(3,57)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	1.082.987.950.906	1.145.913.022.643	(62.925.071.737)	(5,49)
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	381.109.383.872	270.309.163.541	110.800.220.331	40,99
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	965.321.364.882	934.504.884.239	30.816.480.643	3,30
6	Badan Pengemb. dan Pembinaan Bahasa	158.534.228.772	109.799.048.415	48.735.180.357	44,39
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	476.691.892.000	451.892.308.066	24.799.583.934	5,49
8	Direktorat Jenderal Guru & Tendik	653.943.951.950	1.395.696.448.856	(741.752.496.906)	(53,15)
Jumlah		4.640.975.935.432	5.153.016.826.382	(512.040.890.950)	(9,94)

Beban Pemeliharaan
Rp321.639.704.733,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp321.639.704.733,- dan Rp330.271.538.530,-. Terdapat penurunan Beban Pemeliharaan sebesar (Rp8.631.833.797,-) atau (2,61%) dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp321.639.704.733,- tidak sama dengan realisasi neto belanja pemeliharaan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp349.303.441.359,-, hal ini disebabkan adanya belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.15 ...

Tabel D.15
Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.376.593.301	162.648.333.697	(23.271.740.396)	(14,31)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	16.336.296.491	9.917.051.443	6.419.245.048	64,73
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108.588.271.259	106.939.324.405	1.648.946.854	1,54
523122	Beban BBM dan Pelumas dan Pelumas Khusus Non Pertamina	336.648.704	349.579.454	(12.930.750)	(3,70)
523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	49.983.000	49.586.522	396.478	0,80
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.030.968.002	6.465.281.213	565.686.789	8,75
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	28.197.000	(28.197.000)	(100,00)
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	19.965.000			
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1.973.450.287	1.083.274.372	890.175.915	82,17
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	41.082.934.621	35.004.654.922	6.078.279.699	17,36
593113	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	6.102.856.893	6.653.940.855	(551.083.962)	(8,28)
593114	Beban Persediaan suku cadang	721.237.175	1.008.351.125	(287.113.950)	(28,47)
595113	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	20.500.000	123.963.522		
Jumlah		321.639.704.733	330.271.538.530	(8.631.833.797)	(2,61)

Selanjutnya disajikan Beban Pemeliharaan Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.16
Beban Pemeliharaan Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	60.030.020.936	66.143.654.972	(6.113.634.036)	(9,24)
2	Inspektorat Jenderal	4.558.967.211	5.203.620.085	(644.652.874)	(12,39)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	87.072.359.382	94.329.630.731	(7.257.271.349)	(7,69)
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	27.191.928.029	25.461.921.730	1.730.006.299	6,79
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	6.900.760.959	8.162.492.034	(1.261.731.075)	(15,46)
6	Badan Pengemb. dan Pembinaan Bahasa	7.804.114.248	9.617.614.768	(1.813.500.520)	(18,86)
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	83.040.208.353	71.777.894.262	11.262.314.091	15,69
8	Direktorat Jenderal Guru & Tendik	45.041.345.615	49.574.709.948	(4.533.364.333)	(9,14)
Jumlah		321.639.704.733	330.271.538.530	(8.631.833.797)	(2,61)

Beban Perjalanan Dinas
Rp3.955.091.310.537,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.955.091.310.537,- dan Rp4.119.141.569.418,-. Terdapat penurunan Beban Perjalanan Dinas sebesar (Rp164.050.258.881,-) atau (3,98%) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.17
Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2019 dan 301 Desember 2018

Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
524111	Beban Perjalanan Biasa	952.809.350.991	1.056.569.483.923	(103.760.132.932)	(9,82)
524112	Beban Perjalanan Tetap	3.835.452.882	2.848.838.261	986.614.621	34,63
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.912.675.928	53.027.331.409	11.885.344.519	22,41
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	449.935.547.297	502.119.199.777	(52.183.652.480)	(10,39)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.292.853.680.153	2.381.790.305.603	(88.936.625.450)	(3,73)
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	39.908.410.358	27.606.554.982	12.301.855.376	44,56
524212	Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	-	82.483.498	(82.483.498)	(100,00)
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	150.836.192.928	95.097.371.965	55.738.820.963	58,61
Jumlah		3.955.091.310.537	4.119.141.569.418	(164.050.258.881)	(3,98)

Selanjutnya disajikan Beban Perjalanan Dinas Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.18
Beban Perjalanan Dinas Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	372.089.200.290	387.307.179.147	(15.217.978.857)	(3,93)
2	Inspektorat Jenderal	72.050.212.776	80.395.953.218	(8.345.740.442)	(10,38)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	1.412.141.686.698	1.360.849.218.410	51.292.468.288	3,77
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	235.432.622.971	249.456.838.789	(14.024.215.818)	(5,62)
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	90.177.929.887	104.755.459.282	(14.577.529.395)	(13,92)
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	126.597.345.278	85.021.074.769	41.576.270.509	48,90
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	254.821.554.810	266.269.855.677	(11.448.300.867)	(4,30)
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	1.391.780.757.827	1.585.085.990.126	(193.305.232.299)	(12,20)
Jumlah		3.955.091.310.537	4.119.141.569.418	(164.050.258.881)	(3,98)

D.7.Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada lembaga/masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Bidang Pendidikan dan kebudayaan.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.053.405.336.455,- dan Rp 12.700.561.529.708,-. Terdapat penurunan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar (Rp3.647.156.193.253,-) atau (28,72%) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.19

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
526111	Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	6.168.434.101	(6.168.434.101)	(100,00)
526112	Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	390.878.083.625	1.710.960.198.947	(1.320.082.115.322)	(77,15)
526113	Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	51.952.477.800	2.500.969.487.290	(2.449.017.009.490)	(97,92)
526115	Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.442.955.000	25.832.201.300	(22.389.246.300)	(86,67)
526122	Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	215.872.426.177	588.146.599.637	(372.274.173.460)	(63,30)
526123	Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	1.544.367.587.400	266.478.622.620	1.277.888.964.780	479,55
526311	Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	263.624.559.904	4.494.289.679.621	(4.230.665.119.717)	(94,13)
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	3.704.585.623.986	3.107.716.306.192	596.869.317.794	19,21
593122	Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	20.485.213.657	-	20.485.213.657	∞
593124	Beban Persediaan Peralatan dan Mesin Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	2.788.575.296.958	-	2.788.575.296.958	∞
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya Untuk diserahkan Kepada Masyarakat	18.663.287.278	-	18.663.287.278	∞
593127	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk diserahkan Kepada Masyarakat	6.129.169.880	-	6.129.169.880	∞
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual atau Diserahkan Ke Masyarakat	44.828.654.790	-	44.828.654.790	∞
	Jumlah	9.053.405.336.455	12.700.561.529.708	(3.647.156.193.253)	(28,72)

Selanjutnya disajikan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.20 ...

Tabel D.20
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	216.217.668.502	228.125.980.920	(11.908.312.418)	(5,22)
2	Direktorat Jenderal Dikdasmen	6.638.428.303.849	10.808.059.477.193	(4.169.631.173.344)	(38,58)
3	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	799.100.763.473	1.361.848.071.984	(562.747.308.511)	(41,32)
4	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	17.614.218.674	7.055.528.019	10.558.690.655	14,97
5	Direktorat Jenderal Kebudayaan	168.412.444.575	225.725.292.615	(57.312.848.040)	(2,54)
6	Direktorat Jenderal Guru dan Tendik	1.213.631.937.382	69.747.178.977	1.143.884.758.405	164,00
Jumlah		9.053.405.336.455	12.700.561.529.708	(3.647.156.193.253)	(28,72)

Beban Bantuan
Sosial
Rp9.216.714.720.340,-

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.216.714.720.340,- dan Rp11.839.377.941.500,-. Terdapat penurunan Beban Bantuan Sosial sebesar (Rp2.622.663.221.160,-) atau (22,15%) dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2019 Rp9.648.055.607.525,- tidak sama dengan Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.216.714.720.340,- dikarenakan masih terdapatnya realisasi belanja bantuan sosial tahun 2019 yang belum diaktivasi oleh siswa.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.21
Rincian Beban Bantuan Sosial
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
572111	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang	6.316.968.750.000	8.389.167.062.000	(2.072.198.312.000)	(24,70)
573111	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	2.887.333.000.000	3.149.745.589.000	(262.412.589.000)	(8,33)
573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	-	1.085.639.500	(1.085.639.500)	(100,00)
576111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	12.412.970.340	281.861.021.000	(269.448.050.660)	(95,60)
576112	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk	-	13.200.000.000	(13.200.000.000)	(100,00)
57111x	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	3.900.000.000	(3.900.000.000)	(100,00)
57511x	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	-	418.630.000	(418.630.000)	(100,00)
Jumlah		9.216.714.720.340	11.839.377.941.500	(2.622.663.221.160)	(22,15)

Selanjutnya disajikan Beban Bantuan Sosial Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.22
Beban Bantuan Sosial Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Direktorat Jenderal Dikdasmen	9.215.114.720.340	11.837.507.124.500	(2.622.392.404.160)	(22,15)
2	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	1.600.000.000	1.452.187.000	147.813.000	10,18
3	Direktorat Jenderal Guru dan Tendik	-	418.630.000	(418.630.000)	(100,00)
Jumlah		9.216.714.720.340	11.839.377.941.500	(2.622.663.221.160)	(22,15)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp630.249.609.436,-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp630.249.609.436,- dan Rp524.507.332.120,-. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp105.742.277.316,- atau 20,16% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.23
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	390.223.666.021	372.370.103.653	17.853.562.368	4,79
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	184.519.230.161	107.557.338.350	76.961.891.811	71,55
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	29.240.652.222	12.318.054.372	16.922.597.850	137,38
Beban Penyusutan Irigasi	3.799.069.674	2.049.373.407	1.749.696.267	85,38
Beban Penyusutan Jaringan	3.331.020.031	3.994.709.204	(663.689.173)	(16,61)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	300.929.634	530.043.237	(229.113.603)	(43,23)
Jumlah Penyusutan	611.414.567.743	498.819.622.223	112.594.945.520	22,57
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.411.389.843	1.411.552.344	(162.501)	(0,01)
Beban Amortisasi Software	7.195.147.326	8.662.255.242	(1.467.107.916)	(16,94)
Beban Amortisasi Lisensi	3.266.754.003	3.396.025.422	(129.271.419)	(3,81)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	292.571.400	375.488.300	(82.916.900)	(22,08)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	330.652.661	444.795.222	(114.142.561)	(25,66)
Beban Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.338.526.460	11.397.593.367	(5.059.066.907)	(44,39)
Jumlah Amortisasi	18.835.041.693	25.687.709.897	(6.852.668.204)	(26,68)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	630.249.609.436	524.507.332.120	105.742.277.316	20,16

Selanjutnya disajikan Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.24
Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	160.126.154.013	159.340.968.219	785.185.794	0,49
2	Inspektorat Jenderal	6.168.616.927	6.404.700.823	(236.083.896)	(3,69)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	165.663.609.154	156.187.743.310	9.475.865.844	6,07
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	55.502.787.916	46.281.718.431	9.221.069.485	19,92
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	23.348.012.890	20.970.078.394	2.377.934.496	11,34
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	25.175.605.322	19.580.443.496	5.595.161.826	28,58
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	76.951.531.278	100.229.792.880	(23.278.261.602)	(23,22)
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	117.313.291.936	118.452.647.495	(1.139.355.559)	(0,96)
9	Satker Konsolidasian Kemendikbud	-	(102.940.760.928)	102.940.760.928	(100,00)
Jumlah		630.249.609.436	524.507.332.120	105.742.277.316	20,16

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp11.272.161,-

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.272.161,- dan Rp60.039.183,-. Terdapat penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar (Rp48.767.022,-) atau (81,23%) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada tabel berikut:

Tabel D.25
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan /	
				(Rp)	(%)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	(3.976.255)	3.976.255	(7.952.510)	(200,00)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	17.007.819	6.776.000	10.231.819	151,00
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar bagian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(1.559.325)	4.006.367	(5.565.692)	(138,92)
594421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	(48.750)	-	(48.750)	∞
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(151.328)	398.011	(549.339)	(138,02)
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	44.882.550	(44.882.550)	(100,00)
Jumlah		11.272.161	60.039.183	(48.767.022)	(81,23)

Selanjutnya disajikan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.26
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	469.577	-	469.577	∞
2	Inspektorat Jenderal	(3.509)	321.617	(325.126)	(101,09)
3	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	(9.370.738)	14.474.924	(23.845.662)	(164,74)
4	Ditjen PAUD dan Dikmas	1.563.334	203.225	1.360.109	669,26
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	649.380	44.882.550	(44.233.170)	(98,55)
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	12.448.127	-	12.448.127	∞
7	Ditjen Kebudayaan	(60.010)	156.867	(216.877)	(138,26)
8	Ditjen GTK	5.576.000	-	5.576.000	∞
Jumlah		11.272.161	60.039.183	(48.767.022)	(81,23)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih bernilai minus dikarenakan adanya pembayaran/pelunasan piutang pada tahun berjalan.

Beban Lain-lain
Rp0,-

D.11. Beban Lain-lain

Tidak ada saldo Beban Lain-lain pada Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2019 Audited.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp240.609.412.630,-

D.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp240.609.412.630,- dan Rp19.238.761.073,-. Terdapat kenaikan surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp221.370.651.557,- atau 1.150,65% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.27
Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.657.939.531	6.364.254.081	1.293.685.450	20,33
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	89.755.673.506	84.089.750.294	5.665.923.212	6,74
(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(82.097.733.975)	(77.725.496.213)	(4.372.237.762)	5,63
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	327.026.671.838	111.020.250.958	216.006.420.880	194,56
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.319.525.233	14.055.993.672	(9.736.468.439)	(69,27)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	322.707.146.605	96.964.257.286	225.742.889.319	232,81
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	240.609.412.630	19.238.761.073	221.370.651.557	1.150,65

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per Eselon I dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel D.28
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	4.032.426.953	29.388.217.362	(25.355.790.409)	(86,28)
2	Inspektorat Jenderal	546.551.433	109.726.163	436.825.270	398,10
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	273.357.510.137	11.181.495.187	262.176.014.950	2.344,73
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	6.616.834.883	4.005.770.865	2.611.064.018	65,18
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	399.101.200	1.121.793.479	(722.692.279)	(64,42)
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.410.421.038	3.730.205.450	(2.319.784.412)	(62,19)
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	(58.988.552.782)	(60.868.836.125)	1.880.283.343	(3,09)
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	13.235.119.768	26.139.348.939	(12.904.229.171)	(49,37)
9	Sakter Konsolidasian Kemendikbud	-	4.431.039.753	(4.431.039.753)	(100,00)
Jumlah		240.609.412.630	19.238.761.073	221.370.651.557	1.150,65

Selanjutnya dijelaskan masing-masing Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

D.12.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan yang timbul dari hasil penghapusan BMN yang telah dilakukan proses lelang.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.657.939.531,- dan Rp6.364.254.081,-. Terdapat kenaikan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.293.685.450,- atau 20,33% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel D.29
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	89.549.999	140.572.009	(51.022.010)	(36,30)
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.653.730.286	1.303.385.822	350.344.464	26,88
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5.914.659.246	4.920.296.250	994.362.996	20,21
Jumlah		7.657.939.531	6.364.254.081	1.293.685.450	20,33

Selanjutnya disajikan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.30
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	1.671.276.661	1.833.308.027	(162.031.366)	(8,84)
2	Inspektorat Jenderal	259.010.999	-	259.010.999	-
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	1.503.706.429	2.113.520.127	(609.813.698)	(28,85)
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	1.437.410.362	941.912.691	495.497.671	52,61
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	207.821.209	336.073.399	(128.252.190)	(38,16)
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	394.786.717	199.128.776	195.657.941	98,26
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	866.690.469	300.621.562	566.068.907	188,30
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	1.317.236.685	639.689.499	677.547.186	105,92
Jumlah		7.657.939.531	6.364.254.081	1.293.685.450	20,33

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp89.755.673.506,-

D.12.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang timbul sebagai akibat dari reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain. Aset Tetap yang akan dihapuskan terlebih dahulu akan direklasifikasikan ke Aset Lain-lain sebelum akhirnya terbit Surat Keputusan (SK) Penghapusan dari Pengguna Barang (Mendikbud) sebagai dasar penghapusan.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp89.755.673.506,- dan Rp84.089.750.294,-. Terdapat kenaikan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.665.923.212,- atau 6,74% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 keseluruhan merupakan beban kerugian pelepasan aset.

Selanjutnya disajikan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.31
Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	11.640.356.445	118.040.039	11.522.316.406	9.761,36
2	Direktorat Jenderal Dikdasmen	8.634.041.611	16.317.003.272	(7.682.961.661)	(47,09)
3	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	1.843.883.653	1.718.542.403	125.341.250	7,29
4	Badan Penelitian dan Pengembangan	148.249.530	16.398.812	131.850.718	804,03
5	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	11.216.100	191.846.644	(180.630.544)	(94,15)
6	Direktorat Jenderal Kebudayaan	66.625.813.047	67.368.921.505	(743.108.458)	(1,10)
7	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	852.113.120	2.790.037.372	(1.937.924.252)	(69,46)
8	Satker Konsolidasian Kemendikbud	-	(4.431.039.753)		
Jumlah		89.755.673.506	84.089.750.294	5.665.923.212	6,74

D.12.3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pendapatan yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp327.026.671.838,- dan Rp111.020.250.958,-. Terdapat kenaikan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp216.006.420.880,- atau 194,56% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel D.32
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Akun	Uraian	Nilai
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	51.752.501
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	20.732.400
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	34.723.564
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.083.953.717
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	80.620.192.951
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	6.900.606.253
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	216.605.083.108
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	8.374.365.236
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	1.049.438.916
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	2.657.386.220
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	9.628.436.972
Pendapatan Neto		327.026.671.838

Selanjutnya disajikan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.33
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	15.362.925.601	36.190.965.869	(20.828.040.268)	(57,55)
2	Inspektorat Jenderal	289.080.819	119.694.963	169.385.856	141,51
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	281.397.747.486	27.284.608.649	254.113.138.837	931,34
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	8.209.340.869	5.913.790.528	2.295.550.341	38,82
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	363.729.797	807.630.985	(443.901.188)	(54,96)
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.261.913.281	4.117.491.176	(2.855.577.895)	(69,35)
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	7.268.757.972	7.070.948.290	197.809.682	2,80
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	12.873.176.013	29.515.120.498	(16.641.944.485)	(56,38)
Jumlah		327.026.671.838	111.020.250.958	216.006.420.880	194,56

Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp4.319.525.233,-

D.12.4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.319.525.233,- dan Rp14.055.993.672,-. Terdapat penurunan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp9.736.468.439,-) atau (69,27%) jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel D.34
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Akun	Uraian	Nilai
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	76.413.844
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3.146.734.623
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	46.937.850
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.049.438.916
Jumlah		4.319.525.233

Selanjutnya disajikan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I sebagai berikut:

Tabel D.35
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	1.361.418.864	8.518.016.495	(7.156.597.631)	(84,02)
2	Inspektorat Jenderal	1.540.385	9.968.800	(8.428.415)	(84,55)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	909.902.167	1.899.630.317	(989.728.150)	(52,10)
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	1.186.032.695	1.131.389.951	54.642.744	4,83
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	24.200.276	5.512.093	18.688.183	339,04
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	235.062.860	394.567.858	(159.504.998)	(40,43)
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	498.188.176	871.484.472	(373.296.296)	(42,83)
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	103.179.810	1.225.423.686	(1.122.243.876)	(91,58)
Jumlah		4.319.525.233	14.055.993.672	(9.736.468.439)	(69,27)

Pos Luar Biasa
Rp0,-

D.13.Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak ada saldo Pos Luar Biasa pada Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2019 Audited.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Ekuitas awal per 1 Januari 2019 sebesar Rp14.107.304.271.629,- mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp14.012.012.323.020,- sehingga jumlah ekuitas akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.119.316.594.649,-.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.1
Perbandingan Rincian Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik/(Turun)	%
Ekuitas Awal (A)	14.107.304.271.629	18.247.082.607.599	(4.139.778.335.970)	(22,69)
(Defisit) - LO (1)	(36.533.797.581.673)	(42.874.205.975.650)	6.340.408.393.977	(14,79)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	-	-	-	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (2)	14.476.865.651.848	44.820.227.644	14.432.045.424.204	32.199,85
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	2.557.000	489.143.525	(486.586.525)	(99,48)
Koreksi Atas Reklasifikasi	2.850.701.838	-	2.850.701.838	∞
Selisih Revaluasi Aset	14.191.015.238.943	-	14.191.015.238.943	∞
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	283.299.631.520	(229.888.161.305)	513.187.792.825	(223,23)
Lain-lain	(302.477.453)	274.219.245.424	(274.521.722.877)	(100,11)
Transaksi Antar Entitas (3)	36.068.944.252.845	38.689.607.412.036	(2.620.663.159.191)	(6,77)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas (B = 1 + 2 + 3)	14.012.012.323.020	(4.139.778.335.970)	18.151.790.658.990	(438,47)
Ekuitas Akhir (A + B)	28.119.316.594.649	14.107.304.271.629	14.012.012.323.020	99,32

Ekuitas Awal
Rp14.107.304.271.629,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp14.107.304.271.629,- dan Rp 18.247.082.607.599,-. Penurunan nilai ekuitas awal tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar (Rp4.139.778.335.970,-). Salah satu penyebab penurunan Ekuitas Awal ini adalah adanya jurnal *takeout* revaluasi aset tetap pada akhir tahun 2018 pada satker konsolidasian Kemendikbud.

Selanjutnya di bawah ini disajikan Ekuitas Awal dari masing-masing Eselon I per 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel E.2
Rincian Ekuitas Awal Per Eselon I
Per 1 Januari 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No	URAIAN	1 Jan 2019	1 Jan 2018	NAIK (TURUN)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.898.935.642.939	3.986.908.898.857	(87.973.255.918)	(2,21)
2	Inspektorat Jenderal	104.499.589.213	114.063.264.895	(9.563.675.682)	(8,38)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	10.006.532.721.208	13.629.835.710.055	(3.623.302.988.847)	(26,58)
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	1.671.111.790.111	1.182.793.456.313	488.318.333.798	41,29
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	493.057.834.854	599.700.918.374	(106.643.083.520)	(17,78)
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	824.753.026.581	828.497.610.415	(3.744.583.834)	(0,45)
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	9.128.575.433.319	8.553.440.208.024	575.135.225.295	6,72
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tendik	3.789.680.289.248	3.092.858.773.997	696.821.515.251	22,53
9	Sakter Konsolidasian Kementerian	(15.809.842.055.844)	(13.741.016.233.331)	(2.068.825.822.513)	15,06
	Jumlah	14.107.304.271.629	18.247.082.607.599	(4.139.778.335.970)	(22,69)

Surplus/(Defisit) LO
(Rp36.533.797.581.673,-)

E.2 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional (LO)

Surplus/(Defisit) LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

LO Kemendikbud mengalami defisit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar (Rp36.533.797.581.673,-) dan (Rp42.874.205.975.650,-). Terdapat penurunan defisit sebesar Rp6.340.408.393.977,- yang penyebabnya telah dijelaskan pada CaLK LO.

Surplus / (Defisit) LO dari masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel E.3
Perbandingan Surplus/(Defisit) LO Per Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	(1.899.519.226.025)	(1.816.162.228.109)	(83.356.997.916)	4,59
2	Inspektorat Jenderal	(176.457.403.602)	(181.517.372.565)	5.059.968.963	(2,79)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	(18.826.271.265.011)	(25.862.766.620.456)	7.036.495.355.445	(27,21)
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	(1.733.466.504.240)	(2.165.773.542.335)	432.307.038.095	(19,96)
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	(1.198.053.674.152)	(1.172.827.535.957)	(25.226.138.195)	2,15
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	(509.310.232.054)	(383.983.188.020)	(125.327.044.034)	32,64
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	(1.494.542.837.533)	(1.527.992.193.046)	33.449.355.513	(2,19)
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	(10.696.176.439.056)	(9.870.555.095.843)	(825.621.343.213)	8,36
9	Satker Konsolidasian Kemendikbud	-	107.371.800.681	(107.371.800.681)	(100,00)
	Jumlah	(36.533.797.581.673)	(42.874.205.975.650)	6.340.408.393.977	(14,79)

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp0.-

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan ataupun berupa kesalahan perhitungan matematis. Kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi kesalahan interpretasi fakta, termasuk kecurangan (*fraud*) atau kelalaian.

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Koreksi yang
Menambah atau
Mengurangi Ekuitas
Rp14.476.865.651.848,-

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.476.865.651.848,- sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.820.227.644,-. Rincian detail Koreksi yang menambah atau mengurangi Ekuitas disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel E.4
Koreksi yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik/(Turun)	%
E.4.1	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
E.4.2	Koreksi Nilai Persediaan	2.557.000	489.143.525	(486.586.525)	(99,48)
E.4.3	Koreksi Atas Reklasifikasi	2.850.701.838	-	2.850.701.838	∞
E.4.4	Selisih Revaluasi Aset	14.191.015.238.943	-	14.191.015.238.943	∞
E.4.5	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	283.299.631.520	(229.888.161.305)	513.187.792.825	223,23
E.4.6	Lain-Lain	(302.477.453)	274.219.245.424	(274.521.722.877)	(100,11)
	Jumlah	14.476.865.651.848	44.820.227.644	14.432.045.424.204	32.199,85

Rincian Koreksi yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas per Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel E.5 ...

Tabel E.5
Koreksi yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas
per Eselon 1 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	Sekretariat Jenderal	(376.446.874)	8.238.171.172	(8.614.618.046)	(104,57)
2	Inspektorat Jenderal	(3.187.388.050)	30.830.567	(3.218.218.617)	(10.438,40)
3	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	343.493.805.631	993.359.741.185	(649.865.935.554)	(65,42)
4	Ditjen PAUD-Dikmas	12.268.423.965	453.456.775.194	(441.188.351.229)	(97,29)
5	Badan Penelitian Dan Pengembangan Dikbud	(3.783.058.130)	(112.611.248.517)	108.828.190.387	96,64
6	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	576.566.711	11.693.163.091	(11.116.596.380)	(95,07)
7	Ditjen Kebudayaan	(1.630.708.229.102)	461.270.572.181	(2.091.978.801.283)	(453,53)
8	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	(51.260.078.147)	405.579.845.965	(456.839.924.112)	(112,64)
9	Satker Konsolidasian Kemendikbud	15.809.842.055.844	(2.176.197.623.194)	17.986.039.679.038	826,49
Jumlah		14.476.865.651.848	44.820.227.644	14.432.045.424.204	32.199,85

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,-

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir. Tidak terdapat saldo penyesuaian nilai aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp2.557.000,-

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian atau pencatatan persediaan yang terjadi pada periode per 31 Desember 2019. Koreksi nilai persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.557.000,- dan Rp489.143.525,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel E.6
Perbandingan Koreksi Nilai Persediaan Per Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	-	565.925	(565.925)	(100,00)
2	Ditjen PAUD-Dikmas	-	3.562.600	(3.562.600)	(100,00)
3	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	-	335.390.000	(335.390.000)	(100,00)
4	Ditjen Kebudayaan	2.557.000	149.625.000	(147.068.000)	(98,29)
Jumlah		2.557.000	489.143.525	(486.586.525)	(99,48)

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp2.850.701.838,-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi pada persediaan/aset tetap/aset lainnya. Saldo koreksi atas reklasifikasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.850.701.838,- dan Rp0,-.

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi Per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel E.7
Perbandingan Koreksi Atas Reklasifikasi Per Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	Sekretariat Jenderal	(338.414.214)	-	(338.414.214)	∞
2	Inspektorat Jenderal	(2.961.978.553)	-	(2.961.978.553)	∞
3	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	534.105.341	-	534.105.341	∞
4	Ditjen PAUD-Dikmas	(428.487.278)	-	(428.487.278)	∞
5	Badan Penelitian Dan Pengembangan Dikbud	(387.437.337)	-	(387.437.337)	∞
6	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	34.247.498	-	34.247.498	∞
7	Ditjen Kebudayaan	3.146.240.410	-	3.146.240.410	∞
8	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	3.252.425.971	-	3.252.425.971	∞
	Jumlah	2.850.701.838	-	2.850.701.838	∞

Selisih Revaluasi Aset
Rp14.191.015.238.943,-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi atas selisih penilaian kembali aset tetap dalam laporan keuangan. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp14.191.015.238.943,- dan Rp0,-.

Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 yang tersaji pada Laporan Keuangan Kemendikbud disebabkan karena adanya *take in* hasil penilaian kembali revaluasi aset tahun 2017 dan 2018.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel E. 8 ...

Tabel E.8
Rincian Selisih Revaluasi Aset Per 31 Desember 2019

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	(20.386.743.034)	-	(20.386.743.034)	∞
2	Inspektorat Jenderal	(1.239.000)	-	(1.239.000)	∞
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	348.283.674.091	-	348.283.674.091	∞
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	4.209.119.936	-	4.209.119.936	∞
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	(2.912.793.231)	-	(2.912.793.231)	∞
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	(953.064.000)	-	(953.064.000)	∞
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	(1.684.663.492.272)	-	(1.684.663.492.272)	∞
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	(378.477.539.002)	-	(378.477.539.002)	∞
9	Satker Konsolidasi Kemendikbud	15.925.917.315.455	-	15.925.917.315.455	
Jumlah		14.191.015.238.943	-	14.191.015.238.943	∞

Adapun rincian Selisih Revaluasi Aset Per akun Per Eselon I adalah sebagai berikut:

ESELON I	Tanah	Gedung dan Bangunan	Jalan dan Jembatan	Irigasi	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Irigasi	Jumlah
Sekretariat Jenderal	(406.589.000)	(30.031.031.614)	9.180.900.852	869.976.728	-	-	-	(20.386.743.034)
Inspektorat Jenderal	-	(1.239.000)				-		(1.239.000)
Ditjen Dikdasmen	269.512.908.000	79.975.784.438	(1.689.666.000)	563.893.490		(118.446.719)	39.200.882	348.283.674.091
Ditjen PAUD dan DIKMAS	15.704.706.000	(11.170.506.480)	(124.849.000)	(187.845.000)		-	(12.386.584)	4.209.119.936
Balitbang	582.298.000	(2.994.668.220)	(554.033.000)	91.523.367		(47.913.378)		(2.912.793.231)
BPP Bahasa	1.126.428.000	(2.079.492.000)	-	-		-	-	(953.064.000)
Ditjen Kebudayaan	(713.876.120.272)	(970.736.624.000)	(46.773.000)	(3.975.000)		-	-	(1.684.663.492.272)
Ditjen GTK	(274.354.064.269)	45.802.983.620	2.690.515.000	(152.612.211.778)		(4.761.575)	-	(378.477.539.002)
Satker Konsolidasi Kemendikbud	12.943.820.398.697	1.954.296.793.785	(15.448.441.347)	144.337.054.070	49.270.189.658	837.149.221.043	12.492.099.549	15.925.917.315.455
Total	12.242.119.965.156	1.063.062.001.529	(5.992.346.495)	(6.941.584.123)	49.270.189.658	836.978.099.371	12.518.913.847	14.191.015.238.943

Selanjutnya disajikan total hasil penilaian kembali revaluasi aset tahun 2017, 2018, dan perbaikan tahun 2019 Per Eselon I Per Akun adalah sebagai berikut:

ESELON I	Tanah	Gedung dan Bangunan	Jalan dan Jembatan	Irigasi	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Irigasi	Jumlah
Sekretariat Jenderal	1.566.682.768.576	399.955.722.044	8.950.543.272	(209.382.881)	6.600.202.787	305.812.605.313	940.783.293	2.288.733.242.404
Inspektorat Jenderal	10.835.874.770	16.767.559.748	-	-	-	23.392.970.383	-	50.996.404.901
Ditjen Dikdasmen	3.389.212.627.753	283.914.366.823	(12.868.887.138)	(5.199.419.231)	15.916.330.719	168.710.718.317	4.536.077.669	3.844.221.814.912
Ditjen PAUD dan DIKMAS	890.902.574.443	34.840.796.425	(1.885.830.715)	(1.694.694.727)	2.816.574.662	40.320.140.224	1.351.686.183	966.651.246.495
Balitbang	122.885.616.268	49.026.487.112	(39.863.000)	962.344.367	276.978.903	42.382.692.459	115.719.843	215.609.975.952
BPP Bahasa	430.423.588.348	13.942.483.937	(275.104.000)	24.311.000	805.304.000	18.650.598.623	124.209.901	463.695.391.809
Ditjen Kebudayaan	4.171.011.800.382	53.565.020.376	(4.322.466.615)	(293.185.205)	3.006.246.113	85.209.679.784	655.423.468	4.308.832.518.303
Ditjen GTK	1.660.165.114.616	211.049.565.064	4.449.261.701	(531.557.446)	19.848.552.474	152.498.694.268	4.795.013.490	2.052.274.644.167
Total	12.242.119.965.156	1.063.062.001.529	(5.992.346.495)	(6.941.584.123)	49.270.189.658	836.978.099.371	12.518.913.847	14.191.015.238.943

Berdasarkan hasil monitoring dari e-Rekon-LK saldo Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp14.279.187.417.738,- sedangkan saldo Revaluasi Aset Tetap yang tersaji pada LPE sebesar Rp14.191.015.238.943,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp88.172.178.795,-. Penyebab selisih tersebut dikarenakan pada tahun 2017 terdapat penilaian atas lukisan pada satker Galeri Nasional yang diperoleh dari hibah sebagai tindak lanjut atas temuan BPK karena lukisan dimaksud dicatat dengan nilai Rp1,-. Hasil penilaian tersebut dicatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN menggunakan menu transaksi Koreksi Penilaian Kembali (kode 205).

Mengingat objek revaluasi aset tidak termasuk lukisan (aset tetap lainnya), maka dari itu sesuai dengan Nota Kesepakatan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor NK-023/73/TO-RevalBMN/2019, pencatatan atas lukisan tersebut direklas pada akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116).

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp283.299.631.520,-

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan yang tidak berasal dari kegiatan revaluasi. Koreksi nilai aset non revaluasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp283.299.631.520,- dan (Rp229.888.161.305,-).

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel E.9
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi

Kode	Uraian	31 Desember 2019
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	284.673.409.502
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(1.373.777.982)
Jumlah		283.299.631.520

Selanjutnya disajikan rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Eselon I sebagai berikut:

Tabel E.10 ...

Tabel E.10
Perbandingan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Per Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	Sekretariat Jenderal	20.386.660.374	(6.006.771.589)	26.393.431.963	(439,39)
2	Inspektorat Jenderal	(224.170.497)	26.346.667	(250.517.164)	(950,85)
2	Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah	(5.315.076.185)	2.569.520.197	(7.884.596.382)	(306,85)
3	Ditjen Paud-Dikmas	8.487.791.307	3.002.697.371	5.485.093.936	182,67
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Dikbud	(208.652.622)	30.058.506	(238.711.128)	(794,15)
5	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.495.383.213	(3.877.166.589)	5.372.549.802	(138,57)
6	Ditjen Kebudayaan	50.806.465.760	4.819.246.509	45.987.219.251	954,24
7	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	323.946.489.781	90.330.206.555	233.616.283.226	258,62
8	Satker Konsolidasi Kemendikbud	(116.075.259.611)	(320.782.298.932)	204.707.039.321	(63,81)
Jumlah		283.299.631.520	(229.888.161.305)	513.187.792.825	(223,23)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ini disebabkan antara lain oleh :

1. Adanya koreksi pencatatan nilai aset pada aplikasi SIMAK BMN untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Adanya jurnal *take in* revaluasi aset tetap tahun 2017 dan 2018 atas beban akumulasi penyusutan.

Koreksi Lain-lain
(Rp302.477.453,-)

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi untuk menyesuaikan saldo anggaran maupun saldo ekuitas. Koreksi lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp302.477.453,-) dan Rp274.219.245.424,-.

Rincian Koreksi lainnya per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel E.11
Perbandingan Koreksi Lain-lain Per Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	Sekretariat Jenderal	(37.950.000)	(708.428.696)	670.478.696	(94,64)
2	Inspektorat Jenderal	-	4.483.900	(4.483.900)	(100,00)
3	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	(8.897.616)	433.488.063.879	(433.496.961.495)	(100,00)
4	Ditjen PAUD dan Dikmas	-	1.500.200	(1.500.200)	(100,00)
5	Badan Penelitian & Pengembangan Dikbud	(274.174.940)	(154.811.433.442)	154.537.258.502	(99,82)
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	-	(6.096.417)	6.096.417	(100,00)
7	Ditjen Kebudayaan	-	(5.167.200)	5.167.200	(100,00)
8	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	18.545.103	(3.743.676.800)	3.762.221.903	(100,50)
Jumlah		(302.477.453)	274.219.245.424	(274.521.722.877)	(100,11)

Transaksi Antar Entitas
Rp36.068.944.252.845,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan penjumlahan dari akun Diterima dari Entitas Lain, Ditagihkan ke Entitas Lain, Transfer Keluar dan Transfer Masuk serta Pengesahan Hibah Langsung. Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp36.068.944.252.845,- dan sebesar Rp38.689.607.412.036,-.

Adapun rincian transaksi antar entitas menurut akun per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel E.12
Perbandingan Transaksi Antar Entitas Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Akun	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	36.486.877.669.332	39.422.355.523.896	(2.935.477.854.564)	(7,45)
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	(715.068.096.483)	(1.034.440.482.293)	319.372.385.810	(30,87)
3	313211	Transfer Keluar	(41.993.429.439)	(37.380.066.526)	(4.613.362.913)	12,34
4	313221	Transfer Masuk	37.142.218.893	37.419.248.552	(277.029.659)	(0,74)
5	391131	Pengesahan Hibah Langsung	301.985.890.542	184.591.882.898	117.394.007.644	63,60
6	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-	117.061.305.509	(117.061.305.509)	(100,00)
Jumlah			36.068.944.252.845	38.689.607.412.036	(2.620.663.159.191)	(6,77)

Rincian Transaksi Antar Entitas per Eselon-1 adalah sebagai berikut:

Tabel E.13
Perbandingan Transaksi Antar Entitas Per Eselon-1
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	Sekretariat Jenderal	1.884.900.403.378	1.719.950.801.019	164.949.602.359	9,59
2	Inspektorat Jenderal	180.001.018.355	171.922.866.316	8.078.152.039	4,70
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	18.184.720.233.056	21.246.103.890.424	(3.061.383.657.368)	(14,41)
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	1.771.821.977.862	2.200.635.100.939	(428.813.123.077)	(19,49)
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.340.726.918.869	1.178.795.700.954	161.931.217.915	13,74
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	531.718.953.118	368.545.441.095	163.173.512.023	44,28
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	1.642.605.152.997	1.641.856.846.160	748.306.837	0,05
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	10.532.449.595.210	10.161.796.765.129	370.652.830.081	3,65
Jumlah		36.068.944.252.845	38.689.607.412.036	(2.620.663.159.191)	(6,77)

Selanjutnya penjelasan Transaksi Antar Entitas per jenis akun adalah sebagai berikut.

Ditagihkan Ke Entitas Lain
Rp36.486.877.669.332,-

E.5.1 Ditagihkan Ke Entitas Lain

Ditagihkan Ke Entitas Lain adalah merupakan pengeluaran belanja satker di lingkungan Kemendikbud yang semuanya dibiayai

oleh Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai pengimbang Surplus/defisit Laporan Operasional.

Nilai Ditagihkan Ke Entitas Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp36.486.877.669.332,- dan sebesar Rp39.422.355.523.896,-.

Rincian Ditagihkan Ke Entitas Lain per Eselon-1 adalah sebagai berikut:

Tabel E.14
Perbandingan Ditagihkan Ke Entitas Lain Per Eselon-1
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	Sekretariat Jenderal	1.859.472.701.975	1.728.732.280.561	130.740.421.414	7,56
2	Inspektorat Jenderal	180.668.801.363	171.892.076.425	8.776.724.938	5,11
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	18.805.610.126.129	22.173.421.895.738	(3.367.811.769.609)	(15,19)
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	1.778.272.520.509	2.083.112.055.854	(304.839.535.345)	(14,63)
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.096.411.637.895	1.029.598.635.130	66.813.002.765	6,49
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	535.059.772.212	370.449.633.122	164.610.139.090	44,44
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	1.662.450.908.321	1.660.013.710.752	2.437.197.569	0,15
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	10.568.931.200.928	10.205.135.236.314	363.795.964.614	3,56
	Jumlah	36.486.877.669.332	39.422.355.523.896	(2.935.477.854.564)	(7,45)

Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain Per 31 Desember 2019 Rp36.486.877.669.332,- tidak sama dengan saldo realisasi belanja neto per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.494.689.999.332,- terdapat selisih sebesar Rp7.812.330.000,- dikarenakan adanya Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri.

Diterima Dari Entitas Lain
(Rp715.068.096.483,-)

E.5.2 Diterima Dari Entitas Lain

Diterima Dari Entitas Lain merupakan pendapatan satker yang disetor ke BUN sebagai pengimbang Surplus/defisit Laporan Operasional.

Nilai Diterima Dari Entitas Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar (Rp715.068.096.483,-) dan sebesar (Rp1.034.440.482.293,-).

Rincian Diterima Dari Entitas Lain per Eselon-1 adalah sebagai berikut:

Tabel E.15 ...

Tabel E.15
Perbandingan Diterima Dari Entitas Lain Per Eselon-1
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Deember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	Sekretariat Jenderal	(28.547.106.969)	(33.528.540.621)	4.981.433.652	14,86
2	Inspektorat Jenderal	(667.783.008)	(272.047.683)	(395.735.325)	(145,47)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	(617.226.151.315)	(930.223.093.311)	312.996.941.996	33,65
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	(12.038.619.097)	(6.497.493.617)	(5.541.125.480)	(85,28)
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	(1.255.284.005)	(1.653.084.065)	397.800.060	24,06
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	(3.340.819.094)	(1.913.948.027)	(1.426.871.067)	(74,55)
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	(18.028.144.432)	(18.019.000.592)	(9.143.840)	(0,05)
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	(33.964.188.563)	(42.333.274.377)	8.369.085.814	19,77
Jumlah		(715.068.096.483)	(1.034.440.482.293)	319.372.385.810	30,87

Transfer Keluar dan
Transfer Masuk
(Rp41.993.429.439,-)
dan Rp37.142.218.893,-

E.5.3 Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Transfer keluar dan transfer masuk merupakan transaksi yang dilakukan antar entitas akuntansi (satker) di dalam satu entitas pelaporan (Kementerian/Lembaga) atau antar Kementerian/Lembaga.

Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk per Eselon-1 adalah sebagai berikut:

Tabel E.16
Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per Eselon-1

(dalam rupiah)

No	Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
1	Sekretariat Jenderal	(7.052.103.128)	13.871.274.163	(6.819.171.035)
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	(4.750.935.281)	1.087.193.523	3.663.741.758
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	(10.307.085.330)	8.003.993.700	2.303.091.630
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	(7.598.912.171)	6.230.392.025	1.368.520.146
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	(1.246.961.922)	1.246.961.922	-
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	(3.761.685.837)	1.944.074.945	1.817.610.892
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	(7.275.745.770)	4.758.328.615	2.517.417.155
Jumlah		(41.993.429.439)	37.142.218.893	4.851.210.546

Saldo Transfer Keluar dan Transfer Masuk per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp41.993.429.439,-) dan Rp37.142.218.893,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.851.210.546,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel E.17 ...

Tabel E.17
Rincian Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk
Untuk Periode 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Transfer Keluar				Transfer Masuk				Jumlah
	Kode	Uraian Keluar	Kode Akun	Uraian Akun	Kode Masuk	Uraian Masuk	Kode Akun	Uraian Akun	
1	023.01.208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN	133111	Gedung dan Bangunan	042.01.400899	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	133111	Gedung dan Bangunan	1.946.028.000
			134112	Irigasi			134112	Irigasi	12.617.120
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(4.258.278)
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(89.496.096)
2	023.11.137608	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMB. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	135111	Aset Tetap Renovasi	015.01.409294	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN	-	-	1.368.520.146
3	023.15.025226	MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI	135111	Aset Tetap Renovasi	007.03.403134	ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR	133111	Gedung dan Bangunan	1.617.799.654
JUMLAH									4.851.210.546

Penjelasan atas selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk adalah sebagai berikut:

1. Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk Pada Balai Pendidikan Multimedia Pendidikan Kemendikbud sebesar Rp1.946.028.000,- dikarenakan transaksi transfer keluar dari Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan tercatat pada BA. 023 *face* Laporan Keuangan Kemendikbud sedangkan transaksi transfer masuknya tercatat pada BA. 042 *face* Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
2. Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk Pada Balai Pendidikan Multimedia Pendidikan Kemendikbud sebesar Rp12.617.120,- dikarenakan transaksi transfer keluar dari Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan tercatat pada BA. 023 *face* Laporan Keuangan Kemendikbud sedangkan transaksi transfer masuknya tercatat pada BA. 042 *face* Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
3. Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk Pada Balai Pendidikan Multimedia Pendidikan Kemendikbud sebesar (Rp4.258.278,-) dikarenakan transaksi transfer ke luar dari Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan tercatat pada BA. 023 *face* Laporan Keuangan Kemendikbud sedangkan transaksi transfer masuknya tercatat pada BA. 042 *face* Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
4. Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk Pada Balai Pendidikan Multimedia Pendidikan Kemendikbud sebesar (Rp89.496.096,-)

dikarenakan transaksi transfer ke luar dari Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan tercatat pada BA. 023 *face* Laporan Keuangan Kemendikbud sedangkan transaksi transfer masuknya tercatat pada BA. 042 *face* Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang;

5. Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud sebesar Rp1.368.520.146,- dikarenakan transaksi transfer ke luar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan tercatat pada BA. 023 *face* Laporan Keuangan Kemendikbud sedangkan transaksi transfer masuknya tercatat pada BA. 015 *face* Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk Pada Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti sebesar Rp1.617.799.654,- dikarenakan transaksi transfer keluar dari Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti tercatat pada BA. 023 *face* Laporan Keuangan Kemendikbud sedangkan transaksi transfer masuknya tercatat pada BA. 007 *face* Laporan Keuangan Istana Kepresidenan Bogor.

Namun pada monitoring e-Rekon-LK selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp20.327.355.137,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel E.18
Rincian Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk
Berdasarkan Monitoring e-Rekon-LK

(dalam rupiah)

No	Transfer Keluar				Transfer Masuk			Selisih	Uraian Akun
	Kode	Uraian Keluar	Akun	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk		
1	023.01.137590	BIRO UMUM	117111	-	042.01.400870	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA	(18.958.834.991)	18.958.834.991	Barang Konsumsi
2	023.11.137608	BALITBANG DIKBUD	135111	1.368.520.146	015.01.409294	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN	-	1.368.520.146	Aset Tetap Renovasi
JUMLAH								20.327.355.137	

Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp20.327.355.137,- terjadi dikarenakan:

1. Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Biro Umum Setjen Kemendikud sebesar Rp18.958.834.991,- dikarenakan Hasil Revaluasi dari aset UPN dan sudah diserahterimakan pada tahun 2017;
2. Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp1.368.520.146,- dikarenakan Renovasi gedung milik Setjen Kemenkeu yang di transfer keluar oleh Balitbang Kemendikbud namun belum di input transfer masuk oleh Setjen Kemenkeu.

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp301.985.890.542.-

E.5.4 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung adalah pengesahan atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.

Saldo Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp301.985.890.542,- dan sebesar Rp184.591.882.898,-. Rincian Pengesahan Hibah Langsung dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel E.19
Rincian Pengesahan Hibah Langsung Per Satker
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
Pengesahan Hibah Langsung				
1	023.01.690271	Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri	31.427.429.831	Hibah langsung berupa Jasa Bantuan Teknis untuk penguatan aspek-aspek penting dalam sistem pendidikan Indonesia (TASS).
			15.051.437.506	Hibah Langsung Pemerintah Australia - Kegiatan <i>The Innovation For Indonesia's school children (Inovasi)</i>
			676.770.000	United Nations Children's Fund - Multi Year Work Plan Programme Cooperation Government of Indonesia
	Total		47.155.637.337	
2	023.05.403497	Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat	1.500.000.000	Hibah Tanah berupa hak pakai Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19/Kel. Rangkas tanggal 12 November 2012 dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.
	023.05.403502	Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Jambi	82.770.000	Hibah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 8.277 M2 dari Pemerintah Kabupaten Batanghari
	023.05.666845	Direktorat Pembinaan PAUD	6.308.398.080	Hibah Uang dari UNICEF
	Total		7.891.168.080	
3	023.11.137608	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	145.333.049.611	Hibah Langsung bentuk jasa dari kegiatan Inovasi tahun 2018 yang telah dilakukan pengesahan dengan MPH BJS Nomor 99901/Balitbang/H/IV/2019 tanggal 15 April 2019.
			101.606.035.514	Hibah Langsung bentuk jasa dari kegiatan Inovasi tahun 2018 yang telah dilakukan pengesahan dengan MPH-BJS Nomor 99902/Balitbang/H/XII/2019.
	Total		246.939.085.125	
J U M L A H			301.985.890.542	

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.119.316.594.649,- dan Rp14.107.304.271.629,- Rincian Ekuitas Akhir per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel E.20
Perbandingan Ekuitas Akhir Per Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik / (Turun)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.883.940.373.418	3.898.935.642.939	14.995.269.521	0,38
2	Inspektorat Jenderal	104.855.815.916	104.499.589.213	(356.226.703)	(0,34)
3	Direktorat Jenderal Dikdasmen	9.708.475.494.884	10.006.532.721.208	298.057.226.324	2,98
4	Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	1.721.735.687.698	1.671.111.790.111	(50.623.897.587)	(3,03)
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	631.948.021.441	493.057.834.854	(138.890.186.587)	(28,17)
6	Badan Pengemb. & Pembinaan Bahasa	847.738.314.356	824.753.026.581	(22.985.287.775)	(2,79)
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	7.645.929.519.681	9.128.575.433.319	1.482.645.913.638	16,24
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tendik	3.574.693.367.255	3.789.680.289.248	214.986.921.993	5,67
9	Satker Konsolidarian Kementerian	-	(15.809.842.055.844)	(15.809.842.055.844)	100,00
Jumlah		28.119.316.594.649	14.107.304.271.629	14.012.012.323.020	99,32

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2019 (*Audited*) ini merupakan laporan konsolidasi dari 8 (delapan) unit utama dengan jumlah satuan kerja di lingkup Kemendikbud adalah 319 satker.
2. Tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perubahan organisasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 9 (sembilan) unit utama dan 1 (satu) staf ahli, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - d. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 - e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - f. Direktorat Jenderal Kebudayaan;

- g. Inspektorat Jenderal;
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan;
 - i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
 - j. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Walaupun tugas dan fungsi Pendidikan Tinggi sejak Oktober 2019 telah bergabung dengan Kemendikbud berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, namun Laporan Keuangan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 (*Audited*) belum dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2019 (*Audited*) (BA 023) tetapi masih dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Kemenristek Dikti Tahun 2019 (*Audited*) (BA 042);
4. Pada tahun 2019 Kemendikbud telah mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hasil dari Tim Penilai PIPK Kemendikbud menyatakan bahwa pengendalian yang ada sudah cukup efektif dengan pengecualian pada pengendalian berupa monitoring LPj. Dengan demikian manajemen boleh menyatakan bahwa “Laporan Keuangan Disusun Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang Memadai”;
5. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal Maret 2020 berdampak pada Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2019, antara lain sebagai berikut:
- a. Terhambatnya pencairan dana/aktivasi Program Indonesia Pintar (PIP) oleh siswa penerima; dan
 - b. Terhambatnya penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas bantuan pemerintah dari penerima bantuan kepada satker pemberi bantuan.